



REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016

Tim Penyusun Buku

Penasihat

Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Pengarah

1. Didik Suhardi, Ph.D., Sekretaris Jenderal
2. Hamid Muhammad, M.Sc., Ph.D., Dirjen Dikdasmen
3. Sumarna Surapranata, Ph.D., Dirjen Guru dan Tendik
4. Ir. Harris Iskandar, Ph.D., Dirjen PAUD dan Dikmas
5. Daryanto, Ak., MIS, Gdip.Com., QIA, CA, Inspektur Jenderal
6. Ir. Totok Suprayitno, Ph.D., Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
7. Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum., Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
8. Hilmar Farid, Ph.D., Dirjen Kebudayaan
9. Dr. James Modouw, M.MT., Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Pusat dan Daerah
10. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H., Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan
11. R. Alpha Amirachman, M.Phil., Ph.D., Staf Khusus Menteri Bidang Monitoring dan Implementasi Kebijakan

Tim Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ketua: Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Sc., Ph.D, Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing,
Sekretaris: Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A., Kepala PASKA
Koordinator SMK: Drs. M. Mustaghfirin Amin, MBA., Direktur Pembinaan SMK
Koordinator LKP: Dr. Yusuf Muhyiddin, M.Pd., Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Koordinator
PKLK: Ir. Sri Renani Pantjastuti MPA., Direktur Pembinaan PKLK
Koordinator Guru Dikmen: Drs. Anas M. Adam, M.Pd., Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Menengah.

Tim Penyusun

Ir. Hendarman, M.Sc., Ph.D., Kepala Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan; Ir. Suharti, M.A., Ph.D., Kepala Biro Perencanaan Luar Negeri; Prof. Ir. Nizam, M.Sc. DIC., Ph.D, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan; Ir. Fahturahman, M. Ed., Kepala Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program; Arie Wibowo Khurniawan, S.Si., M.Ak, Kasubdit Program dan Evaluasi Dit. PSMK; Dr. Ir. M. Bakrun, MM., Kasubdit Kurikulum Dit. PSMK; Ir. Sri Puji Lestari, MM., Kasubdit Penyelarasan Kejuruan dan Kerjasama Industri Dit. PSMK; Dra. Santi Ambarukmi, M.Ed., Kasubdit Perencanaan Kebutuhan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Dit. Pembinaan Guru Dikmen; Dr. Ir. I. Gede Panca, M.Pd., Kasubdit Sarana dan Prasarana Dit. Pembinaan Kursus dan Pelatihan; Dra. Siti Masitoh, M.M., Kasubdit Kurikulum Dit. PPKLK; Kurniawan, S.T., MBA, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Kementerian PASKA; Prof. Dr. Gufran Ali Ibrahim, M.S., Kepala Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; DR. Agung Purwadi, M.Eng., Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan; Kosasih Ali Abu Bakar, MMSi, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Penyelaras Substansi

Prof. Waras Kamdi, Universitas Negeri Malang

Penyelaras Bahasa

Drs. Mustakim, M. Hum., Kepala Bidang Pemasarakatan Pusat Pembinaan Badang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Tim Pendukung

Casim, Tim Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing; Ade Chandra, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan; Moch. Hasan, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan ; Ashma Nur Afifah, Pusat Analisis dan Sinkronisasi Kebijakan

Desain Sampul dan Tata Letak

Zaitun Y.A. Kherid

SAMBUTAN **MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Inti kekuatan daya saing sebuah bangsa terletak pada manusianya. Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satu di antaranya dilahirkan dari pendidikan vokasi yang bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus menerus berkembang. Dengan demikian, dunia pendidikan juga harus mengikuti perubahan zaman. Tidak ada jalan lain, revitalisasi pendidikan vokasi perlu dilakukan untuk menyiapkan tambahan 58 juta tenaga kerja dengan keterampilan Abad ke-21 pada kurun 15 tahun mendatang untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2030.

Nawacita telah menempatkan pendidikan vokasi sebagai prioritas utama pembangunan pendidikan. Presiden juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia yang menjadi arah pembangunan pendidikan vokasi ke depan. Dalam Inpres tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat tugas untuk: (1) membuat peta jalan pengembangan SMK; (2) menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); (3) meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; (4) meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri; (5) meningkatkan akses, sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan (6) membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Dokumen Revitalisasi Pendidikan Vokasi ini merupakan wujud dari pelaksanaan Inpres tersebut. Ruang lingkupnya masih terfokus pada integrasi penyelenggaraan pendidikan vokasi yang terdapat di lingkungan Kemendikbud, yakni di SMK, lembaga kursus dan pelatihan, dan SMALB. Revitalisasi juga menyangkut perubahan filosofi dari *supply-driven* ke *demand-driven*.

Pendidikan vokasi diarahkan pada penerapan sistem ganda (*dual-system*), yakni belajar teori di SMK dan praktik di industri. Karena itu desain kurikulum dan sistem pengujian juga disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri dengan fokus utama pada bidang pertanian, maritim, pariwisata, dan industri kreatif. Penyediaan dan peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan juga menjadi bagian dari revitalisasi. Pada bagian akhir, dokumen ini menyajikan Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Vokasi di Kemendikbud.

Diharapkan dokumen ini menjadi acuan kerja bagi unit utama terkait di lingkungan Kemendikbud dalam melakukan revitalisasi pendidikan vokasi. Di samping itu, dokumen ini juga dapat dijadikan acuan bagi penyusunan Peta Jalan Pengembangan SMK secara nasional yang melibatkan kementerian/ lembaga terkait, termasuk pemerintah provinsi di seluruh Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2016.

Jakarta, 19 Desember 2016
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.


**DAFTAR
ISI**

Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Singkatan Akronim	vii
Bab I Analisis Situasi	1
1.1 Revolusi Industri Keempat dan Masyarakat Ekonomi ASEAN	1
1.2 Dinamika Pasar Kerja, Keterampilan, dan Peserta Didik	3
1.3 Arah Pembangunan Nasional	10
Bab II Sekilas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	14
2.1 Sejarah Pendidikan Vokasi	14
2.2 Pendidikan Vokasi melalui SMK	17
2.3 Pendidikan Vokasi melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan	22
2.4 Pendidikan Vokasi melalui SMA-LB	26
2.5 Tata Kelola	30
Bab III Revitalisasi Pendidikan Vokasi	33
3.1 Pentingnya Revitalisasi Pendidikan Vokasi	33
3.2 Ciri-Ciri Pendidikan Vokasi yang Baik	36
Bab IV Peta Jalan Revitalisasi Pendidikan Vokasi	40
4.1 Paradigma Baru Pendidikan Vokasi	40

4.2	Pengembangan Kelembagaan	41
4.3	Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri	43
4.4	Penyelarasan Kurikulum	47
4.5	Sertifikasi Kompetensi Lulusan	59
4.6	Penambahan dan Perbaikan Sarana-Prasarana Pembelajaran	62
4.7	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru	63
4.8	Akreditasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi	80
4.9	Regulasi	85
4.10	<i>Quickwins</i> 2016	89
Referensi		93



**DAFTAR
SINGKATAN DAN AKRONIM**

A

- ABK : Anak Berkebutuhan Khusus
Apindo : Asosiasi Pengusaha Indonesia
ASEAN : Association of South East Asia Nations

B

- BiBB : *Bundes institut für Berufs bildung*
BKR : Badan Keamanan Rakyat
BLK : Balai Latihan Kerja
BNP2TKI : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BNSP : Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BOS : Bantuan Operasional Sekolah
BPS : Badan Pusat Statistik
BUMN : Badan Usaha Milik Negara

C

- CPO : *Crude Palm Oil* (Minyak Sawit Mentah)

D

- Dapodik : Data Pokok Pendidikan
Diklat : Pendidikan dan Pelatihan
Dikmas : Pendidikan Masyarakat
Ditjen : Direktorat Jenderal
DU/DI : Dunia Usaha/Dunia Industri

E

- ESD : *Education for Sustainable Development*

G

- GATS : *General Agreement Trade in Service*
GTK : Guru dan Tenaga Kependidikan
GU : *Generally Unit*

I

- ICT : *Information and Communication Technology*
ILO : International Labor Organization
Inpres : Instruksi Presiden
IPA : Ilmu Pengetahuan Alam
IPS : Ilmu Pengetahuan Sosial

J

JP : Jam Pelajaran

K

K/L : Kementerian/Lembaga

Kadin : Kamar Dagang dan Industri Indonesia

KEK : Kawasan Ekonomi Kreatif

Kepmen : Keputusan Menteri

Kepsek : Kepala Sekolah

KK : Kompetensi Keahlian

KKNI : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

KKPI : Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi

Kemenristek Dikti : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Keppmendikbud : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

L

LKP : Lembaga Kursus dan Pelatihan

LPMP : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

LP2KS : Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah

LPTK : Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

LSP-P1 : Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama

M

MA : Madrasah Aliyah

MEA : Masyarakat Ekonomi ASEAN

MoU : *Memorandum of Understanding*

MP3EI : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

MPKN : Majelis Pendidikan Vokasi Nasional

N

NTT : Nusa Tenggara Timur

P

PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini

PDBK : Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Pelita : Pembangunan Lima Tahun

Pemda : Pemerintah Daerah

PK : Program Keahlian

PKLK : Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

PKBM : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

PLPG : Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru

PNS : Pegawai Negeri Sipil

PPPG : Pusat Pengembangan dan Penataran Guru

PPPPTK : Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PSG : Pendidikan Sistem Ganda

PTK : Pendidik dan Tenaga Kependidikan

R

- Repelita : Rencana Pembangunan Lima Tahun
 RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 RPP : Rencana Program Pembelajaran
 RPS : Ruang Praktik Sekolah

S

- SD : Sekolah Dasar
 SDG : *Standard Development Goals*
 SD-LB : Sekolah Dasar Luar Biasa
 SDM : Sumber Daya Manusia
 SED-TVET : *Sustainable Economic Development through Technical and Vocational Educational Training*
 SES : *Senior Expert Service*
 Sisdiknas : Sistem Pendidikan Nasional
 SKB : Sanggar Kegiatan Belajar
 SK : Sertifikat Keahlian
 SKKNI : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
 SKL : Standar Kompetensi Lulusan
 SLB : Sekolah Luar Biasa
 SMA : Sekolah Menengah Atas
 SMA-LB : Sekolah Menengah Atas-Luar Biasa
 SMP : Sekolah Menengah Pertama
 SMP-LB : Sekolah Menengah Pertama – Luar Biasa
 SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
 SNP : Standar Nasional Pendidikan
 STM : Sekolah Teknik Menengah

T

- TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 TKR : Tentara Keamanan Rakyat
 TPRI : Tentara Pelajar Republik Indonesia
 TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka
 TS : *Talent Scouting*
 TUK : Tempat Uji Kompetensi

U

- UKG : Ujian Kompetensi Guru
 UN : Ujian Nasional
 USB : Unit Sekolah Baru
 UU : Undang - undang

V

- VOC : *Vereenigde Oostindische Compagnie*

W

- WTO : *World Trade Organization*



BAB I ANALISIS SITUASI

1.1 Revolusi Industri Keempat dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

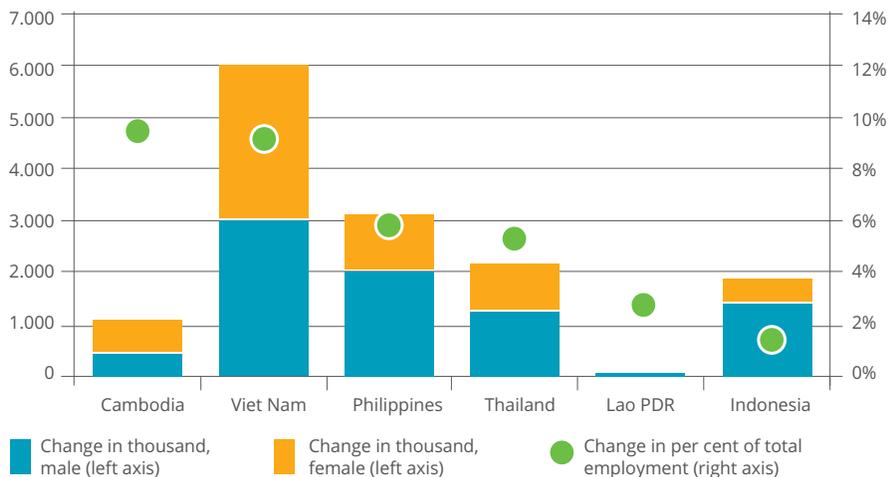
Ada dua tantangan yang dihadapi Indonesia. Tantangan *pertama* adalah hadirnya revolusi industri keempat yang sekarang mulai berlangsung. Tidak ada faktor pendorong perubahan peradaban dunia sekuat revolusi industri yang menghasilkan kemajuan teknologi. Akibat kemajuan teknologi, dunia berubah begitu cepatnya.

Berbeda dengan revolusi industri ketiga ketika mesin bekerja sendiri-sendiri, pada era revolusi industri keempat semua mesin dihubungkan dengan yang lain, bertumpu pada *cyber physical system* yang akan mengubah secara radikal cara manusia berkehidupan, bekerja, dan berkomunikasi. Inovasi yang dihasilkan untuk membuat kehidupan lebih nyaman tidak terbatas, tetapi tantangan yang harus dipecahkan juga sangat kompleks. Pekerjaan yang semula dilakukan manual dengan mengandalkan tenaga manusia semata sudah digantikan oleh mesin dan teknologi informasi. Karena itu, jenis pekerjaan yang sekarang ada perlahan akan hilang pada 10 tahun ke depan. Diperkirakan 35% keterampilan dasar akan berubah pada tahun 2020 dan hampir 2 miliar pekerja berisiko kehilangan pekerjaan mereka.

Bagi Indonesia, tantangan ini perlu diubah menjadi peluang. Dengan memberdayakan generasi muda yang melimpah dan kemajuan teknologi, Indonesia perlu menyiapkan generasi inovator untuk mengolah keanekaragaman sumber daya alam yang melimpah menjadi produk barang/jasa yang bernilai, dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru. Untuk itu, pembelajaran di SMK harus mengembangkan keterampilan Abad XXI agar menghasilkan lulusan yang *“innovative, inventive, self-motivated and self-directed, creative problem solvers to confront increasingly complex global problem”* (Trilling and Fadel, 2010).

Tantangan *kedua* adalah globalisasi, terutama berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir tahun 2015 yang memungkinkan

peningkatan mobilitas dan persaingan tenaga kerja secara bebas antarsesama negara anggota ASEAN. Berbagai perubahan sosial-ekonomi di Indonesia hingga 2030 harus ditempatkan pada konteks regional (ASEAN) dan global. Berlakunya integrasi ekonomi kawasan dalam MEA merupakan konteks regional yang perlu diperhitungkan. MEA memiliki berbagai implikasi terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Perubahan-perubahan struktural terkait MEA akan menyebabkan peningkatan kebutuhan pekerja terampil serta menurunkan kebutuhan pekerja tidak terampil. MEA diharapkan akan menjadi pendorong bagi perekonomian yang padat keterampilan (*skill intensive economies*) karena banyak anggota ASEAN telah bergerak menuju produksi dan ekspor yang pengerjaan serta teknologinya membutuhkan keterampilan dan produktivitas yang tinggi. Diperkirakan pada tahun 2010 hingga 2025, permintaan akan pekerja terampil di kawasan ASEAN akan naik sekitar 41% atau sekitar 14 juta orang. Separuh dari angka tersebut merupakan kebutuhan Indonesia dan disusul oleh Filipina dengan kebutuhan pekerja terampil sebesar 4,4 juta orang. Sesuai dengan skenario MEA, pada tahun 2025 di Indonesia akan terjadi kenaikan peluang kerja sebanyak 1,9 juta (sekitar 1,3 % dari total lapangan kerja) seperti dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



Source: ILO estimates based on M. Plummer, P. Petri and F. Zhal, op. cit.

Gambar 1.1 Peningkatan Peluang Kerja dalam MEA

Sumber: ASEAN Community 2015: *Managing integration for better jobs and shared poverty*, ILO, 2014

Skenario ini akan terjadi bila : (1) tarif intra-regional yang masih ada dihapus, (2) halangan non-tarif untuk barang dan jasa sampai 50% dihapus, dan (3) fasilitasi perdagangan dalam bentuk pengurangan *fixed trade costs* sebesar 20% dilakukan.

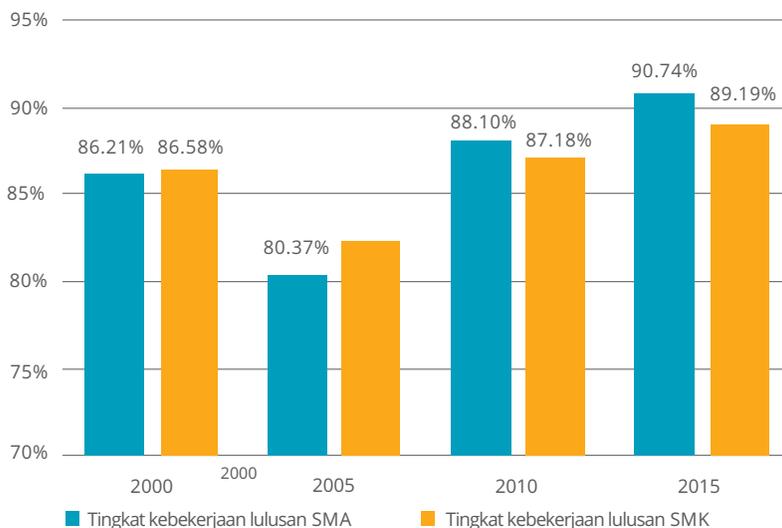
Dari Gambar 1.1 dapat dilihat terjadi *gap* antara kebutuhan tenaga kerja di Indonesia dengan prediksi yang dilakukan sehingga diperlukan program akselerasi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Indonesia. Akselerasi yang diperlukan tersebut diharapkan dapat diperankan oleh pendidikan dan pelatihan vokasi. Penyediaan tenaga kerja terampil dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang ada. Dalam peningkatan kualitas tersebut, harus dipastikan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan (terutama yang berusia muda) memenuhi kualifikasi dan memperoleh kompetensi yang dapat membekali mereka untuk bersaing dalam mengisi peluang-peluang kerja yang ada (ILO, 2014).

1.2 Dinamika Pasar Kerja, Keterampilan, dan Peserta Didik

1. Dinamika Pasar Kerja

Perubahan di pasar kerja dapat diindikasikan oleh perubahan penyerapan tenaga kerja lulusan sistem pendidikan dan pelatihan. Dari sudut pandang sistem pendidikan dan pelatihan, perubahan penyerapan tersebut dimaknai sebagai tingkat ke bekerjaan lulusan. Jika ditinjau dari tingkat ke bekerjaan lulusan, pada jenjang pendidikan menengah terindikasi terjadi perubahan kecenderungan tingkat ke bekerjaan lulusan SMK dan SMA dalam kurun waktu 15 tahun terakhir sampai dengan tahun 2015. Perubahan tingkat ke bekerjaan lulusan tersebut terjadi antara tahun 2005 dan 2010. Pada kurun waktu 5 tahun pertama, dari tahun 2000 sampai dengan 2005, tingkat ke bekerjaan lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir (2010 s.d. 2015) tingkat ke bekerjaan lulusan SMA justru lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMK (Gambar 1.2). Perubahan tingkat ke bekerjaan secara substansial ini pasti mengindikasikan terjadinya perubahan di pasar kerja.

Tingkat ke bekerjaan lulusan SMA yang lebih tinggi mungkin dipengaruhi oleh tiga faktor sebagai berikut. Pertama, adanya perubahan karakteristik dunia kerja. Dalam konteks ini tampaknya jenis pekerjaan yang memerlukan keterampilan yang lebih umum, yaitu keterampilan berpikir logis (sebagai kebalikan dari keterampilan membuat produk barang dan jasa), sebagaimana



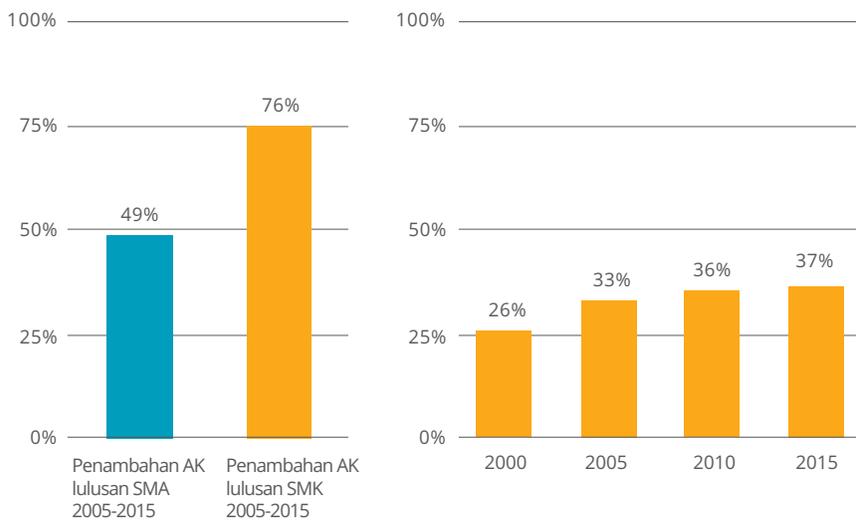
Gambar 1.2. Dinamika Keberjeaan Lulusan SMA dan SMK
(BPS, Sakernas 2000, 2005, 2010,2015. Rerata Februari dan Agustus atau November¹⁾)

dikemukakan dalam Keterampilan Abad ke-21, meningkat. Kedua, adanya lonjakan peningkatan lulusan SMK masuk ke pasar kerja yang berdampak pada kelebihan pasokan lulusan SMK. Lonjakan ini terjadi sebagai dampak langsung dari kebijakan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan di SMK melalui program pembalikan rasio peserta didik SMA:SMK menjadi 30:70. Kenaikan pasokan lulusan SMK ke pasar kerja antara tahun 2005 dan 2015 adalah sebesar 76%, sementara itu kenaikan pasokan lulusan SMA ke pasar kerja hanya sebesar 49% (Gambar 1.2). Namun, kenaikan persentase angka kerja lulusan SMK terhadap angkatan kerja lulusan sekolah menengah secara keseluruhan tidak begitu tajam. Kenaikan pasokan lulusan SMK selama 10 tahun antara tahun 2005 dan 2015 adalah 4% (dari 33% menjadi 37%), sedangkan kenaikan serupa selama 5 tahun antara tahun 2000 dan 2005 saja sudah mencapai 7% (dari 26% menjadi 33%). Ketiga, gabungan dari keduanya, yaitu jenis keterampilan pekerja baru yang dibutuhkan dunia kerja berubah, yaitu menjadi pekerja baru yang lebih memiliki kemampuan berpikir logis, sementara SMK memasok lebih banyak lulusan dengan jenis keterampilan

¹ Sakernas tahun 2000 dilaksanakan satu kali dalam setahun. Sakernas tahun 2005, 2010, dan 2015 dilaksanakan dua kali setahun. Sakernas pertama bulan Februari, Sakernas ke dua bulan Agustus atau November. Angka untuk tahun 2005, 2010, 2015 merupakan rerata dari kedua sakernas tersebut.

yang belum berubah. Itu semua menunjukkan bahwa SMK belum cukup berdaya dalam mengatasi pengangguran nasional. Berkenaan dengan itu, diperlukan Revitalisasi Pendidikan SMK.

Fenomena perubahan tingkat pengangguran dan persentase lulusan SMA dan SMK yang menganggur dan juga keterserapan tenaga kerja dari SMA dan SMK dipengaruhi oleh perubahan struktur pekerjaan di dunia kerja. Perubahan yang terjadi dari tahun 2000—2005 ke tahun 2005—2015 adalah dari perubahan secara lambat proporsi pekerja pada sektor-sektor pertanian dan jasa.



a. Persentase (%) penambahan angkatan kerja 2005 s.d. 2015 terhadap angkatan kerja tahun 2015

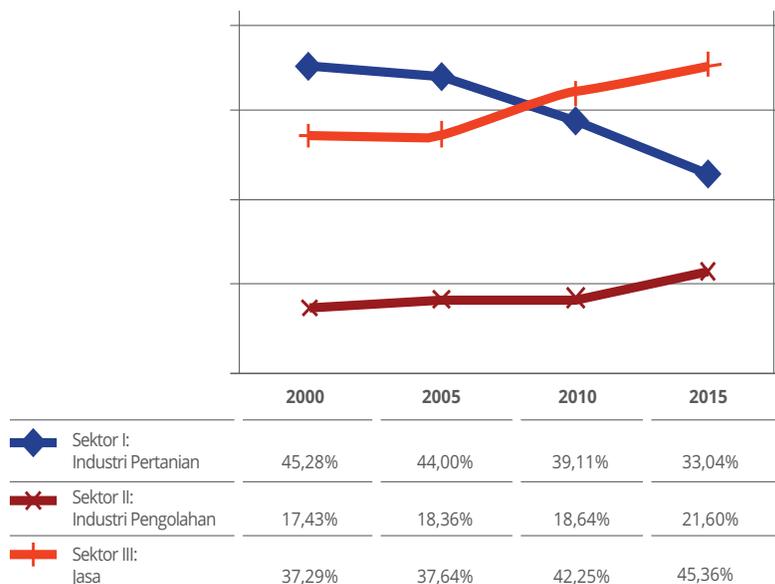
b. Persentase (%) angkatan kerja lulusan SMK terhadap angkatan kerja lulusan sekolah menengah

Gambar 1.3. Penambahan Angkatan Kerja Lulusan Sekolah Menengah
(BPS, Sakernas Februari dan Agustus/November 2000, 2005, 2010, 2015)

Pada sektor pertanian, persentase penduduk yang bekerja menurun secara lambat antara tahun 2000—2005 dan kemudian menurun secara cepat pada periode 2005—2015. Pada sektor jasa penduduk yang bekerja meningkat secara lambat dalam periode 5 tahun pertama dan kemudian meningkat secara cepat pada kurun waktu 10 tahun berikutnya. Pada sektor industri pengolahan, relatif tidak terjadi perubahan pada kedua kurun waktu tersebut.

Perubahan struktur pekerjaan di pasar kerja menyebabkan penurunan tingkat kebecerjaan lulusan SMK dan peningkatan kebecerjaan lulusan SMA. Penurunan tingkat kebecerjaan ini disinyalir terjadi karena kekurangan kemampuan SMK dalam menanggapi perubahan struktur pekerjaan di pasar kerja. Tingkat kebecerjaan lulusan SMK sedikit meningkat (diindikasikan oleh penurunan kecil persentase lulusan yang menganggur), tetapi peningkatan tingkat kebecerjaannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA (diindikasikan oleh sangat besarnya penurunan persentase lulusan yang menganggur).

Jika ditinjau dari lapangan kerja, cenderung ada perubahan struktur kesempatan kerja yang berjalan terus dan makin besar perubahannya selama 15 tahun sampai dengan tahun 2015. Perubahan tersebut terjadi dari sektor pertanian ke sektor jasa dan industri pengolahan. Pada sektor pertanian terjadi penurunan drastis proporsi pekerja pada sektor pertanian, yaitu dari 45% pada tahun 2000 menjadi tinggal 33% pada tahun 2015. Perubahan tersebut diimbangi oleh peningkatan drastis proporsi pekerja pada sektor jasa dari 37% menjadi 45% pada kurun waktu yang sama. Sementara itu, proporsi pekerja pada sektor industri pengolahan meningkat secara lebih lambat dari 17% menjadi mendekati 22% saja (Gambar 1.4).



Gambar 1.4 Perkembangan Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa pada Tahun 2000--2015

2. Perubahan Keterampilan yang Diperlukan oleh Pasar Kerja

Dunia telah memasuki era perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge based society and economy*) yang terbuka (digital) dan bertumpu pada persaingan bebas. Era perekonomian berbasis pengetahuan ditandai dengan persaingan dalam menguasai pengetahuan dan perlombaan ketat penemuan pengetahuan baru. Era digital ditandai dengan perubahan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penguasaan media TIK yang merata di tengah makin cepat dan meluasnya cakupan penyebaran dan pertukaran informasi. Era keterbukaan dan persaingan bebas ditandai dengan mudahnya sekat-sekat antarnegara termasuk dengan pembentukan berbagai kesepakatan pembukaan pasar regional dalam berbagai ukuran cakupan kawasan dari sekelompok negara bertetangga, satu benua, dan lintas benua seperti MEA, AFTA, dan APEC.

Pada era tersebut, jenis pekerjaan seseorang berubah dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan penyediaan tenaga kerja yang semakin mengglobal serta pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Pekerjaan yang semula dilakukan secara manual dengan mengandalkan tenaga manusia telah digantikan oleh mesin dan teknologi informasi. Beberapa jenis pekerjaan yang ada saat ini, perlahan akan hilang pada 10 tahun ke depan. Diperkirakan 35% keterampilan dasar pada dunia kerja akan berubah pada tahun 2020, dan hampir 2 miliar pekerja berisiko kehilangan pekerjaan. Karena itu, pendidikan dan pelatihan seharusnya dilakukan dengan memberi banyak pilihan keterampilan yang sesuai dengan minat peserta didik dan perkembangan kebutuhan pasar kerja sehingga memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*).

Agar peserta didik mampu bersaing dalam karir pada masa depan dan menjadi aset pembangunan, pendidikan—termasuk pendidikan vokasi formal dan nonformal—hendaknya dikelola dalam konteks pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan dan pelatihan vokasi pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi perlu membekali lulusannya dengan berbagai kecakapan yang lebih umum, yaitu kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi. Kecakapan hidup dan berkarier (*life and career skills*) memiliki komponen, yakni (1) fleksibilitas dan adaptabilitas, (2) memiliki inisiatif dan dapat mengatur diri sendiri, (3) interaksi sosial dan antar-budaya, (4) produktivitas dan akuntabilitas mengelola proyek dan menghasilkan produk, dan (5) kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya, kecakapan dalam belajar

dan berinovasi (*learning and innovation skills*) memiliki komponen (1) berpikir kritis dan mengatasi masalah, (2) kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi, dan (3) kreativitas dan inovasi. Sementara itu, kecakapan media informasi dan teknologi (*information media and technology skills*) memiliki komponen (1) literasi informasi, (2) literasi media, dan (3) literasi TIK. Pembekalan kecakapan semacam ini dikemas dengan istilah Keterampilan Abad XXI (*21st Century Skills*).

Pendidikan dan pelatihan untuk memasuki pasar kerja pada bidang tertentu dilaksanakan melalui berbagai kursus keterampilan bersertifikat internasional. Penentuan kursus keterampilan untuk keperluan ini memiliki dua keunggulan sekaligus. Keunggulan pertama adalah bahwa calon pekerja tidak perlu mengambil satu set pengetahuan dan keterampilan sekaligus, tetapi dapat memilih satu jenis keterampilan atau keahlian yang memang diperlukan untuk mengisi pembukaan kesempatan kerja yang tersedia atau menciptakan pekerjaan yang produknya, barang atau jasa, sedang atau akan dibutuhkan dalam waktu cepat. Dengan cara ini terjadi efisiensi penggunaan sumber daya, dalam pengertian bahwa pemilihan jenis keterampilan terarah secara tepat serta waktu dan sumber daya lain yang digunakan lebih hemat. Keunggulan kedua adalah bahwa kursus keterampilan dapat selalu aktif menanggapi kebutuhan pasar kerja yang sedang terbuka atau akan segera terbuka.

Sistem pendidikan dan pelatihan yang mengadopsi Keterampilan Abad XXI juga berdampak pada beberapa paradigma pendidikan, seperti peserta didik menjadi pusat pembelajaran dan ketersediaan dalam melakukan *blended learning* sehingga perlu juga menguasai kecakapan dalam belajar dan berinovasi (*learning and innovation skills*) yang memiliki komponen antara lain (1) berpikir kritis dan mengatasi masalah; (2) kecakapan berkomunikasi dan berkolaborasi; serta (3) kreativitas dan inovasi.

3. Perubahan Karakteristik Peserta Didik

Karakteristik peserta didik Abad XXI berbeda dengan masa sebelumnya. Mereka adalah generasi yang *digital native*. Hasil penelitian majalah *The Economist* (2015) mengungkapkan bahwa mereka menyukai pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi. Karena itu, cara dan sarana pembelajaran konvensional yang mengandalkan tatap muka perlu dirubah ke cara pembelajaran *blended learning* yang memadukan antara tatap muka pembelajaran berbasis teknologi informasi.

Di samping *blended learning*, pembelajaran vokasi juga perlu didesain untuk memberi pengalaman langsung kepada para peserta didik dengan

dunia nyata (*hands on learning*) seluas mungkin. Intinya, dunia nyata harus dihadirkan di dalam kelas dan sebaliknya, kelas juga perlu dibawa ke dunia nyata.

Kebutuhan belajar berubah dari memenuhi cetak biru (*blueprint*) profesi manusia yang diturunkan dari definisi peran sosial atau profesi tertentu bergeser ke arah pengembangan kapabilitas peserta didik untuk menciptakan profesi yang berpusat pada keunggulan personalnya. Di samping itu, dunia profesi mengalami dinamika kehidupan yang tidak mudah lagi diprediksi sehingga definisi dari peran sosial semakin kabur. Banyak tempat kerja memberlakukan pekerja temporer atau pekerja kontrak sehingga akan lebih banyak pengalaman berhenti dari pekerjaan yang satu dan ganti pekerjaan lain sebagai bagian dari karier pekerja. Hal ini menggambarkan mobilitas pasar kerja yang makin tinggi sehingga desain kurikulum pendidikan yang didasarkan pada prediksi peran sosial semakin tidak memadai. Keadaan ini makin menguatkan kebutuhan perubahan orientasi pendidikan vokasi dari pengembangan kompetensi ke kapabilitas lulusan.

Kompetensi merupakan unsur penting dari kapabilitas. Oleh karena itu, orang-orang yang kapabel adalah mereka yang dapat berbuat secara efektif dalam konteks yang tidak diketahui atau masalah baru. Untuk bisa menjadi kapabel, orang membutuhkan pengalaman belajar yang berbeda dengan belajar kompetensi. Kemampuan belajar bagaimana cara belajar, nilai-nilai, dan kepercayaan diri, misalnya, tidak dapat dicapai hanya dengan menggunakan pendekatan perilaku sederhana.

Perubahan yang cukup bermakna pada tingkat ke bekerjaan lulusan sekolah menengah mengindikasikan adanya dua tantangan yang perlu dijawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi ke depan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi perlu memperhatikan dua variabel sekaligus. Variabel pertama adalah bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi harus menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Variabel kedua adalah bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi harus dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik peserta didiknya. Dengan demikian, pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan nasional akan mampu memberikan layanan kepada dua pihak sekaligus, yaitu layanan terhadap kebutuhan pembangunan nasional yang diindikasikan oleh kebutuhan pasar kerja dan layanan kebutuhan warga negara akan pendidikan yang diindikasikan oleh perhatian terhadap karakteristik peserta didik.

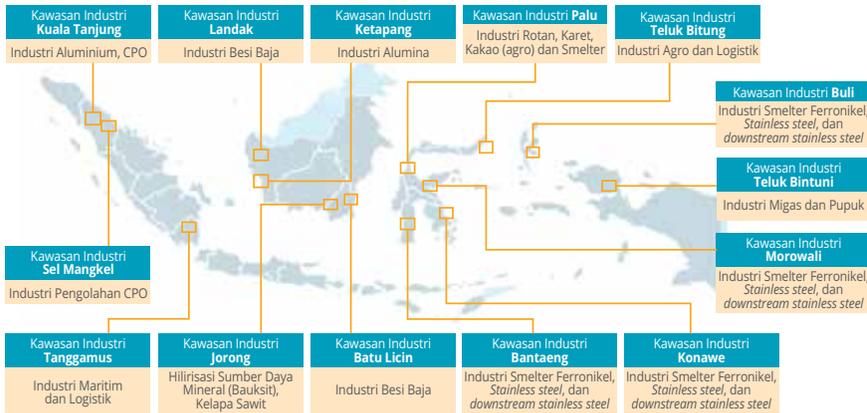
1.3 Arah Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019 menetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis² melalui percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang telah ada maupun yang berada di luar Jawa (Sumatra, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan mengembangkan potensi dan keunggulan di bidang manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata. Pada pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta 14 (empat belas) Kawasan Industri baru yang tentunya membutuhkan tenaga kerja lulusan SMK yang terampil sesuai dengan sektor-sektor bisnis yang dikembangkan.

Tabel 1.1 Lokasi dan Sektor Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
(RPJMN,2015-2019)

No	Lokasi	Sektor bisnis yang dikembangkan
1	Sorong, Papua Barat	Pengolahan hasil laut dan industri pengilangan
2	Teluk Bintuni, Papua Barat	Industri pupuk dan petrokimia
3	Merauke, Papua	Industri makanan dan energi
4	Garombang, Kab. Baru, Sulsel	Kilang, petrokimia, dan depo logistik energi
5	Tarakan, Kalimantan Utara	Industri manufaktur
6	Batulicin, Kalimantan Selatan	Industri pengilangan dan industri berbasis metal
7	Padang-Pariaman, Sumatera Barat	Industri agro berbasis karet, kakao, dan kelapa sawit
8	Lhokseumawe, Aceh	Industri manufaktur dan galangan kapal
9	Jawa Barat (Bandung dan Jabodetabek)	Industri teknologi tinggi, riset dan pengembangan, dan jasa pendidikan/ Kesehatan
10	Taka Bonerate, Selayar, Sulawesi Selatan	Industri pariwisata berbasis maritim
11	Raja Empat, Papua Barat	Industri pariwisata berbasis maritim

² Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai 'penggerak utama pengembangan wilayah'.



Gambar 1.4 Sebaran 14 Kawasan Industri Prioritas Wilayah Luar Jawa (RPJMN 2015-2019)

Selain itu, dokumen *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan 22 kegiatan utama serta enam koridor ekonominya juga dapat menjadi referensi pembangunan Pendidikan Vokasi. Klaster industri atau kawasan ekonomi khusus berbasis sumber daya unggulan (komoditi) akan dikembangkan di tiap koridor tersebut. Setidaknya, enam koridor itu menunjukkan potensi ekonomi yang ada di setiap wilayah. Selain itu, koridor-koridor ekonomi juga mencerminkan fokus pembangunan Indonesia pada kedaulatan pangan, energi dan kelistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri. Saat ini, ketersediaan bidang studi dan paket keahlian di SMK yang tersebar di berbagai daerah belum sepenuhnya sesuai dengan berbagai unggulan di koridor-koridor ekonomi.

Di seluruh wilayah ketersediaan bidang studi TIK cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa bidang studi tersebut saat ini cukup diminati. Sekalipun demikian, perlu ada evaluasi tentang potensi dan relevansi dari bidang studi TIK di berbagai wilayah agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Distribusi paket keahlian yang dibuka per-wilayah dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Indonesia diperkirakan akan menjadi pelaku ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan transaksi bisnis daring akan melonjak tinggi. Ini membuka peluang bagi bidang studi keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi yang relevan. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mematangkan konsep dan kurikulum

pemrograman komputer (*coding*) untuk SMK. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya wirausaha di bidang internet dan teknologi informasi serta sesuai dengan peta jalan (*roadmap*) *e-commerce* yang berinisiatif mengembangkan SDM dengan menciptakan 1.000 usaha rintisan baru. Era digital yang ditandai dengan makin besarnya peran media sosial, baik di ranah pribadi maupun bisnis, membuka ruang profesi baru, misalnya untuk pengelolaan media sosial dan komunitas (*social media and community officer*). Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan di berbagai daerah saat ini akan meningkatkan kebutuhan akan SDM yang memiliki kompetensi di bidang sistem logistik dan rantai pasok.

Empat sektor unggulan, yaitu kemaritiman, pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif juga memiliki berbagai peluang bagi pengembangan profesi dan keterampilan pada masa depan. Kebijakan pembangunan yang hendak menjadikan Indonesia negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan

Tabel 1.2. Distribusi Paket Keahlian SMK yang Dibuka dan Potensi Pengembangan Ekonomi Per Wilayah

No	Bidang Studi	Jumlah Paket Keahlian Per Bidang Studi yang dibuka per Wilayah						
		Sumatera	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Kalimantan	Sulawesi	Maluku	Papua
1	Teknologi dan Rekayasa	1.256	3.437	173	253	440	41	51
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.380	3.976	278	326	621	76	67
3	Kesehatan	181	746	93	65	272	64	21
4	Pariwisata	276	958	205	69	147	9	15
5	Seni Pertunjukan	16	66	11	9	8	2	-
6	Seni Rupa dan Kriya	31	132	16	12	11	1	3
7	Perikanan dan Kelautan	114	139	71	48	135	60	25
8	Agribisnis dan Agroteknologi	399	427	150	201	244	72	52
9	Bisnis dan Manajemen	1.309	3.384	128	295	393	45	44
Jumlah		4,954	13,227	1,125	1,272	2,266	369	278
Pengembangan Industri dan Bisnis (RPJMN 2015 – 2019)		<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa sawit • Karet • Batubara • Besi baja • Petrokimia • Perkapalan • Logistik • Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Tekstil • Makanan & Minuman • ICT • Peralatan Transportasi • Alutsista • Perkapalan • Jabodetabek Area • Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Peternakan • Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelapa sawit • Logistik • Perkayuan • Industri baja • Bauksit • Batubara • Migas 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri Manufaktur • Pengolahan perikanan • Smelter Nikel • Industri Baja • Logistik • Agroindustri (kakao, karet, rumput laut, rotan) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian pangan • Perikanan • Tembaga • Nikel • Migas • Petrokimia • Pariwisata • Logistik 	

nasional perlu didukung dengan SDM yang memadai. Indonesia masih kekurangan tenaga kerja di industri pelayaran karena pada tahun 2015 baru terpenuhi 21% atau 1.500 orang dari kebutuhan yang mencapai 7.000 orang. Selain di bidang pelayaran, SDM dengan keterampilan yang relevan juga dibutuhkan pada berbagai level di bidang angkutan lepas pantai, kepelabuhan (baik untuk pelabuhan umum maupun terminal khusus), serta perikanan³. Kebijakan pangan yang dicerminkan melalui UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pangan menugaskan tercapainya Ketahanan Pangan Nasional. Tujuan tersebut hanya bisa tercapai jika kualitas dan kuantitas SDM pertanian mampu berperan dalam pembangunan pertanian yang makin sulit dan kompleks dengan berbagai tantangan seperti ancaman degradasi tanah dan konversi lahan, variabilitas dan ketidakpastian iklim, erosi sumber daya genetik karena hama dan penyakit, berlakunya sistem pasar bebas dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan kecenderungan penurunan minat tenaga kerja muda untuk memasuki sektor pertanian, bidang studi yang terkait dengan pertanian, perikanan dan peternakan perlu melakukan penataan ulang agar bisa berfokus pada kompetensi-kompetensi keahlian yang relevan dan dibutuhkan serta dapat menumbuhkan kembali minat peserta didik terhadap bidang-bidang tersebut.

Ketersediaan SDM yang kompeten juga merupakan salah satu tantangan utama pengembangan pariwisata Indonesia. Mengingat produk utama pariwisata adalah jasa, unsur SDM sangat dominan. Oleh sebab itu, pembinaan dan peningkatan kualitas SDM pariwisata di berbagai bidang—seperti perhotelan, travel, transportasi, komunikasi dan informasi—harus mendapat perhatian utama. Dewasa ini tenaga kerja pariwisata lebih terkonsentrasi di kota-kota provinsi, sedangkan objek/atraksi wisata banyak yang berlokasi di kabupaten bahkan kecamatan. Sebagian besar daerah yang memiliki objek/atraksi wisata belum mempunyai tenaga kerja dengan kualifikasi bidang kepariwisataan apalagi dengan kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional. Potensi pariwisata di daerah seharusnya juga bisa dimanfaatkan secara optimal dan memunculkan usaha-usaha rintisan wisata.

3 <http://www.neraca.co.id/article/60455/>

BAB II SEKILAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN VOKASI

2.1 Sejarah Pendidikan Vokasi

Pada zaman kekuasaan VOC, yaitu pada tahun 1737, didirikanlah sekolah vokasi pertama, yaitu akademi pelayaran. Namun, sekolah tersebut ditutup pada tahun 1755. Setelah dua abad lebih berkuasa, tepatnya pada tahun 1853, Belanda membuka kembali sekolah vokasi di Indonesia. Sekolah vokasi tersebut bernama *Ambachts School van Soerabaja* atau Sekolah Pertukangan Surabaya, yang diperuntukkan bagi anak-anak Indonesia dan Belanda.

Pada masa penjajahan Jepang, Indonesia harus kembali membangun pendidikan dari nol, karena pada masa itu segala sesuatu yang berbau Belanda harus dihilangkan. Sekolah pertukangan pun kembali dibuka pada masa itu, yaitu sekolah teknik menengah (STM) di daerah Ciroyom, Bandung. Sekolah yang dibuka pada zaman Jepang ini lamanya 3 tahun dan sempat mempunyai peserta didik sebanyak 360 orang. Namun, sekolah tersebut harus ditutup setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, tepatnya pada bulan Agustus tahun 1945. Para guru dan peserta didik terpecah, bergabung dengan satuan-satuan perjuangan yang terbentuk secara spontan, seperti Tentara Pelajar Republik Indonesia (TPRI), Badan Keamanan Rakyat (BKR), dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Sejak penerapan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang digulirkan pada tahun 1969 bentuk pendidikan vokasi mulai mengadopsi model dari negara lain dan secara bertahap pendidikan vokasi mendapat tempat pada sistem pendidikan Indonesia. Tonggak pengembangan pendidikan vokasi secara terpadu di Indonesia dimulai pada Repelita V, melalui penetapan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dilanjutkan dengan ditetapkannya PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah yang memuat beberapa ketentuan dalam pengembangan pendidikan vokasi. Dalam periode ini, melalui Keppmendikbud No. 490/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan mulai dilaksanakan juga pengembangan unit produksi sebagai bagian dari proses pembelajaran di SMK, kegiatan unit produksi ini meliputi kegiatan

memproduksi barang dan jasa dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekolah dan lingkungannya.

Kebijakan pengembangan lebih lanjut dilakukan pemerintah melalui penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) melalui konsep *Link and Match*, mulai tahun 1997 (Kepmen No. 323/U/1997) yang merupakan awal upayaelibatan dunia usaha/industri dalam pendidikan vokasi. Sistem ini mengadopsi model *Dual System* di Jerman, dengan melakukan beberapa penyesuaian. Secara teoretis, PSG merupakan sistem pendidikan yang dianggap ideal untuk meningkatkan relevansi dan efisiensi SMK. Praktik peserta didik di industri merupakan bagian dari kegiatan penerapan ini. Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh SMK untuk melibatkan dunia usaha/industri antara lain melalui pelaksanaan kegiatan gebyar pendidikan vokasi, penandatanganan kerja sama sekolah dengan dunia usaha/industri, pembentukan organisasi *intern* di sekolah, dan kunjungan guru-guru secara reguler ke dunia usaha/ industri. Upaya ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Majelis Pendidikan Vokasi Nasional (MPKN) dan Majelis Pendidikan Vokasi Provinsi. Sesuai dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15, keberadaan SMK dirancang untuk mempersiapkan lulusannya bekerja di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah kejuruan ditujukan untuk penyiapan lulusan yang siap kerja, baik bekerja secara mandiri maupun bekerja pada industri tertentu.

Layanan pendidikan (dan pelatihan) vokasi diberikan mulai jenjang pendidikan menengah, yakni SMK dan SMK-Luar Biasa, serta jenjang pendidikan tinggi, yakni Politeknik dan program Diploma di universitas. Pemberian layanan pendidikan dapat melalui jalur formal (persekolahan, seperti SMK) maupun nonformal melalui kursus dan pelatihan keterampilan.

Pendidikan vokasi pada jalur pendidikan nonformal dan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan melalui berbagai satuan pendidikan nonformal, baik di Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Latihan Kerja (BLK), maupun berbagai lembaga pelatihan lainnya. Pendidikan vokasi yang bersifat informal dilakukan dalam bentuk magang atau “terjun langsung” ke lapangan kerja yang akan dimasuki.

Pendidikan vokasi melalui kursus dan pelatihan keterampilan pada tahun 1970an diselenggarakan dibawah binaan Direktorat Pendidikan Kejuruan. Pada tahun 1975 pembinaan kursus dan pelatihan keterampilan diserahkan

kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (PLSPO), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program kursus dan pelatihan keterampilan dikenal dengan sebutan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat (PLSM) dan selanjutnya pada tahun 1990an dikenal dengan akronim Diklusemas. Pada waktu itu belum banyak program-program kursus yang berkembang di masyarakat, antara lain kursus Tata Buku atau Bond A/B, Mengetik, Bahasa Inggris, Tata Kecantikan, Tata Rias Pengantin, Menjahit. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat dan industri, Direktorat Pendidikan Masyarakat menyusun kurikulum berbagai program kursus dan melaksanakan ujian nasional kursus.

Pada tahun 2006 terbentuk direktorat baru sebagai pemisahan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, yaitu Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dan kemudian berubah menjadi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Pada tahun 2009 ujian nasional kursus diganti dengan uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sampai sekarang sudah terbentuk 35 jenis Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK).

Dalam perkembangannya pendidikan vokasi yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah tetap disebut pendidikan vokasi dan yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tinggi juga disebut pendidikan vokasi⁴. Pada saat ini, secara regulasi Program Pendidikan Kejuruan di Indonesia terbagi dalam program pendidikan 3 tahun, dan program pendidikan 4 tahun. Namun, jumlah SMK 4 tahun hanya ada 12 SMK dari 12.848 SMK. Bidang Keahlian yang dikembangkan terdapat 9 Bidang Keahlian, 48 Program Keahlian, dan 142 Paket Keahlian. Selain dari pendidikan (dan pelatihan) kejuruan yang dilaksanakan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja (*pre-service training* atau pelatihan pra-jabatan), terdapat pelatihan kejuruan yang dilaksanakan setelah lulus masuk ke dunia kerja (*in-service training* atau pelatihan dalam jabatan). Pelatihan-pelatihan semacam ini dilaksanakan oleh perusahaan, industri, atau tempat kerja untuk menyiapkan karyawan baru agar menguasai keterampilan yang benar-benar sesuai dengan tempat kerja yang dimasukinya.

Dalam rangka melaksanakan efisiensi pendidikan (dan pelatihan) kejuruan diperlukan sinkronisasi antar-berbagai pola tersebut. Sinkronisasi

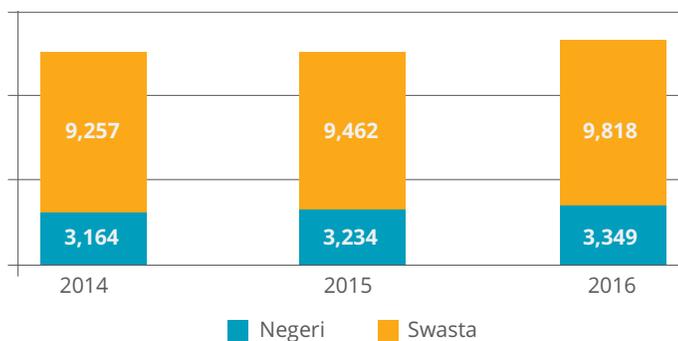
4 Dalam Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan vokasi di tingkat pendidikan menengah disebut pendidikan kejuruan, dan di tingkat pendidikan tinggi disebut pendidikan vokasi.

pertama adalah antara pihak penyelenggara moda pelatihan pra-jabatan dan penyelenggara pelatihan dalam jabatan. Sinkronisasi kedua adalah antara para pemberi layanan pendidikan dan pelatihan pra-jabatan. Kedua jenis sinkronisasi ini belum tampak wujudnya dalam penyelenggara pendidikan (dan pelatihan) kejuruan.

2.2 Pendidikan Vokasi melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Sesuai dengan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 15, keberadaan SMK dirancang untuk mempersiapkan lulusannya bekerja di bidang tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan menengah kejuruan ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, baik bekerja secara mandiri maupun bekerja pada industri tertentu. SMK dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah, masyarakat, dan DU/DI. Tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya, memiliki kemampuan adaptasi, dan daya saing yang tinggi.

Dalam kurun waktu 2009—2014 telah dibangun sekitar 3.000 SMK baru dan hingga awal tahun 2016, jumlah SMK di Indonesia sudah mencapai 13.167 sekolah (3.349 SMK Negeri dan 9.818 SMK Swasta) seperti dijelaskan pada Gambar 2.1.

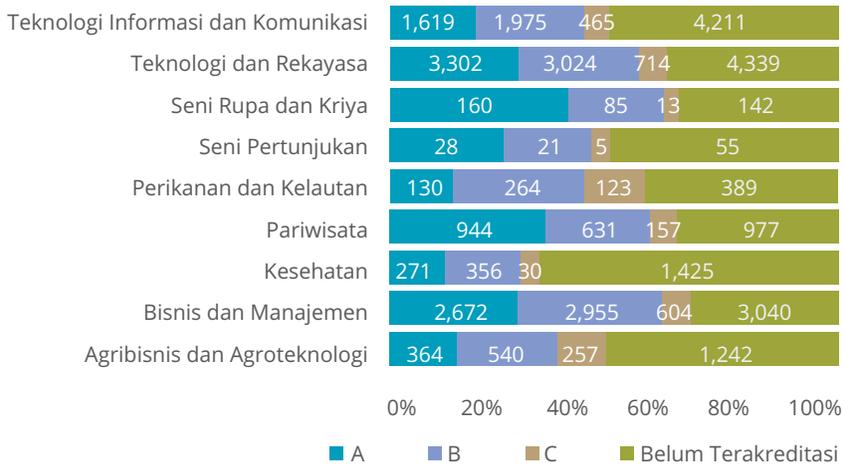


Gambar 2.1 Perkembangan Jumlah Sekolah
(Direktorat SMK, 2016)

Dari Gambar 2.1 bisa dilihat bahwa 75% dari SMK yang ada berada dalam tata kelola pihak swasta. Hanya 3,349 yang berstatus negeri. Hal ini berakibat pada lemahnya pengawasan kualitas pembelajaran di SMK swasta. Belum lagi jumlah peserta didik di SMK swasta biasanya kurang dari 200 orang sehingga

pemberian dana BOS tidak bisa efektif dalam menjalankan operasional sekolah.

Dari jumlah sekolah di atas, akreditasi dilakukan berdasarkan program keahlian, seperti bisa dilihat dalam Gambar 2.2.



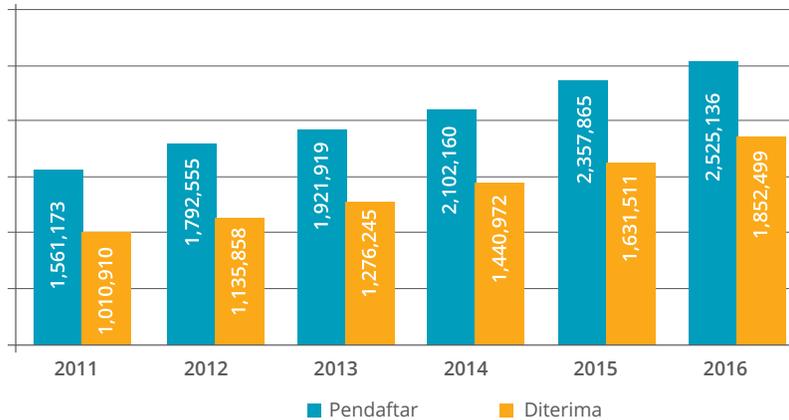
Gambar 2.2 Akreditasi SMK Berdasarkan Program Keahlian
(Direktorat SMK, 2016)

Masih ada 15.550 program keahlian yang belum diakreditasi, sedangkan 270 program keahlian yang masih harus diperbaiki untuk bisa memperoleh akreditasi.

Animo peserta didik yang mendaftar di SMK semakin meningkat setiap tahunnya (lihat Gambar 2.3). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap SMK semakin baik.

Dari gambar 2.3 bisa dilihat ada penambahan sekitar 250.000 pendaftar tiap tahunnya, tetapi penambahan peserta didik yang dapat ditampung rata-rata hanya sebesar 200.000 peserta didik. Hal ini terjadi karena keterbatasan jumlah sekolah, ruang kelas, dan tenaga pengajar, sehingga tidak semua pendaftar bisa diterima di SMK. Akses dan ketersebaran satuan pendidikan SMK masih menjadi masalah yang harus segera diselesaikan.

Dari jumlah peserta didik yang ada, mereka tersebar di 9 program keahlian SMK, seperti terlihat dalam Tabel 2.1.



Gambar 2.3 Perbandingan Jumlah yang Mendaftar dan yang Diterima di SMK 2011-2016 (Direktorat SMK, 2016)

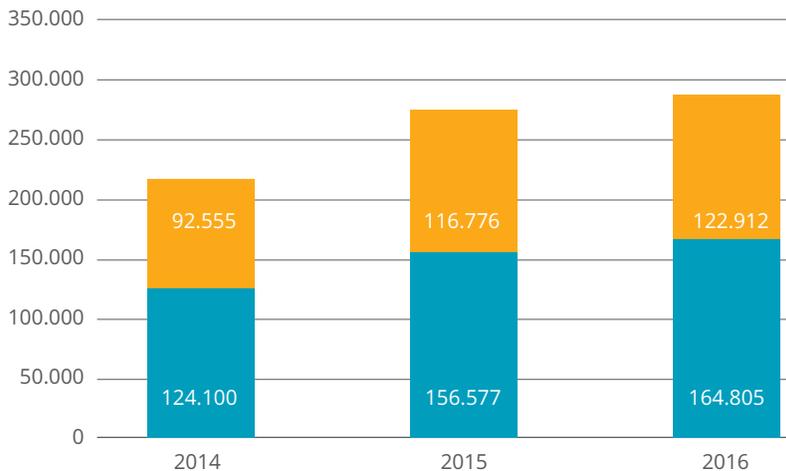
Tabel 2.1 Persebaran Peserta Didik SMK di 9 Bidang Keahlian (Direktorat SMK, 2016)

No	Bidang Keahlian	Peserta Didik	Persentase
1	Teknologi dan Rekayasa	1.538.713	34.25%
2	Teknologi Informasi dan Komunikasi	972.526	21.77%
3	Kesehatan	197.738	4.47%
4	Agribisnis dan Agroteknologi	186.554	4.21%
5	Perikanan dan Kelautan	56.647	1.28%
6	Bisnis dan Manajemen	1.182.091	26.52%
7	Pariwisata	286.465	6.48%
8	Seni Rupa dan Kriya	36.396	0.82%
9	Seni Pertunjukan	8.258	0.19%
	TOTAL	4.465.488	100 %

Dari 9 bidang keahlian yang ada, mayoritas peserta didik berasal dari program bisnis dan manajemen. Sementara itu, peminat untuk 3 program keahlian prioritas Presiden Joko Widodo relatif kecil, yaitu untuk pariwisata sebesar 6.48%, agribisnis dan agroteknologi sebesar 4.21%, dan perikanan

dan kelautan sebesar 1.28%. Kecilnya peminat untuk ketiga program keahlian tersebut secara umum terkait dengan kebijakan prioritas pembangunan di masa lalu, yaitu ketika anggapan bahwa seakan-akan hanya industri manufaktur yang dapat membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia, padahal industri pariwisata serta agrobisnis dan agroteknologi juga berpotensi. Selanjutnya secara spesifik terkait dengan program perikanan dan kelautan terjadi perubahan paradigma tentang laut, dari laut sebagai pemisah pulau menjadi laut sebagai penghubung pulau sekaligus tempat keberadaan sumber daya alam. Kebijakan pembangunan nasional di masa lalu tersebut ditindaklanjuti dengan pengembangan program-program keahlian di SMK dan kebijakan operasional pembukaan program-program tersebut di SMK-SMK yang ada.

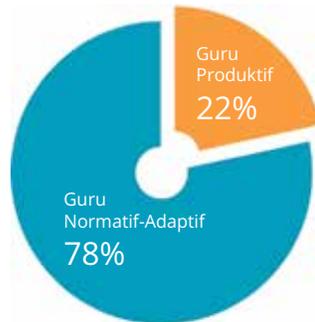
Sebanding dengan meningkatnya jumlah peserta didik SMK, penyediaan tenaga pengajar juga makin ditingkatkan untuk memenuhi kondisi mengajar yang efektif. Namun, sesuai dengan banyaknya jumlah sekolah swasta, mayoritas guru SMK mengajar di SMK swasta. Peningkatan jumlah tenaga pengajar SMK bisa dilihat dalam Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Perkembangan Jumlah Guru SMK 2014—2016
(Direktorat SMK, 2016)

Namun, meningkatnya guru SMK tidak sebanding dengan meningkatnya kualitas guru yang kompeten dalam mengajar. Hanya 22% guru SMK yang berkualifikasi guru kelompok mata pelajaran bidang produktif (biasa disebut Guru Produktif). Guru Produktif adalah guru yang mempunyai sertifikat

kompetensi yang sesuai dengan jurusan yang diajarkan. Misalkan guru yang mengajar *welding* harus mempunyai sertifikat yang menyatakan kompetensinya dalam bidang *welding*. Sertifikat kompetensi sesuai dengan kejuruan ini yang menjamin bahwa guru bisa dalam mengajar kompetensi sesuai dengan jurusan tempat dia berada. Sertifikasi juga bisa menjamin bahwa kompetensi guru sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan profesional.



Gambar 2.5 Perbandingan Guru Produktif dan Normatif-Adaptif di SMK (Direktorat SMK, 2016)

Mayoritas guru SMK berasal dari guru kelompok mata pelajaran bidang normatif dan adaptif (biasa juga disebut Guru Normatif dan Guru Adaptif). Guru Normatif dan Guru Adaptif merupakan guru yang mengajar kewarganegaraan, matematika, bahasa, dan lainnya yang tidak relevan dengan program kejuruan. Hal ini menyebabkan kurangnya guru dan tenaga pendidik yang benar-benar mempunyai kompetensi untuk mengajarkan bidang keahlian. Jika hal ini terus berlanjut, peserta didik SMK tidak benar-benar mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan program kompetensi.

Selain ketersediaan guru/instruktur, kompetensi guru juga diragukan. Banyak Guru Produktif yang tidak mutakhir (*up to date*) dalam perkembangan teknologi yang dipakai dalam program keahliannya sehingga memengaruhi proses belajar-mengajar yang juga berpengaruh pada kompetensi peserta didik. Misalnya, guru tidak mengetahui cara penggunaan mesin atau alat terbaru dalam bidang *welding*. Akibatnya, dia hanya bisa mengajarkan cara penggunaan mesin lama. Hal ini membuat peserta didik tidak bisa memenuhi kebutuhan dunia kerja sehingga kalah saing dengan tenaga kerja lain.

Atas dasar itu, perlu ada pelatihan secara berkala bagi guru/instruktur yang mengajar di bidang pendidikan vokasi dari dunia usaha dan dunia industri.

Selain untuk mengasah kompetensi, pelatihan ini berguna untuk membuat guru tetap *up to date* dengan perkembangan dunia usaha dan dunia industri sesuai dengan program keahliannya.

2.3 Pendidikan Vokasi melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan

Pelaksanaan program pendidikan vokasi pada Lembaga Kursus dan Pelatihan telah menjadi bagian utama dalam program dan kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembentukan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menunjukkan perlunya pelibatan dan fasilitasi pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan vokasi pada lembaga kursus dan pelatihan. Berbeda dengan pendidikan vokasi pada jalur formal, pendidikan vokasi pada jalur nonformal di LKP, PKBM, SKB, dan satuan pendidikan nonformal lainnya diselenggarakan dengan prinsip antara lain (1) *fleksibel*, lebih leluasa dalam aspek penggunaan waktu, tempat, dan program pembelajaran; (2) *praktis*, ditujukan untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha maupun industri dalam jangka pendek; dan (3) *fungsiional*, peserta didik merasakan langsung manfaat dari hasil kegiatan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan. Dengan segala kemudahan yang dimiliki, layanan pendidikan vokasi pada kursus dan pelatihan dapat dengan cepat memberikan solusi pengembangan keterampilan dan kompetensi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kurikulum dan pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan serta dievaluasi lebih mudah dan cepat untuk menyesuaikan dengan permintaan masyarakat dan DUDI. Dengan paradigma belajar sepanjang hayat, layanan pendidikan vokasi pada kursus dan pelatihan harus dikuatkan dan dijadikan sebagai arus utama (*mainstream*) layanan kursus dan pelatihan di Indonesia.

Lembaga Pendidikan Kursus dan Pelatihan sendiri berjumlah 19.699 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari lembaga kursus ini terdapat 28.444 keterampilan yang diajarkan. Jenis-jenis keterampilan bisa dilihat pada Tabel 2.2. Namun, dari banyaknya jumlah lembaga kursus yang ada, baru 10% yang memperoleh akreditasi seperti yang terlihat dalam Tabel 2.3.

Akreditasi dilakukan oleh BAN PNF (sekarang BAN PAUD dan PNF). Sejak tahun 2009 penilaian hasil akreditasi tidak menentukan peringkat, namun sejak tahun 2015 diberikan peringkat akreditasi yaitu terakreditasi A, B, dan C, dan tidak terakreditasi. Total program kursus dan pelatihan yang sudah terakreditasi sebanyak 2.060 program, sedangkan satuan pendidikan atau lembaga yang terakreditasi sebanyak 232 satuan/lembaga.

Tabel 2.3 Jumlah LKP Terakreditasi Tahun 2016
(Direktorat Lembaga Kursus dan Pelatihan, 2016)

NO	Provinsi	Jumlah Program Terakreditasi	Program Terakreditasi			Jumlah Program	Satuan/Lembaga
			A	B	C		
1	Aceh	3	1	2	4	10	0
2	Bali	30	4	26	19	79	0
3	Banten	60	3	17	28	108	8
4	Bengkulu	9	3	2	4	18	0
5	DI Yogyakarta	80	0	4	6	90	19
6	DKI Jakarta	92	12	1	1	106	26
7	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
8	Jambi	31	0	0	6	37	8
9	Jawa Barat	204	8	28	60	300	26
10	Jawa Tengah	290	6	54	57	407	64
11	Jawa Timur	295	11	38	38	382	57
12	Kalimantan Barat	7	0	0	2	9	1
13	Kalimantan Selatan	14	0	1	12	27	2
14	Kalimantan Tengah	12	1	5	9	27	4
15	Kalimantan Timur	35	1	3	3	42	4
16	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
17	Kep. Riau	7	0	3	2	12	0
18	Kep. Bangka Belitung	6	0	0	6	12	0
19	Lampung	29	7	11	6	53	0
20	Maluku	2	0	0	0	2	1
21	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
22	Nusa Tenggara Barat	20	0	1	1	22	0
23	Nusa Tenggara Timur	6	0	2	5	13	1
24	Papua	2	0	1	2	5	0
25	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
26	Riau	11	2	2	1	16	0
27	Sulawesi Barat	4	0	0	0	4	0
28	Sulawesi Selatan	32	2	8	3	45	1
29	Sulawesi Tengah	20	0	7	6	33	3
30	Sulawesi Tenggara	1	0	1	2	4	0
31	Sulawesi Utara	18	0	0	0	18	0
32	Sumatera Barat	23	3	7	18	51	4
33	Sumatera Selatan	16	1	6	2	25	0
34	Sumatera Utara	75	1	11	16	103	3
	JUMLAH	1.434	66	241	319	2.060	232

Akreditasi menjadi jaminan bagi penyelenggaraan kualitas pendidikan di lembaga kursus atau pelatihan tersebut. Sedikitnya jumlah lembaga yang terakreditasi ini menjadi 'pekerjaan rumah' untuk bisa ditingkatkan agar kualitas pendidikan dan kualitas lulusan bisa terjamin sehingga para lulusan mampu bersaing.

Penyelenggaraan pendidikan vokasi pada kursus dan pelatihan terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut dari tahun 2012—2015 LKP telah menampung 2.282.025 peserta didik pada tahun 2012; 2.940.249 peserta didik pada tahun 2013, 2.999.990 peserta didik pada tahun 2014, dan 3.090.438 peserta didik pada tahun 2015. Peserta didik di LKP diharuskan untuk mengikuti uji kompetensi agar kompetensinya diakui dan disahkan melalui lembaga uji kompetensi (antara lain Lembaga Sertifikasi Kompetensi). Peserta uji kompetensi terus meningkat meskipun sempat fluktuatif dengan persentase 72,52% peserta yang lulus uji kompetensi.

Tenaga Pendidik atau lebih dikenal dengan sebutan instruktur pada LKP terus meningkat. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah instruktur. Jumlah instruktur pada tahun 2012 mencapai 42.594 orang, pada tahun 2013 berjumlah 43.825 orang, pada tahun 2014 terus naik jumlahnya mencapai 46.361 orang, dan pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah instruktur menjadi 45.175 orang.

Penurunan jumlah instruktur pada tahun 2015 bisa berkorelasi dengan jumlah penurunan peserta didik pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena rekrutmen dan penugasan instruktur disesuaikan dengan jumlah program dan jumlah peserta didik, artinya belum sepenuhnya instruktur bisa dikontrak permanen atau jangka panjang. Untuk itu, perlu ada sistem yang andal untuk membuat kontrak kerja dan perikatan antara instruktur dengan LKP. Minimnya pendapatan LKP dan pendanaan yang bersifat mandiri mengakibatkan belum kuatnya ikatan kerja antara tenaga pendidik dan pengelola LKP.

Tidak mudah menjadi seorang instruktur pada LKP. Perlu proses rekrutmen yang tepat oleh lembaga berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan sebagai berikut.

- a. Kualifikasi instruktur pada Kursus dan Pelatihan Berbasis Keilmuan harus memiliki:
 - kualifikasi akademik minimal Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) yang diperoleh dari perguruan tinggi terakreditasi;

- sertifikat kompetensi keahlian dalam bidang yang relevan; dan
- sertifikat instruktur.

b. Kualifikasi instruktur pada Kursus dan Pelatihan Bersifat Teknis-Praktis:

- memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan SMA/SMK/MA/Paket C dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai pendidik dalam bidangnya; dan
- sertifikat instruktur.

Dengan persyaratan tersebut diharapkan para instruktur LKP memiliki kriteria dan persyaratan yang standar. Upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi instruktur akan terus dikembangkan dan ditingkatkan.

2.4 Pendidikan Vokasi melalui Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA-LB)

Pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus diselenggarakan melalui pendidikan khusus/sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan inklusif. Pendidikan khusus disediakan untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), hambatan pendengaran (tunarungu), hambatan intelektual (tunagrahita), tunadaksa dan autisme. Penyelenggaraan pendidikan khusus dilakukan secara terpisah dengan anak-anak pada umumnya. Adapun pendidikan inklusif diselenggarakan di sekolah umum sehingga anak berkebutuhan khusus (ABK) belajar bersama-sama dengan anak-anak pada umumnya, dan sekolah mengakomodasi semua kebutuhan anak dengan berbagai keragamannya.

Kurikulum yang terkait dengan program vokasional dan kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah khusus menjadi prioritas utama, yang disusun dalam perbandingan 40% akademik dan 60% vokasional. Pembelajaran keterampilan hidup dan kerja (program kemandirian) merupakan hal yang penting bagi kehidupan peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) sehingga porsi lebih besar. Hal itu dimaksudkan agar setelah menyelesaikan sekolah, keterampilan itu dapat digunakan untuk bekerja dan hidup secara mandiri.

Berdasarkan Dapodik bulan Mei 2016, jumlah satuan pendidikan khusus sebanyak 2.059 sekolah yang terdiri SDLB, SMPLB, dan SMALB dengan jumlah PDBK sebanyak 118.846 orang.



Gambar 2.6 Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) TA 2015/2016
(Dapodik PKLK, 2016)

Berdasarkan Dapodik tahun 2016, mayoritas pengelolaan SLB berada di pihak swasta. Program kemandirian diberikan kepada peserta didik pada SMALB. Keberadaan SMALB ada yang berdiri sendiri dan atau satu atap dengan SDLB dan SMPLB (SLB). Jumlah SMALB tahun 2016 sebanyak 1.049 sekolah.

Di SMALB, peserta didik yang tidak memiliki kondisi kekhususan yang berat diberikan program kemandirian sehingga membantu anak mengembangkan potensinya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar menjadi mandiri. Program kemandirian pada jenjang SMALB, PDBK dapat mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi mandiri. Program kemandirian pada jenjang SMALB, PDBK dapat mengembangkan potensinya dengan memilih sesuai minat dan bakatnya maksimal 2 peminatan. Adapun program kemandirian di SMALB adalah sebagai berikut.

- 1) Tata Boga
- 2) Tata Busana
- 3) Tata Kecantikan
- 4) Pijat (Massage)
- 5) Tata Graha
- 6) Teknik Informatika dan Komputer
- 7) Teknik Penyiaran Radio
- 8) Perbengkelan Motor
- 9) Seni Musik
- 10) Seni Tari
- 11) Seni Lukis
- 12) Cetak Saring/Sablon
- 13) Suvenir

- 14) Seni Membatik
- 15) Desain Grafis
- 16) Fotografi
- 17) Elektronika Alat Rumah Tangga
- 18) Budidaya Perikanan
- 19) Budidaya Peternakan
- 20) Budidaya Tanaman

Satuan pendidikan dapat mengembangkan pilihan kemandirian sesuai dengan potensi daerah dan karakteristik, minat dan bakat peserta didik. Sebagaimana diketahui, setiap daerah memiliki potensi daerah yang berbeda-beda. Potensi daerah di Provinsi Bali tentu berbeda dengan di daerah Provinsi Jawa Barat, di Provinsi Aceh tentu berbeda dengan di Provinsi DI Yogyakarta. Sebagai contoh, Daerah Brebes di Jawa Tengah memiliki potensi daerah di bidang pertanian dan peternakan dengan produksi bawang merah dan telur asinnya. Sekolah dapat mengembangkan program kemandirian PDBK terkait dengan hasil pertanian dan peternakan tersebut. Di daerah Solo, sekolah khusus memungkinkan mengembangkan program kemandirian batik. Di daerah Bali juga memungkinkan mengembangkan program kemandirian pembuatan souvenir (bidang pariwisata).

Pada tahun 2016, terdapat 11.196 peserta didik yang tersebar di 1.049 sekolah. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, jumlah kelas di SMALB bergantung pada kekhususan siswa karena model pengajaran yang guru lakukan sangat bergantung pada kekhususan siswa. Program kemandirian yang diterima siswa disesuaikan dengan kekhususan yang dipunyai oleh siswa (lihat Tabel 2.4).

Tabel 2.4 Kesesuaian Mata Pelajaran Kemandirian dengan Ketunaan yang Dialami Siswa
(Direktorat PKLK, 2016)

No.	Mata Pelajaran Kemandirian	Ketunaan				
		Tuna-netra	Tuna-rungu	Tuna-daksa	Tuna-grahita	Autis
1	Teknik Informatika dan Komputer	●	●	●	●	●
2	Masase	●	●	●		
3	Elektronika alat rumah tangga		●	●		
4	Perbengkelan Sepeda Motor		●	●	●	
5	Tata Graha		●		●	

No.	Mata Pelajaran Kemandirian	Ketunaan				
		Tuna- netra	Tuna- rungu	Tuna- daksa	Tuna- grahita	Autis
6	Tata Kecantikan		●	●	●	
7	Tata Boga		●	●	●	
8	Tata Busana		●	●	●	
9	Penyiaran Radio	●		●		
10	Seni Tari		●	●	●	
11	Seni Musik	●		●	●	●
12	Seni Lukis		●	●	●	●
13	Sablon		●	●	●	
14	Budidaya Holtikultura		●		●	
15	Budidaya Perikanan		●	●		
16	Budidaya Peternakan		●	●		
17	Fotografi		●	●		●
18	Desain Grafis		●	●		●
19	Seni Membatik		●	●	●	
20	Suvenir		●	●	●	

Pada tahun 2016 terdapat 4.196 guru yang mengajar di SMALB dan 2.098 di antaranya mengajar kemandirian. Dengan kondisi yang ada sekarang masih terdapat kekurangan guru SMALB, termasuk di dalamnya guru yang mengajar kemandirian. Menurut Dapodik, dibutuhkan sebanyak 6.384 guru SMALB dan 5.320 guru yang mengajarkan kemandirian.

Kualitas guru juga menjadi masalah dalam proses belajar-mengajar. Guru yang mengajar program kemandirian juga tidak berarti guru-guru tersebut mempunyai sertifikat kompetensi yang berhubungan dengan kemandirian yang diajarkan. Misalnya pada program tata busana, kebanyakan guru mengikuti kursus menjahit dan ilmunya diajarkan di sekolah. Sertifikasi kompetensi guru menjadi hal yang mutlak harus disediakan agar guru-guru bisa dengan benar mengajarkan peserta didik sesuai dengan program kemandirian yang diajarkan.

2.5 Tata Kelola

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki konsekuensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan vokasi karena pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Pengelolaan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Masyarakat (kursus dan pelatihan) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Provinsi perlu mempersiapkan diri untuk menerima tanggung jawab pengelolaan SMK dari Kabupaten/Kota, mulai dari aspek perencanaan, pendanaan, pembinaan, dan evaluasinya. Perpindahan kewenangan Lembaga Kursus dan Pelatihan ke Pemda Kabupaten/Kota juga membutuhkan waktu penyesuaian. Pemda Kabupaten/Kota harus mulai mendata lembaga kursus dan pelatihan yang ada di wilayahnya dan juga menyiapkan perencanaan, penganggaran, pembinaan, serta evaluasi pendidikan nonformal bagi lembaga kursus dan pelatihan.

Untuk itu, perlu disusun sistem dan aturan terkait dengan pengelolaan pendidikan vokasi pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal. Pemerintah Provinsi juga harus siap dalam menghadapi perpindahan pengelolaan ini sehingga tidak berpengaruh pada kualitas belajar-mengajar. Adaptasi perpindahan pengelolaan lembaga pendidikan ini hendaknya juga diikutidengan komitmen peningkatan mutu oleh Pemda terhadap pengelolaan satuan pendidikan di wilayahnya.

Regulasi juga bisa menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Misalnya dalam penyelenggaraan pendidikan, tidak ada standar magang yang jelas dalam penyelenggaraan pendidikan di Lembaga Kursus dan Pelatihan dan juga SMALB. Terlihat bahwa tidak ada standardisasi dalam pendidikan vokasi. Padahal, peserta didik di SMALB dan Lembaga Kursus dan Pelatihan juga membutuhkan magang untuk bisa merasakan praktik kerja secara langsung di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal ini juga sangat berguna untuk pengembangan karakter peserta didik untuk siap masuk DUDI.

Untuk menjamin mutu pelaksanaan magang, diperlukan aturan tentang hal ini untuk menguatkan sistem dan mekanisme yang tepat dalam mengelola pembelajaran dengan praktik nyata di DUDI. Regulasi hendaknya bersifat teknis melalui peraturan menteri agar 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dapat dicapai dalam pendidikan vokasi. Penetapan kompetensi

dan sertifikasi nasional dilakukan oleh menteri atau pejabat lain yang mendapatkan mandat dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula penetapan kompetensi tersebut mengacu kepada KKNI. Sayangnya, belum ada harmonisasi sertifikasi profesi dan kompetensi untuk Lembaga Pendidikan Vokasi, yaitu SMK dan Lembaga Kursus. Menurut UU Sisdiknas Pasal 21 ayat (3), gelar profesi hanya ditujukan untuk pendidikan tinggi. Namun, pada Pasal 61 dinyatakan bahwa "Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu". Dengan demikian, diperlu sinkronisasi peraturan tentang sertifikasi di SMK, SMALB, dan LKP.

Dalam penguatan dan pengarusutamaan pendidikan vokasi pada sekolah serta kursus dan pelatihan, perlu dibuat sistem dan mekanisme kegiatan magang yang efektif dan efisien. Setidaknya terdapat dua upaya yang dapat dilakukan untuk itu. Upaya pertama adalah dengan meningkatkan frekuensi pengiriman peserta didik untuk magang di industri secara bergelombang sepanjang tahun (misalnya dua kali setahun kalau magangnya dilaksanakan selama enam bulan) tidak hanya satu kali dalam setahun. Dengan cara ini baik sekolah maupun industri mendapat keuntungan. Keuntungan industri adalah dapat disusunnya rencana pemanfaatan SDM dengan baik, yaitu pemanfaatan karyawan pabrik dan peserta magang dalam proses produksi. Diasumsikan bahwa peserta magang tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dalam proses produksi yang dimentori oleh karyawan tetapnya. Keuntungan sekolah dan lembaga kursus dan pelatihan adalah lebih besarnya peluang melaksanakan magang. Tentu saja peserta didik peserta magang adalah peserta didik yang sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang disyaratkan untuk melaksanakan magang di industri. Upaya ke dua adalah membangun *teaching factory* di sekolah. *Teaching factory* ini benar-benar merupakan sebuah pabrik atau tempat membuat produk (*factory*) yang dikelola oleh sekolah. Namun demikian, selain fungsi itu juga sekaligus menjadi tempat peserta didik mempraktikkan teori kejuruan yang dipelajari di kelas.

Selain di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan vokasi masih tersebar di berbagai kementerian, di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Persebaran fungsi pendidikan vokasi di berbagai kementerian ini bisa membuat perbedaan kualitas dalam pembelajaran dalam pendidikan vokasi. Padahal, dalam penyelenggaraan

pendidikan, Kemendikbud telah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus diimplementasikan.

Selain itu, dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri terdapat tiga direktorat yang mengelola pendidikan vokasi, yaitu Direktorat SMK, Direktorat PKLK yang menangani SMALB, dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Direktorat SMK dan PKLK berada pada jalur pendidikan formal, sedangkan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berada pada jalur pendidikan nonformal. Ketiga direktorat ini melayani kebutuhan peserta didik yang berbeda, akan tetapi tetap memerlukan standarisasi pendidikan. Untuk menjamin standarisasi pendidikan vokasi diperlukan regulasi tentang integrasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi. Integrasi ini diperlukan agar terdapat kesamaan dalam penyelenggaraan pendidikan terlepas dari perbedaan kementerian/lembaga yang menyelenggarakannya. Dengan terjaminnya proses belajar-mengajar otomatis akan terjamin pula kualitas lulusannya.

BAB III REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI

3.1 Pentingnya Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Dalam kaitan dengan efisiensi eksternal, peran dan fungsi pendidikan vokasi harus memiliki dampak dan pengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup dan produktivitas kehidupan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Lembaga pendidikan, baik formal, nonformal, dan informal, dituntut mampu menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan profesional untuk memberikan daya dorong dan daya dukung terhadap kegiatan pembangunan di berbagai sektor usaha dan industri.

Secara pragmatis, pendidikan vokasi harus mampu menyiapkan lulusan yang siap bekerja secara profesional dan/atau mampu berwirausaha untuk menggerakkan pembangunan bangsa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Lulusan berbagai lembaga pendidikan akan menjadi angkatan kerja yang siap memasuki pasar tenaga kerja untuk mendukung proses pembangunan dan sekaligus memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya. Ada 6 (enam) urgensi dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu sebagai berikut.

1. Amanah Nawacita dan SDGs 2030

Nawacita 6 menyatakan bahwa *"..kami akan membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini..."*

Sementara itu, *Sustainable Development Goals 2030* menyatakan bahwa *"By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship..."* (pada 2030 terjadi peningkatan pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan termasuk keterampilan vokasi dan teknikal untuk bekerja dan berwirausaha)

2. Pemenuhan 58 Juta Tenaga Kerja Terampil Sampai 2030

Ekonomi Indonesia dengan peluang bisnisnya yang besar membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan sikap kerja yang tepat. Perekonomian

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dengan kondisi yang relatif stabil. Pada tahun 2030, Indonesia berpotensi untuk menjadi negara ke-7 dengan tingkat ekonomi terbesar di dunia. Ini merupakan loncatan yang signifikan dari posisinya di peringkat ke-16 pada tahun 2012. Dalam jangka waktu 15 tahun ke depan, akan terjadi lonjakan kebutuhan tenaga kerja dari 55 juta pada saat ini menjadi 113 juta pada tahun 2030. Peluang bisnis sebesar 1.8 triliun US Dollar—antara lain di bidang jasa, pertanian, dan perikanan—juga diproyeksikan akan tercipta (McKinsey, 2012). Oleh sebab itu, tersedianya sumberdaya manusia (tenaga kerja) dalam jumlah memadai dan dengan keterampilan yang tepat bisa membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik bagi investasi yang bisa menggerakkan pembangunan (lihat juga Gambar. 3,1)



Gambar 3.1 Proyeksi Ekonomi Indonesia pada 2030

3. Persaingan di Tingkat Regional dan Global

Dalam lingkup regional adanya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*) memberikan kemungkinan adanya lapangan kerja terbuka sampai tahun 2025, yaitu sebesar 14 juta lapangan kerja.

Selain itu, terdapat 20 jenis kompetensi yang dapat dimasuki para lulusan pendidikan vokasi. Kedua puluh kompetensi yang dimaksud adalah pariwisata, manufaktur/mekatronika/elektro, pertanian/perikanan/perkebunan, konstruksi, bisnis dan perdagangan, industri kreatif, *food and beverage*, otomotif, *welding*, kimia industri, akuntansi, kewirausahaan, *building/complex engineering*, *entertainment*, *sound and lighting engineering*,

pelayaran niaga, keperawatan: *caregiver/baby sitter*, instruktur bahasa Inggris/Jepang/Korea/Jerman/Prancis/Belanda, *surveyor, massage & spa*.

Dalam lingkup global diperkirakan akan terjadi 23% penurunan usia kerja di Eropa dalam rentang waktu antara 2010 sampai 2050 yang disebabkan oleh *ageing society*. Penurunan penduduk usia kerja di Eropa ini membuka peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja Indonesia.

4. Menyiapkan Generasi Emas 2045

Pada tahun 2045, lebih dari 60% penduduk Indonesia akan tergolong usia muda. Pada sekitar tahun 2040 akan ditemukan sekitar 195 juta penduduk dalam usia produktif sehingga terjadi peningkatan yang pada tahun 2015 berjumlah 170 juta orang.

Penduduk usia produktif tersebut agar dapat menjadi tenaga terampil perlu dibekali dengan keterampilan abad 21. Pendidikan vokasi tidak boleh gagal, karena kegagalan penyiapan tenaga terampil melalui pendidikan vokasi akan menyebabkan permasalahan secara ekonomi dan menambah angka pengangguran di Indonesia.

5. Memperbaiki Struktur Tenaga Kerja

Nawacita 5 Kabinet Kerja Jokowi—Jusuf Kalla adalah “meningkatkan kualitas hidup manusia”, akan diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dan “Wajib Belajar 12 Tahun” bebas pungutan. Momentum menjadikan pembelajaran 12 tahun sebagai wajib belajar berimplikasi kepada perubahan struktur tenaga kerja. Perubahan dimaksud mendorong perwujudan tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan minimal SMA/SMK.

Apabila pada tahun 2015 tenaga kerja Indonesia didominasi oleh lulusan di bawah Sekolah Dasar (45.1%) pada tahun 2030 diperkirakan lulusan SD atau di bawahnya akan menjadi berkurang menjadi 21.7%. Perubahan latar belakang lulusan yang bekerja yang berasal dari tingkat SMA adalah dari 16.4% pada tahun 2015 menjadi 18.5% pada tahun 2030; dan untuk lulusan SMK dari 9.8% pada tahun 2015 menjadi 22.8% pada tahun 2030.

6. Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Efisiensi

Data statistik menunjukkan bahwa

- dari 7,56 juta total pengangguran terbuka, 20,76% berpendidikan SMK (BPS, 2015);

- hanya 22,3% guru SMK yang mengajar sesuai bidang keterampilan (Guru Produktif); dan
- pendidikan vokasi belum *link-and-match* dengan DUDI (dunia usaha/ industri).

Di samping itu, fakta menunjukkan bahwa pendidikan vokasi belum *link-and-match* dengan DUDI (dunia usaha/industri). Fakta tersebut diduga karena dalam beberapa dekade terakhir SMK dikelola dan ditangani oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Revitalisasi pendidikan vokasi dapat memanfaatkan momentum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan SMK dikoordinasikan oleh pemerintah daerah provinsi. Pengalihan kewenangan ini diperkirakan dapat menajamkan ketepatan pemenuhan *supply-demand* tenaga kerja lintas kabupaten/kota.

3.2 Ciri-Ciri Pendidikan Vokasi yang Baik

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan di atas, diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi untuk mengubah proses pendidikan vokasi menjadi lebih baik. Berikut diuraikan beberapa ciri pendidikan vokasi yang baik.

1. Pembelajaran Abad XXI dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan sesuai dengan perkembangan kemajuan zaman, diperlukan sumber daya yang dilengkapi dengan kemampuan Abad XXI. Melalui Pembelajaran Abad XXI, peserta didik diharapkan menguasai kecakapan, yang meliputi kecakapan hidup dan berkarier, kecakapan dalam belajar dan berinovasi, serta kecakapan memanfaatkan informasi, media, dan teknologi. Keseimbangan antara memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan kebutuhan untuk memperkenalkan Keterampilan Abad XXI harus diatur dengan baik karena masyarakat lokal memiliki tuntutan selain untuk pelestarian budaya dan bahasa, juga mengharapkan mobilitas sosial dan geografis pada anak-anaknya.

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan/ESD (*Education for Sustainable Development*) dimaknai sebagai upaya memberikan peserta didik dua jenis kecakapan, yaitu (1) pengetahuan, kemampuan, dan nilai-nilai untuk menjawab tantangan-tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi pada Abad XXI, serta (2) kecakapan untuk membantu merawat dan

memulihkan kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial.

Selain itu, ESD menumbuhkan pemahaman peserta didik tentang permasalahan yang dihadapi terkait dengan keberlangsungan pembangunan, perspektif dan kebutuhan masyarakat yang berbeda pada generasi bangsa Indonesia berikutnya dan di belahan dunia yang lain. ESD dimasukkan ke dalam proses sebagai sarana untuk memberdayakan peserta didik dan mendorong peserta didik agar belajar dari dalam sekolah dan dari lingkungan mereka di luar sekolah.

2. Pembelajaran Abad XXI: dari Kompetensi ke Kapabilitas

Dalam jagat pendidikan dikenal tiga model pendidikan, yaitu apa yang dikenal dengan sebutan (1) model pelatihan (*training model*), (2) model pengembangan profesional (*professional development model*), dan (3) model pengembangan kapabilitas (*capability development model*). Model pertama dan kedua sangat populer dalam pendidikan ala industrial, yang “mengeksploitasi” sumber daya manusia untuk tujuan reproduksi ekonomi melalui pendidikan. Landasan berpikirnya adalah teori efisiensi sosial, yaitu bahwa kurikulum pendidikan didesain berbasis kompetensi dengan rujukan utama kebutuhan kerja (*job*) pada area okupasi atau profesi tertentu. Dengan demikian, pendidikan menjalankan tugasnya dengan efisien karena fiksasi cakupan kompetensi dalam kurikulum amat jelas, definitif, dan rigid.

3. Kerja Sama dengan DUDI

Pendidikan vokasi yang baik adalah pendidikan vokasi yang juga menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Untuk bisa melakukan hal tersebut, proses belajar-mengajar haruslah sesuai dan selaras dengan DUDI. Kehadiran DUDI bukan hanya sebagai tempat bagi peserta didik pendidikan vokasi untuk melakukan praktik magang. Namun, pelibatan DUDI harus merefleksikan implementasi dari keahlian ganda DUDI dengan sekolah agar tujuan pendidikan bisa tercapai.

Proses pelibatan DUDI bisa dalam pengembangan kurikulum sehingga kurikulum menjadi lebih relevan dengan kebutuhan. DUDI juga bisa memberikan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik agar terus memutakhirkan pengetahuan dengan mengikuti perkembangan mesin atau teknik yang sesuai dengan program kejuruan. Ada kalanya DUDI mengirimkan tenaga profesionalnya sebagai guru pendamping atau mentor agar peserta didik berinteraksi langsung dengan para profesional.

Sesuai dengan UU Sisdiknas Nomor 23 Tahun 2013, DUDI juga bisa dilibatkan dalam pembiayaan pendidikan. Di sekolah yang erat kerja samanya dengan DUDI, DUDI juga bisa dilibatkan dalam pembangunan laboratorium atau tempat praktik atau pemberian bantuan peralatan praktik di sekolah. Sekolah yang erat hubungannya dengan DUDI dan bisa menerapkan praktik keahlian ganda dipastikan bisa menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh DUDI.

4. Penanaman Jiwa Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)

Walau sudah menjalin kerja sama dengan DUDI, tidak semua lulusan pendidikan vokasi bisa diterima pada perusahaan atau industri yang terkait dengan program keahliannya. Oleh karena itu, peserta didik diharapkan bisa memiliki kemampuan berwirausaha (*entrepreneurship*), sehingga bukan hanya menjadi tenaga kerja yang terampil, tetapi juga mampu menciptakan usaha baru atau menciptakan profesi baru.

Dalam meraih peringkat ke-7 ekonomi dunia, Indonesia bukan hanya menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Indonesia juga harus sigap dengan menyiapkan tenaga kerja yang mempunyai jiwa kewirausahaan sehingga bisa membantu meningkatkan kondisi ekonomi di Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja terampil yang lain. Di sinilah urgensinya perluasan pendekatan kompetensi ke kapabilitas personal sesuai dengan perkembangan Abad XXI.

Keterampilan berwirausaha bisa dibangun dari peserta didik di sekolah dengan menjual hasil-hasil keterampilan peserta didik kepada masyarakat atau DUDI secara langsung. Keterampilan berwirausaha ini tidak bisa ditimbulkan begitu saja, harus ada proses pemupukan ke dalam diri peserta didik. Keterampilan berwirausaha juga bisa dibangun saat ada unit keterampilan di satuan pendidikan yang mendapat bantuan modal dan menjual hasil produksinya sehingga keuntungan bisa langsung dipakai untuk memutar roda bisnis. Pengalaman berwirausaha seperti ini yang harus dipupuk dan dipraktikkan selama peserta didik mengikuti proses belajar-mengajar.

5. Adaptasi dan Kontekstualisasi Lokal

Proses perencanaan dan pembelajaran pendidikan vokasi harus melibatkan masyarakat, yang bisa dilakukan dengan dialog, untuk memastikan agar sekolah dapat menjawab tuntutan masyarakat/komunitas. Dalam hal ini, sekolah dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama tentang

pentingnya pendidikan bagi pengembangan budaya dan ekonomi lokal. Penyediaan layanan pendidikan harus menjawab kebutuhan masyarakat dan mengatasi permasalahan sosial, budaya, realitas, dan kebutuhan berbahasa, bukan sekedar memberikan kurikulum dan pengajaran yang seragam.

Hal itu dapat dimulai pada tahap pembangunan karena jurusan SMK memang didasarkan pada kekuatan ekonomi di masyarakat. Misalnya, daerah yang berada di tepi pantai bisa membangun SMK kejuruan perikanan dan kelautan agar peserta didik setelah lulus kelak bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang perikanan atau kelautan. Oleh karena itu, karakteristik pertama dan paling penting dari pendekatan pendidikan vokasi adalah memulai proses perencanaan dengan berdialog pada masyarakat tempat sekolah akan berlokasi dan memberikan pelayanan. Tahap ini sangat penting agar pendidikan vokasi sesuai dengan tuntutan dan responsif terhadap kebutuhan, keinginan, serta manfaat pengembangannya dirasakan oleh masyarakat setempat.

Sekolah juga menggabungkan prinsip-prinsip kontekstualisasi dan adaptasi kurikulum dan pembelajaran. Keduanya akan disesuaikan dengan konteks lokal: budaya, bahasa, agama, dan kebutuhan pembangunan, sebagai bagian dari proses “inovasi strategi pembelajaran” untuk menjadikan identitas budaya yang kuat dan menjamin relevansi pendidikan. Sekolah juga perlu memanfaatkan lembaga pelatihan guru dalam pengembangan guru.

BAB IV PETA JALAN REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI

4.1 Paradigma Baru Pendidikan Vokasi

Dalam monografinya yang berjudul *The Teachers of 2030: Creating a Student-Centered Profession for the 21st Century*, Barnet Berry menggambarkan perubahan yang dramatik peran pendidik dalam praksis pendidikan pada abad ini. Cara pandang bahwa misi pendidikan adalah menyiapkan peserta didik untuk memasuki profesi tertentu pada jenis peran sosial yang sudah terstruktur di masyarakat akan segera usang. Tugas pendidikan akan berbalik menjadi lebih utama memenuhi kebutuhan pengembangan diri peserta didik dalam menciptakan profesinya (Berry, 2013). Selain tuntutan generasional, perubahan peran pendidikan juga disebabkan oleh munculnya realitas baru tentang berubahnya ekologi belajar, mulusnya koneksi keluar-masuk dalam dunia sibernetik, dan makin meluasnya *teacherpreneurism*. Realitas itu telah hadir di tengah kehidupan kita sekarang. Pandangan tentang tugas pendidikan ini benar-benar akan mengubah praksis pendidikan 180 derajat dari sebelumnya. Keberhasilan pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada abad ini akan ditentukan oleh inovasi dalam mengelola pembelajarannya seiring dengan munculnya realitas baru itu. Perubahan cara pandang tentang pendidikan dan peran pendidik ini tidak lepas dari perubahan generasional yang sangat fenomenal pada awal abad ini. Implikasinya adalah, sudah barang tentu, praksis pendidikan kita perlu inovasi dan dinamika evolusi, sebagai kata lain dari revitalisasi pendidikan.

Perubahan orientasi pendidikan dari kompetensi ke kapabilitas telah menjadi kesadaran umum di dunia pendidikan vokasi sejak dasawarsa yang lalu (Staron, 2006). Seperti dikatakan juga oleh Stephenson & Weil (1992), salah satu model yang menantang konsep pembelajaran tradisional berorientasi kompetensi adalah model pembelajaran berorientasi kapabilitas. Orang yang

kapabel adalah mereka yang tahu bagaimana belajar, kreatif, memiliki tingkat *self-efficacy* yang tinggi, dapat menerapkan kompetensi dalam situasi baru (*novel*) serta situasi yang familier, dan bekerja sama yang baik dengan orang lain. Dibandingkan dengan kompetensi, yang melibatkan akuisisi pengetahuan dan keterampilan, kapabilitas adalah atribut holistik. Orang yang kapabel lebih mungkin dapat menangani persoalan secara efektif dalam lingkungan yang bergolak karena mereka memiliki kapasitas “serba bisa”.

Perluasan dari model kompetensi ke model pengembangan kapabilitas ini merupakan perubahan mendasar orientasi dan fokus pendidikan vokasi dalam dasawarsa kedua Abad XXI ini, yakni apa yang kita kenal dengan pergeseran dari paradigma “pengajaran” ke paradigma “belajar”, atau dari orientasi “*job*” diperluas ke orientasi “kehidupan”, yang memberi peluang tumbuhnya kemandirian. Pendekatan pendidikan vokasi yang lekat dengan *expert-centered learning* dan *work-based learning*, di Abad XXI bergerak atau memperluas orientasi belajarnya dari *expert-centered learning* ke *life-based learning* (Staron, 2006). Model pendidikannya mengalami perluasan dari model pelatihan (*training model*) dan model pengembangan profesional (*professional development model*) ke model pengembangan kapabilitas (*capability development model*).

4.2 Pengembangan Kelembagaan

Kurangnya sarana dan prasarana atau fasilitas yang dimiliki pendidikan vokasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah pada setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut diantaranya mencakup:

- a. unit sekolah baru, dan
- b. ruang kelas baru.

Unit sekolah baru yang dibangun berdasarkan kebutuhan daerah dan potensi daerah dalam Dunia Usaha Dunia Industri. Ruang kelas baru dibangun juga untuk menambah partisipasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan. Berikut target unit sekolah baru dan ruang kelas baru dari SMK dan SMALB dalam meningkatkan akses pendidikan (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Rencana Pengembangan SMK dan SMALB
(Direktorat SMK dan PKLK, 2015)

	2015	2016	2017	2018	2019
SMK:					
Unit Sekolah Baru	35 unit	126 unit	126 unit	126 unit	126 unit
Ruang Kelas Baru	3.100 kelas	6.450 kelas	5.373 kelas	3.749 kelas	3.065 kelas
SMALB:					
Unit Sekolah Baru	-	-	-	-	7 unit
Ruang Kelas Baru	-	-	-	-	68 kelas

Rencana pembangunan unit sekolah baru dan ruang kelas baru ini akan berfokus pada 4 jurusan prioritas, yaitu Kemaritiman, Pertanian, Pariwisata dan Industri Kreatif. Terbatasnya alokasi anggaran pemerintah, pemenuhan sarana dan prasarana lembaga belum sepenuhnya terselesaikan sesuai perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa alternatif strategi pemenuhan sarana-prasarana, yaitu diantaranya sebagai berikut.

- Pelibatan Dunia Usaha dan Industri sebagai wadah untuk mempengaruhi pengalaman belajar peserta didik. Hal ini dimaksudkan untuk mengonsolidasikan pengalaman penggunaan fasilitas yang telah bersifat simulatif di lembaga pendidikan, melaksanakan aktivitas riil di lapangan kerja dengan segala kompleksitas kehidupan, berbagi tanggungjawab dalam pelaksanaan pencapaian kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Pemanfaatan fasilitas yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan sebagai bentuk kontribusi DUDI terhadap pendidikan vokasi.
- Pemberdayaan sarana dan prasarana dimaksudkan untuk mengupayakan secara mandiri dari kekurangan atau kebutuhan fasilitas, termasuk upaya menghambat kerusakan sarana dan prasarana melalui program *production based training*, unit produksi & jasa dan *Teaching Factory*.
- Pelibatan masyarakat, terutama orang tua peserta didik, sangat dibutuhkan dalam memecahkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah.

Pelibatan pemerintah, baik pusat maupun daerah, merupakan suatu kewajiban sebagai sumber pendukung utama dalam mengatur keberlangsungan SMK, baik proses maupun investasi seperti pengaturan melalui perundang-undangan/ peraturan-peraturan/ kebijakan-kebijakan, pendanaan dan atau pengadaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan, perancangan dan pengembangan kerangka program, penetapan standar pelaksanaan, dan sebagainya.

4.3 Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri

Pendekatan pendidikan vokasi saat ini masih terlihat bersifat *supply-driven*, seolah-olah terlihat masih dilakukan secara sepihak penyelenggara pendidikan vokasi. Hal tersebut disebabkan masih kakunya perubahan penjurusan kejuruan sehingga kurikulum tidak mampu mengikuti perkembangan industri yang sangat pesat. Akibatnya, industri mengeluhkan lulusan pendidikan vokasi tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

Sejatinya pendidikan vokasi menekankan pada pendidikan yang mampu menyesuaikan dengan (1) permintaan pasar (*demand driven*); (2) kebersambungan (*link*) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara pendidikan vokasi; dan (3) kecocokan (*match*) antara karyawan (*employee*) dengan pengusaha (*employer*). Penyelenggaraan dan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilihat dari tingkat mutu dan relevansi, yaitu jumlah penyerapan lulusan dan kesesuaian bidang pekerjaan dengan bidang keahlian.

Oleh karena itu, reorientasi jurusan kejuruan bersifat permintaan pasar (*demand driven*) menjadi hal yang penting dilakukan. Penjurusan kejuruan harus bersifat fleksibel berdasarkan pada permintaan dan perkembangan dunia kerja. Pihak dunia kerja diharapkan bersama-sama dengan dunia pendidikan berperan aktif dalam menentukan, mendorong, dan menggerakkan penyelenggaraan pendidikan vokasi mulai dari perencanaan dan pelaksanaan.

Perencanaan pendidikan vokasi yang bersifat permintaan pasar (*demand driven*) diawali dengan keterlibatan dunia kerja dalam menentukan program dan bidang keahlian apa yang diperlukan dan dimana lembaga pendidikan akan didirikan, termasuk dalam penyusunan kurikulumnya (kurikulum berbasis kompetensi). Dunia kerja menentukan standar kompetensi yang harus dicapai oleh setiap lulusan pendidikan vokasi karena mereka yang lebih mengetahui kompetensi yang dibutuhkan. Dunia kerja juga berperan dalam pelaksanaan

pendidikan vokasi termasuk dalam evaluasi dan pengujian sertifikasi agar hasil pendidikan terjamin kesesuaiannya dengan kompetensi dunia kerja.

Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pendidikan vokasi yang bersifat permintaan pasar (*demand driven*) diperlukan kerjasama permanen antara Pemerintah dan industri. Kerjasama ini dapat mencakup (1) penyusunan dan perancangan kerangka pendidikan vokasi; (2) pembiayaan; (3) pengembangan kurikulum dan implementasinya, dan (4) bersama-sama melaksanakan *assessment* proses dan lulusan pendidikan vokasi itu. Demikian juga dilakukan sebuah kesepakatan tentang sertifikasi kompetensi yang mencerminkan harapan kualitas lulusan dengan tuntutan kompetensi sesuai standar yang berlaku di industri.

Untuk meningkatkan mutu proses dan kompetensi hasil pembelajaran pendidikan vokasi, kerjasama dan sinergi dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta/industri sangatlah penting, baik di tingkat regional maupun internasional. Untuk tujuan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan kerjasama dan sinergi dengan Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja/BNP2TKI dalam memfasilitasi dan penguatan kursus dan pelatihan. Dengan pihak swasta/dunia usaha dunia industri (DUDI), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan kerjasama dengan KADIN, APINDO, dan berbagai asosiasi profesi.

Kerjasama tingkat internasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, juga telah dilaksanakan dengan berbagai lembaga pendidikan di Korea Selatan. Disamping kerjasama pada tingkat birokrasi, di lapangan juga sudah banyak terjadi kerjasama/sinergi antarlembaga kursus dan pelatihan dengan SMK, serta DUDI untuk menyediakan sumber daya, baik dalam proses pembelajaran, praktek maupun permagangan.

Skema kerjasama yang selama ini terjadi masih bersifat “inisiatif lembaga” belum tersistem dengan baik. Oleh karena itu, dalam rangka revitalisasi pendidikan vokasikerjasama dan sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L), pendidikan dan pelatihan, asosiasi profesi dan dengan dunia usaha dunia industri (DUDI), perlu diatur dengan kebijakan atau peraturan-perundangan yang memadai, untuk menjamin kepastian hukum dan insentif-insentif yang dapat diperoleh oleh pihak swasta atau DUDI.

Sudah banyak lembaga pendidikan vokasi yang memanfaatkan dunia kerja dan industri sebagai tempat praktik maupun sekadar difungsikan sebagai penambah wawasan tentang dunia kerja kepada peserta didiknya. Berikut ini beberapa fungsi dari fasilitas industri bagi pendidikan vokasi yang selama ini ada dalam praktik.

(a) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Praktik Peserta Didik

Banyak satuan pendidikan vokasi yang tidak memiliki peralatan dan mesin yang memadai untuk melaksanakan praktik agar lulusan mencapai standar kompetensi yang disyaratkan. Akibatnya, industri harus mengadakan pelatihan tambahan untuk menyiapkan tenaga kerjanya. Dengan demikian, pihak industri harus mengalokasikan biaya ekstra di luar biaya produksi. Disparitas yang sangat terlihat jelas antara kemampuan yang diharapkan dunia kerja dan lulusan yang dihasilkan satuan pendidikan vokasi menjadi pusat perhatian bersama antara sekolah dan industri. Sebenarnya pihak sekolah dan pihak industri memiliki keterbatasan masing-masing dalam membentuk dan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai. Pihak sekolah memiliki keterbatasan dalam pembiayaan dan penyediaan fasilitas pendukung praktikum, sedangkan industri memiliki keterbatasan sumber daya pendidikan untuk membentuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu, keterlibatan industri sebagai tempat praktik peserta didik menjadi salah satu solusi untuk mengurangi disparitas yang terjadi sehingga mampu menciptakan kemampuan kerja para lulusan pendidikan vokasi yang adaptif dengan dunia kerja.

Kegiatan praktik di industri ketika para peserta didik masih berada di bangku sekolah, yang dikenal dengan istilah praktik kerja industri (prakerin), memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan kompetensi yang tidak didapatkan di sekolah dan memberikan pengetahuan terhadap perkembangan (*state of the art*) industri yang terjadi. Walaupun peserta didik memperoleh peningkatan kompetensi di industri melalui prakerin, tidak ada keharusan bagi industri penyelenggara prakerin untuk mempekerjakan peserta didik yang praktik kerja di situ setelah mereka lulus. Peserta didik bebas mencari pekerjaan di tempat lain dan bebas juga untuk membuka pekerjaan sendiri. Selain itu, konsep "kebutuhan" (*demand*) yang dimaksud tidak hanya meliputi kebutuhan dari dunia usaha dan industri yang ada saat ini, tetapi kebutuhan dari sistem ekonomi secara keseluruhan, termasuk yang pemenuhannya akan diberikan melalui pembentukan wirausahawan tangguh lulusan sekolah menengah.

(b) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Magang Kerja

Sistem magang (*apprenticeship*) merupakan sistem pendidikan vokasi yang paling tua dalam sejarah pendidikan vokasi. Sistem magang merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui pendidikan massal di sekolah. Dalam sistem magang seseorang yang belum ahli (*novices*) belajar dengan orang yang telah ahli (*expert*) dalam bidang kejuruan tertentu. Sistem magang kerja di industri memberikan pengalaman langsung bagi para peserta didik mengenai kegiatan bekerja langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya, dengan tujuan untuk menguasai kompetensi yang sesuai dengan industri, serta memahami budaya kerja, sikap profesional yang diperlukan, budaya mutu, dan pelayanan konsumen.

Industri sebagai tempat magang kerja tidak hanya memberikan manfaat bagi para peserta didik, tetapi industri juga merasakan kontribusi para peserta didik selama pelaksanaan magang serta industri bisa membentuk para peserta didik untuk menjadi seorang tenaga terampil yang siap bekerja. Tentunya hal ini akan menguntungkan bagi industri untuk memperoleh tenaga kerja yang sudah terlatih sehingga tidak perlu lagi mengadakan pelatihan dalam menyiapkan tenaga kerja yang mereka butuhkan. Mengingat industri sebagai tempat peserta didik untuk magang daya tampungnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang memerlukan tempat magang, maka dikembangkanlah *teaching factory*. *Teaching factory*, yang dibahas secara terinci pada bagian-bagian di belakang, merupakan pabrik atau tempat berproduksi yang sekaligus sebagai tempat peserta didik pendidikan vokasi melaksanakan praktik peningkatan keterampilan.

(c) Dunia Usaha dan Industri sebagai Tempat Belajar Manajemen Dunia Kerja

Selain sebagai tempat magang untuk memahami proses dan budaya kerja, industri juga dimanfaatkan sebagai tempat pembelajaran tentang manajemen dan organisasi produksi. Peserta didik pendidikan vokasi kadang-kadang melakukan pengamatan cara kerja mesin dan produk yang secara tidak langsung belajar tentang mutu dan efisiensi produk. Selain itu, peserta didik juga belajar tentang manajemen dan organisasi industri untuk belajar tentang dunia usaha dan cara pengelolaan usaha sehingga mereka memiliki wawasan dan pengetahuan tentang dunia usaha. Melalui belajar manajemen

dan organisasi ini peserta didik juga bisa menambah kapabilitas pada dunia wirausaha. Peserta didik pendidikan vokasi kadang-kadang menggunakan industri sebagai objek wisata-belajar dengan sekedar mengamati dan melihat-lihat dari kejauhan proses produksi di industri. Mereka juga kadang-kadang mendapatkan informasi dari pengelola industri tentang organisasi dan para pengelolanya.

Pengalaman dari dunia industri ini bisa bermanfaat bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan profesional peserta didik. Diharapkan setelah lulus nanti, peserta didik bisa mengembangkan bakat dan potensinya, tidak hanya bergantung pada dunia kerja, tetapi juga mengembangkan potensi diri dalam mengembangkan potensi wilayah secara mandiri.

4.4 Penyelarasan Kurikulum

Saat ini pemerintah telah melakukan penyelarasan secara periodik dan melibatkan penggunaan lulusan. Penyelarasan adalah mempertemukan antara sisi pasokan (*supply*) dan sisi permintaan (*demand*) yang mencakup beberapa dimensi, yaitu kualitas, kompetensi, kuantitas, lokasi dan waktu. Penyelarasan juga mencakup pengembangan SMK 4 tahun yang memiliki nama kompetensi dan SKL yang berbeda dengan SMK 3 tahun. Gambar 4.1 menunjukkan penyelarasan bidang, program, dan kompetensi keahlian di SMK.

No.	Bidang Keahlian SMK 2008-2013	Bidang Keahlian 2016	PK	KK	SK
1.	Teknologi dan Rekayasa	Teknologi dan Rekayasa	13	58	419
2.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Energi dan Pertambangan	3	6	42
3.	Kesehatan	TIK	2	6	44
4.	Agribisnis dan Agroteknologi	Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	5	7	49
5.	Perikanan dan Kelautan	Agribisnis dan Agroteknologi	6	20	215
6.	Bisnis dan Manajemen	Kemaritiman	4	10	74
7.	Pariwisata	Bisnis dan Manajemen	3	5	60
8.	Seni Rupa dan Kriya	Pariwisata	4	8	96
9.	Seni Pertunjukan	Seni dan Industri Kreatif	8	22	162
	Jumlah		48	142	1161

Keterangan :

PK: Program Keahlian KK: Kompetensi Keahlian SK: Sertifikat Keahlian

Gambar 4.1 Penyelarasan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian SMK

Selain reorientasi program keahlian kejuruan di SMK agar lebih memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, ada beberapa strategi untuk memastikan agar kurikulum bisa lebih selaras sehingga peserta didik bisa mengembangkan kompetensinya, yaitu *dual system*.

Dual system pada pendidikan vokasi merupakan suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematis dan sinkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja, terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Pada hakikatnya *dual system* merupakan suatu strategi yang mendekatkan peserta didik ke dunia kerja dan ini adalah strategi proaktif yang menuntut perubahan sikap dan pola pikir serta fungsi pelaku pendidikan di tingkat SMK, masyarakat, dan dunia usaha/industri dalam menyikapi perubahan dinamika tersebut.

Bila pada pendidikan umum, program pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sepihak dan lebih bertumpu kepada kepemimpinan kepala sekolah dan guru, maka pada program *dual system* pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama secara terpadu antara sekolah dan institusi pasangannya. Oleh karena itu, fungsi operasional di lapangan dilaksanakan bersama antara kepala sekolah, guru, instruktur, dan manager terkait. Untuk itu, perlu diciptakan adanya keterpaduan peran dan fungsi guru serta instruktur sebagai pelaku pendidikan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PSG di lapangan secara kondusif.

Tujuan utama *dual system* adalah untuk menjamin keberlanjutan keterserapan tenaga kerja pada pasar kerja sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Secara umum struktur *dual system* meliputi beberapa aspek, berikut.

(a) Kurikulum

Kurikulum harus dirancang dengan berorientasi pada penggabungan antara *instruction* dan *construction* sehingga pendekatan utama dalam membentuk tahapan pembelajaran yang mengacu pada fase pembelajaran di sekolah ataupun praktik di industri dan berorientasi pada hasil proses pembelajaran yang diinginkan. Selain itu, perlu mempertimbangkan orientasi kompetensi pada berbagai level sejalan dengan pendesainan proses pembelajaran. Gambar 4.2 menunjukkan hasil penyesuaian kurikulum SMK.

Mata Pelajaran	Program 3 Tahun			Program 4 Tahun			
	Kelas			Kelas			
	X	XI	XII	X	XI	XII	XIII
Kelompok Wajib							
1. Pendidikan Agama	3	3	(2)*	3	3	(2)*	(2)*
2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	(2)*	3	3	(2)*	
3. Bahasa Indonesia	4	3	3	4	3	3	
4. Matematika	4	3	3	4	3	3	
5. Sejarah Indonesia	3	-	-	3	-	-	
6. Bahasa Inggris	3	3	4	3	3	4	(3)*
7. Seni Budaya	3	(2)*	(2)*	3	(2)*	(2)*	
8. Kewirausahaan	-	3	(3)*	-	3	(3)*	(3)*
9. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	(2)*	3	3	(2)*	
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok Wajib	26	21	10	26	21	10	
Kelompok Peminatan							
Peminatan Akademik dan Kejuruan SMK	22	27	38	22	27	38	48

*) Dilaksanakan sebagai Ekstrakurikuler yang wajib diikuti

Gambar 4.2 Penyelarasan Kurikulum SMK

Kurikulum yang dirancang menempatkan teknologi atau subjek kejuruan sebagai disiplin utama ke dalam fokus pembelajaran teori. Oleh karena itu, semua mata pelajaran dirancang untuk mendukung pembelajaran kejuruan utama. Isi dan tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari bidang kejuruan yang sesuai harus dipilih untuk pengembangan/perluasan semaksimal mungkin. Seluruh tujuan pendidikan vokasi berorientasi pada aktivitas dan kekhususan bidang kejuruan, baik dalam hal isi maupun pelaksanaannya. Oleh karena itu, saat ini pemerintah melakukan penyelarasan Kurikulum SMK yang mencakup pengembangan SMK 4 tahun yang memiliki nama kompetensi dan SKL yang berbeda dengan SMK 3 tahun.

Dalam pengembangan program pembelajaran dan penyelarasan kurikulum kursus dan pelatihan telah disusun Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sebanyak 53 SKL program kursus dan pelatihan yang sudah diharmonisasi dan diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri (DUDI). SKL tersebut merupakan acuan dasar dalam pengembangan kurikulum dan pelaksanaan program serta evaluasi hasil pembelajaran pada Lembaga Kursus dan Pelatihan. Jenis-jenis program pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus dan Pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan industri (DUDI). Berikut ini daftar SKL pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Daftar Tabel SKL dan Kurikulum Program Kursus dan Pelatihan
(Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016)

NO.	NAMA SKL	JENJANG KKNI	PENETAPAN Permendikbud Nomor & Tahun	KURIKULUM	
				JML. JAM PELAJARAN	JUMLAH MODUL
1	Senam	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	84	4
		Jenjang III		148	9
		Jenjang IV		*)	*)
2	Sinshe	Jenjang III	No. 131 Th. 2014	400	18
3	<i>Master of Ceremony</i>	Jenjang III	No. 131 Th. 2014	50	12
		Jenjang IV		60	*)
4	Piano Pop dan Jazz	Jenjang III	No. 131 Th. 2014	126-180	*)
5	Mengemudi Kendaraan Bermotor	Jenjang II, Pengemudi Angkutan Umum	No. 131 Th. 2014	*)	*)
		Jenjang II, Pengemudi Kendaraan Pribadi		183	*)
		Jenjang II, Pengemudi Pemula		60	8
6	Hantaran	Jenjang I	No. 131 Th. 2014	54	*)
		Jenjang II		72	*)
		Jenjang III		75	*)
7	Video Editing	Jenjang III	No. 131 Th. 2014	118	9
8	Penyiar Televisi	Jenjang III	No. 131 Th. 2014	100	10
9	Mekanik Sepeda Motor	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	183	*)
		Jenjang III		180	8
		Jenjang IV		80	13
10	Tata Busana	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	88	9
		Jenjang III		184	11
11	Bordir	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	300	7
		Jenjang III		300	9
	Sulam	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	300	8
		Jenjang III		300	9
12	Bunga Kering dan Bunga Buatan	Jenjang I	No. 131 Th. 2014	57	6
		Jenjang II		*)	6
		Jenjang III		*)	*)
		Jenjang IV		*)	*)
13	Baby Sitter	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	200	5
		Jenjang III		260	5
14	Seni Merangkai Bunga dan Desain Floral	Jenjang I	No. 131 Th. 2014	360	12
		Jenjang II		*)	*)
		Jenjang III		*)	*)
15	Teknisi Akuntansi	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	80	5
		Jenjang III		34	4
		Jenjang IV		110	8
		Jenjang V		74	4

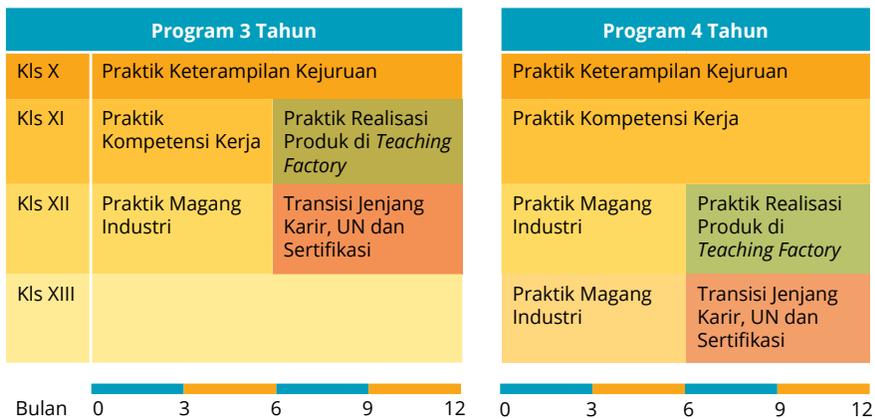
NO.	NAMA SKL	JENJANG KKNI	PENETAPAN Permendikbud Nomor & Tahun	KURIKULUM	
				JML. JAM PELAJARAN	JUMLAH MODUL
16	Sekretaris	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	220	8
17	Pijat Refleksi	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	100	4
		Jenjang III		100	9
		Jenjang IV		300	16
		Jenjang III, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		40	5
18	Perpajakan	Jenjang III, Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan	No. 131 Th. 2014	40	5
		Jenjang IV, Pajak Penghasilan Orang Pribadi		60	7
		Jenjang IV, Pajak Penghasilan Pasal 21		60	6
		Jenjang IV, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah		60	6
		Jenjang V, Kepabeanan dan Cukai		80	5
		Jenjang V, Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri Sektor Jasa dan Perdagangan		80	6
		Jenjang V, Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri Sektor Manufaktur		80	6
		Jenjang V, Pajak Penghasilan Pasal 26		80	8
19	Bahasa Jepang	Jenjang III	No. 131 Th. 2014	*)	*)
20	Kamerawan TV	Jenjang III	No. 131 Th. 2014	118	7
21	Perhotelan, Housekeeping	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	300	*)
22	Jasa Usaha Makanan	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	*)	7
		Jenjang III		*)	*)
		Jenjang IV		*)	*)
		Jenjang V		*)	*)
23	Tata Kecantikan Kulit	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	250	10
		Jenjang III		350	11
		Jenjang IV		500	12

NO.	NAMA SKL	JENJANG KKNI	PENETAPAN Permendikbud Nomor & Tahun	KURIKULUM	
				JML. JAM PELAJARAN	JUMLAH MODUL
24	Tata Kecantikan Rambut	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	130	10
		Jenjang III		231	13
		Jenjang IV		305	14
25	Tata Rias Pengantin	Jenjang I	No. 131 Th. 2014	*)	*)
		Jenjang II		*)	*)
26	Spa	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	240	9
		Jenjang III		240	9
		Jenjang IV		240	*)
27	Ekspor Impor	Jenjang II	No. 131 Th. 2014	220	*)
		Jenjang III		200	9
		Jenjang IV		200	10
		Jenjang V		200	*)
28	Akupunktur	Jenjang VI	Sudah divalidasi BSNP	*)	*)
29	Animasi	Jenjang II	No. 5 Th. 2016	32	3
		Jenjang III		52	4
		Jenjang IV		72	6
30	Elektronika Dasar	Jenjang III	No. 5 Th. 2016	150	17
31	Desain Grafis	Jenjang II	No. 5 Th. 2016	42	6
		Jenjang III		100	13
32	Fotografi	Jenjang III	No. 5 Th. 2016	150	6
		Jenjang V		400	11
33	Pastry & Bakery	Jenjang III, Kue Indonesia dan Oriental	No. 5 Th. 2016	92	8
		Jenjang III, Kue Kue Kontinental		92	8
		Jenjang III, Roty / Bakery		92	8
		Jenjang III, Dekorasi Kue dan Coklat		92	8
34	Pekarya Kesehatan	Jenjang II	No. 5 Th. 2016	420	14
35	Jaringan Komputer dan Sistem Administrasi	Jenjang III	No. 5 Th. 2016	250	8
36	Teknisi Komputer	Jenjang III	No. 5 Th. 2016	200	10
37	Teknik Kendaraan Ringan	Jenjang II	No. 5 Th. 2016	160	9
		Jenjang III		107	8
		Jenjang IV		64	13
38	Las	Jenjang I	No. 5 Th. 2016	250	10
		Jenjang II		350	11
		Jenjang III		500	12

NO.	NAMA SKL	JENJANG KKNI	PENETAPAN Permendikbud Nomor & Tahun	KURIKULUM	
				JML. JAM PELAJARAN	JUMLAH MODUL
39	Membatik	Jenjang II, Pematikan dengan Pewarnaan Sintetik	Sudah divalidasi BSNP	*)	*)
		Jenjang III, Pematikan dengan Pewarnaan Alami		*)	*)
		Jenjang III, Pembuatan Malam Batik		*)	*)
		Jenjang IV, Pembuatan Alat Canting Tulis		*)	*)
		Jenjang V, Pembuatan Alat Canting Cap		*)	*)
		Jenjang VI, Desain Batik		*)	*)
40	Kepemanduan Wisata	Jenjang III	Dalam proses Penetapan	200	*)
41	Pertamanan	Jenjang I	Dalam proses Penetapan	200	*)
		Jenjang II		200	17
		Jenjang III		200	*)
42	Pertukangan Kayu	Jenjang II	Dalam proses Penetapan	140	*)
43	Pemasangan Bata	Jenjang II	Dalam proses Penetapan	360	*)
		Jenjang III	Dalam proses Penetapan	520	*)
44	Perancah (<i>Scaffolding</i>)	Jenjang II	Dalam proses Penetapan	*)	*)
		Jenjang III	Dalam proses Penetapan	*)	*)
45	Perpipaan (<i>Plumbing</i>)	Jenjang II	Dalam proses Penetapan	*)	*)
46	Mekanik Alat Berat	Jenjang III	Dalam proses Penetapan	218	18
47	<i>Care Giver</i>	Jenjang III	Dalam proses Penetapan	500	*)
48	<i>Web Design</i>	Jenjang IV	Sudah divalidasi BSNP	*)	*)
	<i>Web Programming</i>	Jenjang IV		96	12
49	<i>Mobile Application Programming</i>	Jenjang IV	Sudah divalidasi BSNP	40	*)
		Jenjang V		132	*)
50	Bahasa Indonesia Penutur Asing (BIPA)	Jenjang I - VII	Sudah divalidasi BSNP	*)	*)
51	Instruktur Tari Modern Indonesia	Jenjang VI	Sudah divalidasi BSNP	*)	*)
52	Komputer Aplikasi Perkantoran	Jenjang III	Sudah divalidasi BSNP	*)	*)
53	Teknisi AC	Jenjang III	Sudah divalidasi BSNP	*)	*)
*) belum ditentukan					

(b) Praktik Kerja

Perancangan program praktik tidak terlepas dari implementasi silabus ke dalam pembelajaran, yang membutuhkan metode, strategi, dan evaluasi pelaksanaan yang sesuai. Kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik, melalui latihan dan praktik di sekolah perlu diimplementasikan secara nyata sehingga tumbuh kesadaran bahwa apa yang sudah dimilikinya berguna bagi dirinya dan orang lain. Dengan begitu, peserta didik akan lebih percaya diri karena orang lain dapat memahami apa yang dipahaminya dan pengetahuannya diterima oleh dunia kerja/industri. Oleh karena itu, pelaksanaan praktik di SMK secara umum menggunakan sistem blok pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri. Secara umum pelaksanaan praktik di SMK untuk SMK 3 tahun dan SMK 4 tahun dijelaskan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Pelaksanaan Praktik Dual System di SMK

Pengorganisasian praktik di SMK adalah sebagai berikut:

- A. *Tahun Pertama* adalah Praktik Keterampilan Kejuruan yang merupakan bagian dari rencana pembelajaran tingkat dasar yang dilaksanakan di Ruang Praktik Sekolah.
- B. *Tahun Kedua* adalah Praktik Kompetensi Kerja untuk 6 bulan pertama dan Praktik Realisasi Produk di *Teaching Factory* dasar yang dilaksanakan di Ruang Praktik Sekolah. Tahapan ini merupakan tahap spesialisasi pertama, tetapi spesialisasi ini masih bersifat luas. Spesialisasi ini berorientasi pada kemampuan khusus yang esensial pada suatu ruang lingkup kelompok kejuruan kecil. Adapun pada SMK 4 tahun tahun kedua difokuskan pada Pratik Kompetensi Kerja.

- C. *Tahun Ketiga* adalah Praktik Magang Industri pada 6 bulan pertama dan diikuti dengan Transisi Jenjang Karier, Pelaksanaan UN, dan Sertifikasi. Praktik Magang Industri dilakukan di Industri/Dunia Kerja difokuskan pada spesialisasi keterampilan khusus dari suatu bidang kerja dan yang secara khusus diperlukan oleh tempat kerja. Adapun untuk SMK 4 tahun dilakukan Praktik Magang Industri Tahap ke-1 pada 6 bulan pertama, kemudian dilanjutkan dengan Praktik Realisasi Produk di *Teaching Factory* dasar yang dilaksanakan di Ruang Praktik Sekolah
- D. *Tahun Keempat* adalah Praktik Magang Industri Tahap ke-2 pada 6 bulan pertama dan diikuti dengan Transisi Jenjang Karier, Pelaksanaan UN, dan Sertifikasi diklat difokuskan pada spesialisasi keterampilan khusus dari suatu bidang kerja dan yang secara khusus diperlukan oleh tempat kerja.

(c) *Teaching factory*

Perkembangan dunia industri telah memasuki era baru, yaitu para pekerja mulai dari tingkat teknisi sampai dengan tingkat pimpinan akan terus membutuhkan suatu skema belajar seumur hidup untuk bersaing dengan kemajuan pesat dalam produksi terkait teknologi, peralatan canggih dan teknik. Mengingat pentingnya industri sebagai kegiatan yang menghasilkan kekayaan bagi bangsa mana pun, maka promosi keunggulan industri akan selalu menjadi target strategis dalam tahun-tahun mendatang.

Hubungan antara dunia industri dan pendidikan vokasi sangat erat karena pendidikan vokasi menjadi penggerak utama berkembangnya kemajuan industri. Selain itu, masyarakat selalu menghargai keterampilan kejuruan. Beberapa penelitian telah mengungkapkan hubungan antara kualitas pendidikan vokasi dan pertumbuhan ekonomi, menyoroti fakta bahwa modal manusia adalah kunci untuk pertumbuhan. Namun, seringkali pendidikan vokasi tidak secara terus-menerus mengikuti kemajuan teknologi. Akibatnya, pendidikan vokasi saat ini masih dirasa kurang memberikan kompetensi kejuruan bagi suplai tenaga kerja yang akan terjun ke dalam industri. Oleh karena itu, berbagai konsep modern skema pelatihan, belajar di industri, dan transfer pengetahuan antara industri dan dunia pendidikan mulai dikembangkan dengan tujuan agar modernisasi pendidikan dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja inovasi industri.

Pada beberapa dekade belakangan ini, konsep *Teaching Factory* telah menjadi daya tarik utama di berbagai negara, salah satunya Amerika. *Teaching Factory* adalah sebuah proyek industri yang bertujuan untuk memberikan

pengalaman nyata dalam desain, manufaktur, dan realisasi produk. *Teaching Factory* mengembangkan kurikulum yang memiliki keseimbangan antara pengetahuan, teori dan analisis dengan manufaktur, perancangan, kegiatan bisnis, dan keterampilan yang profesional untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidangnya.

Banyak institusi pendidikan berusaha untuk membawa praktik pendidikan dekat dengan industri. Oleh karena itu, *Teaching Factory* telah menjadi suatu pendekatan baru untuk pendidikan vokasi dengan tujuan (1) memodernisasi proses pembelajaran dengan membawa kepada praktik industri secara dekat; (2) mengungkit pengetahuan industri melalui pengetahuan baru; (3) mendukung transisi dari manual menuju cara bekerja otomatis dan mengurangi kesenjangan antara sumber daya industri (pekerja dan modal) dan pengetahuan industri (informasi); dan (4) meningkatkan dan menjaga pertumbuhan kekayaan industri; serta (5) pada akhirnya mendorong pengembangan kapabilitas lulusan.

Konsepsi dasar *Teaching Factory* adalah "*Factory to Classroom*" yang bertujuan untuk melakukan transfer lingkungan produksi di industri secara nyata ke dalam ruang praktik. Kehidupan produksi yang nyata sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran yang berbasis kehidupan nyata dari praktik industri pada setiap harinya. Di Indonesia, penerapan konsep *Teaching Factory* telah diperkenalkan di SMK pada tahun 2000 dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu berupa pengembangan unit produksi yang sudah dilaksanakan di SMK-SMK. Kemudian konsep tersebut berkembang pada tahun 2005 menjadi sebuah model pengembangan SMK berbasis industri. Setidaknya terdapat tiga bentuk dasar kategori pengembangan SMK berbasis industri, yaitu: (1) pengembangan SMK berbasis industri sederhana; (2) pengembangan SMK berbasis industri yang berkembang, dan; 3) pengembangan SMK berbasis industri yang berkembang dalam bentuk *factory* sebagai tempat belajar. Selanjutnya, pada awal tahun 2011 pengembangan SMK dengan model yang ketiga, yaitu pengembangan SMK berbasis industri yang berkembang dalam bentuk *factory* sebagai tempat belajar sehingga dikenal dengan *Teaching Factory*. *Factory* di sini hanyalah istilah dan bukan berarti pabrik secara *hardware*. Namun, bentuknya berupa pembelajaran yang dilakukan langsung di tempat praktik, tidak di dalam kelas, dan praktik yang dilakukan berorientasi pada produksi seperti di industri nyata. Penyelenggaraan model ini memadukan sepenuhnya antara belajar dan bekerja, tidak lagi memisahkan antara tempat penyampaian teori dan praktik.

Pada tahun 2011, Direktorat Pembinaan SMK bekerja sama dengan pemerintah Jerman melalui program SED TVET mengembangkan konsep *Teaching Factory*. Awalnya konsep *Teaching Factory* mengadaptasi dari metode pembelajaran *Dual System* yang telah lama diterapkan dalam pendidikan TVET di negara Jerman dan Swiss. Metode pembelajaran ini merupakan metode yang mengintegrasikan dua lingkungan utama dalam setiap kegiatan peserta didik, yakni lingkungan sekolah dan lingkungan perusahaan (industri). Peserta didik tidak hanya melakukan kegiatan belajar di sekolah, tetapi juga melakukan praktik (kompetensi dasar) dan kerja (mengaplikasikan kompetensinya) di industri dalam jangka waktu yang relatif panjang. Secara fundamental, *Dual System* bertujuan untuk menempatkan peserta didik dalam situasi nyata di tempat kerja secara menyeluruh. Dengan praktik yang demikian, peserta didik tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis, tetapi juga mampu menerapkan praktik berbasis produksi sebagaimana yang selalu diterapkan dalam kegiatan industri. Hal ini membuat peserta didik mampu memperoleh keterampilan, proses dan sikap yang sesuai dengan standar industri sehingga hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan industri.

Konsep pembelajaran berbasis industri berarti bahwa setiap produk praktik yang dihasilkan adalah sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomi atau daya jual dan diterima oleh pasar. Sinergi antara sekolah dan industri merupakan elemen kunci sukses utama dalam *Teaching Factory*, karena *Teaching Factory* akan menjadi sarana penghubung untuk kerja sama antara sekolah dan industri. Interaksi sekolah-industri yang berkesinambungan akan mendorong terjadinya perbaikan secara terus-menerus dalam hal teknologi, kurikulum dan budaya industri sehingga akan berdampak terhadap lulusan yang kompeten dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh industri, yaitu sadar akan kualitas dan efisiensi sebagaimana yang selalu diterapkan dalam kegiatan industri.

Definisi *Teaching Factory* di SMK mulai digunakan secara luas dan lebih detail lagi pada jenjang Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi yang terdiri atas (1) pendidikan menengah kejuruan; (2) program diploma satu; (3) program diploma dua; (4) program diploma tiga; (5) program diploma empat; (6) program magister terapan; dan (7) program doktor terapan. Konsep *Teaching Factory* kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri sebagai "Pabrik dalam Sekolah (*Teaching Factory*)" adalah sarana produksi yang dioperasikan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya

untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri dan tidak berorientasi mencari keuntungan.

Penerapan konsep *Teaching Factory* membutuhkan sebuah kerangka yang sistematis agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan dan dunia industri. Kerangka tersebut bertujuan mengarahkan SMK pada tahapan-tahapan yang akan dilalui sesuai dengan struktur prosedur implementasi *Teaching Factory*. Kerangka ini merupakan sebuah strategi yang melibatkan hubungan antar-elemen dalam sistem pembelajaran di SMK yang pada dasarnya selalu mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku di Indonesia. Karena *Teaching Factory* merupakan sebuah metode pembelajaran, maka strategi implementasi yang dirancang adalah strategi yang berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran yang melibatkan seluruh elemen sekolah.

Ketersediaan kurikulum atau silabus membantu SMK dalam menyusun Rencana Program Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar. Namun, untuk menyusun RPP suatu program keahlian atau kompetensi keahlian, SMK setidaknya harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dari program keahlian tersebut dan sumber daya yang telah dimilikinya. Dalam salah satu metode pembelajaran yang telah diterapkan oleh beberapa institusi, proses identifikasi yang dilakukan untuk mengawali penyusunan RPP adalah penentuan *systemschedule*. Hal ini bertujuan agar penyusunan RPP tepat sasaran dan sistematis serta disesuaikan dengan konsep penerapan *Teaching Factory*.

Kerangka kelembagaan *Teaching Factory* adalah perangkat institusi yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan SDM di *Teaching Factory*. Kerangka kelembagaan disusun dengan tujuan, antara lain, sebagai berikut:

- menguatkan landasan hukum pembentukan dan kelembagaan *Teaching Factory* dan *Technopark*, melalui harmonisasi peraturan perundangan. Di samping itu, juga perlu mempertimbangkan harmonisasi peraturan pemerintah yang sudah ada, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri, yang mengamanatkan bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi harus dilengkapi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi, *Teaching Factory*, dan Tempat Uji Kompetensi;

- meningkatkan kualitas dan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku ataupun yang akan disusun;
- mendukung pembentukan lembaga yang membidangi *Teaching Factory* dan *Technopark* di daerah, khususnya di provinsi.

4.5 Sertifikasi Kompetensi Lulusan

Mutu lulusan pendidikan vokasi secara ideal ditentukan berdasarkan penguasaan atas suatu standar kompetensi kerja (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Berdasarkan standar kompetensi tersebut, dirumuskan suatu sistem pengujian dan sertifikasi. Namun, sampai dengan saat ini belum semua program keahlian telah tersedia SKKNI-nya dan beberapa SKKNI yang sudah ada belum direfleksikan dalam kurikulum. Saat ini sedang diadakan koordinasi tingkat kementerian/lembaga dalam membuat SKKNI bagi tiap program keahlian kejuruan yang ada.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk meminimalisasi kesenjangan kompetensi kerja lulusan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri, antara lain melalui penyusunan skema sertifikasi bagi lulusan pendidikan vokasi dengan melibatkan asosiasi profesi dan DUDI maupun dalam pelaksanaan uji kompetensi.

Lulusan yang memperoleh sertifikat adalah lulusan yang memenuhi persyaratan kecakapan kerja. Persyaratan tersebut dimulai dari (1) pembelajaran yang benar di sekolahnya, yaitu menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajar yang memiliki karakter, kompetensi, mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan kemampuan kewirausahaan; (2) tersedianya peralatan uji sesuai dengan standar kompetensi di sekolahnya; dan (3) asesor yang memiliki sertifikat. Sertifikasi Kecakapan Kerja tersebut diberikan oleh BNSP dan Asosiasi Profesi.

Seperti peserta didik di SMK, sertifikasi kecakapan kerja dilakukan karena pada umumnya lulusan SMK langsung terjun ke dunia kerja sebelum melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Oleh karena itu, lulusan SMK diwajibkan memiliki minimal satu kecakapan kerja bersertifikat. Sebagai contoh, lulusan SMK dengan kompetensi keahlian konstruksi gedung, sanitasi, dan perawatan wajib memiliki minimal 1 (satu) dari 7 (tujuh) kecakapan kerja bersertifikat, seperti pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Jenis Sertifikasi Kecakapan Kerja Konstruksi Gedung, Sanitasi, dan Perawatan
(Direktorat SMK, 2016)

Kompetensi Keahlian	Jenis Sertifikat Kecakapan Kerja
Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gambar Teknik 2. Mekanika Teknik 3. Dasar-dasar Konstruksi dan Teknik Pengukuran Tanah 4. Utilitas Bangunan, Sistem Kelistrikan, dan Proteksi Gedung 5. Sistem Suplay Air Bersih, Air Kotor, dan Sanitasi 6. Sistem HVAC 7. Estimasi Biaya Perawatan dan Sanitasi Gedung.

Dalam rangka membekali lulusan SMK dengan sertifikat kompetensi yang diakui dunia usaha/dunia industri sehingga lulusan SMK tersebut memiliki daya saing yang tinggi, maka sejak tahun 2015 Dit. Pembinaan SMK, Kemendikbud dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah melaksanakan kegiatan pengembangan SMK menjadi Lembaga Sertifikasi Pihak Pertama (LSP-P1). Adapun lingkup kegiatan pengembangan SMK menjadi LSP-P1 terdiri dari (i) fasilitasi persiapan dan pelatihan asesor kompetensi; (ii) penyiapan Tempat Uji Kompetensi (TUK); (iii) penyiapan materi uji kompetensi; serta (iv) pelatihan penyusunan dan penerapan dokumen mutu. Nantinya setiap calon lulusan SMK akan mengikuti uji kompetensi/sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan di LSP-P1 di sekolah masing-masing atau pada LSP-P1 SMK terdekat. Jika lulus uji kompetensi, peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya. Pembentukan LSP-P1 dilakukan dengan strategi sebagai berikut.

- Pendekatan area: jika di suatu wilayah terdapat beberapa SMK yang belum memiliki LSP-P1 maka akan dikembangkan satu LSP-P1 yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh semua SMK yang ada di wilayah tersebut;
- Pembentukan LSP-P1 difokuskan pada sekolah yang memiliki peserta didik >600: saat ini SMK yang memiliki peserta didik >600 ada sekitar 4.000 SMK, dengan jumlah total peserta didik sebesar 90% total dari jumlah peserta didik SMK seluruh Indonesia.

Jika kelak LSP-P1 sudah memenuhi kebutuhan maka Uji Kompetensi Keahlian (UKK) dapat digantikan dengan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh LSP-P1, dalam hal ini biaya sertifikasi akan disubsidi pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Direktorat SMK berencana membentuk 1,650 SMK yang akan berperan sebagai LSP-P1 sampai 2019.

Sampai dengan tahun 2015 pelaksanaan uji sertifikasi diprioritaskan pada 13 program keahlian (dengan 8 program keahlian diantaranya masuk dalam 12 sektor prioritas MEA), yaitu Kepariwisata, Tata Boga, Tata Kecantikan, Tata Busana, Keuangan, Administrasi, Teknik Mesin, Teknik Otomotif, Teknologi Tekstil, Teknik Kimia, Teknik Komputer dan Informatika, dan Teknik Telekomunikasi.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah memfasilitasi terbentuknya 35 Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang dibentuk oleh organisasi profesi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Setiap LSK menetapkan tempat uji kompetensi (TUK). Dalam menyiapkan tempat uji kompetensi, selain dibentuk di lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat untuk dijadikan TUK, juga dapat dibentuk di lembaga lain termasuk SMK. Sampai 2015, hanya terdapat 1.020 lembaga kursus dan pelatihan dan lembaga lain yang sudah ditetapkan menjadi TUK. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan terhadap lembaga kursus dan pelatihan lainnya agar dapat menjadi TUK dan apabila sudah terakreditasi dapat menyelenggarakan uji kompetensi sendiri.

Untuk penilaian uji kompetensi juga dibutuhkan penguji dan master penguji untuk melakukan penilaian kompetensi. Sayangnya, dari banyak lembaga kursus, di Indonesia hanya terdapat 1.460 penguji dan 102 master penguji. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik Lembaga Kursus dan Pelatihan belum merata, dan di banyak daerah frekuensinya sangat jarang. Oleh karena itu, peningkatan jumlah penguji dan master penguji juga menjadi prioritas Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Berikut perencanaan peningkatan TUK, penguji, dan master penguji oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Tabel 4.4).

Tabel 4.4 Rencana Peningkatan Sertifikasi Peserta Didik
(Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2016)

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Tempat Uji Kompetensi	50 TUK	160 TUK	100 TUK	500 TUK	600 TUK
Penguji dan Master Penguji	100 orang	100 orang	140 orang	700 orang	700 orang
Bantuan kepada peserta didik bersertifikat kompetensi	51.733 orang	65.040 orang	25.000 orang	25.000 orang	25.000 orang

4.6 Penambahan dan Perbaikan Sarana-Prasarana Pembelajaran

Dalam peningkatan mutu pendidikan vokasi, sarana prasarana dibutuhkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam mempraktikkan teori yang dipelajari di sekolah. Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kebutuhan sarana prasarana seperti laboratorium, *teaching factory*, dan *technopark* masih sangat kurang di lembaga pendidikan. Direktorat SMK telah membuat rencana dalam memberikan bantuan sarana-prasarana. Bantuan meliputi pemberian bantuan pembangunan maupun rehabilitasi ruang peralatan sekolah (RPS), pemberian peralatan praktik, dan rehabilitasi laboratorium. Berikut target pemberian bantuan sarana-prasarana pembelajaran (Tabel 4.5).

Tabel 4.5 Rencana Kemendikbud dalam Perbaikan Sarana-Prasarana Pembelajaran
(Direktorat PSMK, PKLK dan Ditbinsuslat 2016)

	2015	2016	2017	2018	2019
SMK :					
Ruang Praktek Sekolah	300	5.799	5.799	5.799	5.799
Peralatan (set)	2.277	2.277	2.277	2.277	2.277
Ruang Rehabilitasi	130	3.309	3.309	3.309	3.309
SMALB :					
Ruang Praktik Siswa	25	2.085	790	1.580	1.580
Peralatan (set)	35	1.876	1.580	1.580	790
Ditbinsuslat :					
Pemberian bantuan sarana pembelajaran bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan	21 lembaga	5 lembaga	108 lembaga	350 lembaga	350 lembaga

4.7 Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Guru

Penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berkualitas harus mampu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kebutuhan tenaga kerja. Guru dan tenaga pendidik sebagai pelaksana kegiatan pembelajaran di sekolah memiliki tanggung jawab untuk mampu beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang cepat dan tuntutan standar yang makin tinggi.

Secara umum, kurangnya guru dan tenaga pendidik yang berkualitas, distribusi guru yang tidak merata di berbagai wilayah Indonesia, serta belum terpenuhinya kebutuhan guru produktif merupakan beberapa tantangan utama terkait guru di lembaga pendidikan vokasi saat ini. Jika ditelusuri lebih lanjut, permasalahan mutu guru di pendidikan vokasi juga terkait dengan beberapa hal. Pertama, masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru. Menurut kedua peraturan tersebut, kualifikasi akademik bagi guru adalah S1 atau D-IV. Akan tetapi, pada tahun 2015 sekitar 12% guru masih memiliki kualifikasi akademik dibawah S-1/ D-IV. Proporsi ini lebih besar daripada guru SMA yang juga berkualifikasi akademik dibawah S-1/D-IV (7%). Kedua, masih banyak keraguan terhadap kompetensi guru di satuan lembaga pendidikan karena hasil uji kompetensi menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Selain itu, guru tidak selalu memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya. Ketiga, masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pembelajaran di lembaga pendidikan vokasi yang mengutamakan penguasaan kompetensi membutuhkan para pendidik yang memahami perkembangan usaha dan industri di luar sekolah. Oleh sebab itu, pengalaman para guru pendidikan vokasi untuk terjun langsung dalam kegiatan di industri menjadi sangat penting. Apalagi magang di DUDI merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk pemutakhiran kompetensi. Magang guru di perusahaan juga dapat menguatkan kerjasama pendidikan vokasi yang bersangkutan dengan DUDI untuk kegiatan Prakerin peserta didik. Kerjasama pendidikan vokasi dan DUDI dalam bentuk magang guru telah terintegrasikan dalam instrumen akreditasi pendidikan vokasi (dalam Standar Pengelolaan). Akan tetapi, data tentang pengalaman industri guru pendidikan vokasi belum

tersedia secara sistematis. Data ini dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan pembinaan guru agar lebih lebih mampu mentransfer informasi serta keterampilan sesuai dengan perkembangan teknologi terbaru di perusahaan-perusahaan.

Secara umum, pendidikan kejuruan harus mengambil inisiatif untuk membuka peluang magang guru di perusahaan. Minat dari DUDI masih belum optimal untuk mengembangkan kegiatan magang guru pendidikan vokasi menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk perusahaan. Sekalipun ada kesadaran untuk menjadikan magang guru di perusahaan sebagai kegiatan yang terstruktur, manajemen sekolah tidak selalu mampu melaksanakannya. Kendala utama dalam pelaksanaan program magang tersebut adalah masih terbatasnya peluang magang di DUDI. Akibatnya, pelaksanaan program menjadi tidak berkala serta tergantung pada informasi dari DUDI atau inisiatif guru.

Seperti yang telah dibahas pada bab guru dan tenaga pendidik, SMK masih banyak kekurangan Guru Produktif. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melakukan perhitungan dan berikut proyeksi kebutuhan Guru Produktif SMK sampai 2020 (Tabel 4.6).

Tabel 4.6 Kebutuhan Guru Produktif SMK
(Direktorat Guru Pendidikan Menengah, 2016)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rombel	335.821	349.144	360.258	369.799	377.175
	Pertumbuhan Rombel	15.222	13.324	11.114	9.541	7.376
2	Komposisi:					
	SMA	50%	35%	35%	30%	30%
	SMK	50%	65%	65%	70%	70%
3	Jumlah Rombel:					
	SMA	167.910	122.201	126.090	110.940	113.152
	SMK	167.910	226.944	234.168	258.859	264.022
4	Kebutuhan Guru Produktif	335.821	453.888	468.336	517.719	528.045
	Yang ada	40.098	39.471	38.651	37.653	36.591
	Pensiun	627	820	998	1.062	1.336
	Kebutuhan	(296.350)	(415.237)	(430.683)	(481.128)	(492.790)

Dari Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa kebutuhan sampai 2020 akan meningkat mendekati 500.000 Guru Produktif. Sementara untuk SMALB, guru yang dibutuhkan untuk mengajar program kemandirian adalah sebagai berikut (Tabel 4.7).

Tabel 4.7 Kebutuhan Guru Kemandirian di SMALB
(Direktorat PKLK, 2016)

Komponen	Base	Kebutuhan	Sasaran Pemenuhan Kebutuhan			
	Line 2016		2017	2018	2019	2020
Kebutuhan Tambahan PTK						
· Penyediaan Kepala Sekolah	933	948	-	-	7	8
· Penyediaan Guru SLB	3.732	5.498	566	500	400	300
· Penyediaan Guru Kemandirian	1.866	3.732	550	466	450	400

Langkah-Langkah Peningkatan Keterampilan Guru Produktif

(a) Guru Pembelajar

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kemampuan tersebut mencakup kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan dan pertumbuhan kemampuan (*abilities*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*). Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan suatu perubahan perilaku guru yang secara nyata perubahan perilaku tersebut berdampak pada peningkatan kinerja guru dalam proses belajar mengajar di kelas.

Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar merupakan salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan untuk menjaga profesionalitas guru. Oleh karena itu, Program Peningkatan Kompetensi Guru Pembelajar harus dirancang untuk memberikan pengalaman baru dalam membantu meningkatkan kompetensi sesuai bidang tugasnya agar guru memperoleh pengetahuan,

keterampilan, dan meningkatkan sikap perilaku yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tanggung jawabnya.

(b) Setiap Guru Produktif Mempunyai Minimal 1 Sertifikat Keahlian Level 3 KKNl

Sertifikasi Kompetensi Kerja guru diawali dengan uji kompetensi. Uji tersebut dilakukan melalui proses penilaian (*assessment*) baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada skema sertifikasi tertentu. Uji kompetensi bersifat terbuka, tanpa diskriminasi dan diselenggarakan secara transparan. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam uji kompetensi adalah valid, *reliable*, fleksibel, adil, efektif dan efisien, berpusat pada peserta uji kompetensi dan memenuhi syarat keselamatan kerja. Sertifikasi kompetensi berkaitan dengan kompetensi terkini daripada pencapaian masa lalu, dan yang perlu di tekankan bahwa lembaga yang dapat menentukan seseorang bekerja atau tidak adalah industri.

Saat ini terdapat 3 (tiga) jenis penerapan sertifikasi kompetensi, yaitu *pertama*, penerapan wajib sertifikasi. *Kedua*, penerapan disarankan sertifikasi (*advisory*) dan *ketiga*, penerapan sukarela (*voluntary*). Penerapan Wajib pada sertifikasi kompetensi dilakukan oleh otoritas kompeten sesuai bidang teknisnya. Sesuai dengan regulasi perdagangan jasa antarnegara (WTO = World Trade Organization) terutama GATS (General Agreement on Trade and Services) yang diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka penerapan wajib sertifikasi harus mengacu pada perjanjian ini. Penerapan wajib sertifikasi kompetensi didasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), dan/atau mempunyai potensi *dispute* besar dimasyarakat, dan seharusnya dinotifikasikan ke WTO, karena berlaku tidak hanya kepada tenaga Indonesia, tetapi juga tenaga asing yang masuk ke Indonesia. Beberapa bidang sertifikasi yang telah diterapkan wajib pada saat ini adalah pariwisata, manajemen resiko perbankan, pengawas kehutanan, penyuluh pertanian, tata laksana rumah tangga, penyuluh perikanan, inspektur keamanan pangan dan penyuluh keamanan pangan.

Sistem sertifikasi kompetensi kerja dibuat agar kredibel. Penyelenggaraan pendidikan/pelatihan (diklat) kejuruan/keterampilan adalah hal yang sangat penting untuk distandarkan. Diklat tersebut harus didasarkan pada

dua prinsip utama, yaitu *pertama*, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (*demanddriven*); dan *kedua*, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi (*Competency Based Training/ CBT*).

Penerapan sertifikasi kompetensi kerja yang dilakukan secara menyeluruh dan penyelenggaraan Diklat yang terstandar diharapkan menjadi salah satu "*barrier*" bagi para tenaga kerja asing yang akan "menyerbu" Indonesia. Sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level kompetensi profesi guru berada pada level 7, sehingga kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh guru harus mencapai level 7. Disamping itu, untuk memenuhi persyaratan kompetensi keahlian, guru diwajibkan memiliki satu sertifikat keahlian level 3 (KKNI) sesuai dengan bidangnya.

(c) Guru Produktif Magang di Industri Minimal 2 Bulan dalam 2 Tahun Pertama sesuai dengan Kompetensi Keahlian yang Diampunya

Kombinasi pembelajaran teori di ruang kelas dan perpustakaan (*theoretical learning*) dan pembelajaran praktik di lab (*practical learning*) dirancang sedemikian rupa dalam rangka menghasilkan lulusan dengan tingkat mutu tertentu yang siap memasuki dunia kerja. Keberhasilan pendidikan vokasi tidak hanya diukur dari segi mutunya saja, melainkan juga dari segi relevansinya. Hubungan mutu dan relevansi ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Mutu lulusan pendidikan vokasi dianggap relevan oleh para pengguna lulusan, yang dalam hal ini adalah sektor dunia usaha dan dunia industri (DUDI) apabila apa yang mereka dapatkan sama dengan atau lebih besar dari yang mereka harapkan. Kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. DUDI menilai bahwa lulusan pendidikan vokasi belum siap kerja, mereka *over qualified but under experience*. Berdasarkan pengalamannya, banyak *pre-rekrut* menghadapi dilema karena banyak pelamar yang memiliki potensi tinggi harus direlakan untuk tidak diseleksi lebih lanjut karena tidak memiliki pengalaman kerja yang relevan sebagaimana seringkali diminta oleh pengguna lulusan.

Sekarang dan kedepan, para penyedia kerja mengharapkan dari para lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan dari bidang studi atau keahliannya saja, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap lingkungan kerja baru tempat mereka bergabung, membawa keterampilan-keterampilan komunikasi yang luar biasa, kemampuan memimpin dan

dipimpin, dan kemampuan yang teruji dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Ini berarti bahwa *transferable skills* penting bagi para peserta didik. *Transferable skills* adalah keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan yang dapat diaplikasikan secara sama dari pekerjaan satu ke pekerjaan lainnya. Keterampilan-keterampilan ini juga dikenal dengan keterampilan-keterampilan kunci (*key skills*), keterampilan-keterampilan generik (*generic skills*) atau keterampilan-keterampilan inti (*core skills*). Keterampilan-keterampilan tersebut meningkatkan *employability* lulusan dan dapat diperbaiki melalui pembelajaran di tempat kerja. Untuk mengatasi kekurangannya, guru perlu mendapatkan *experiential learning*. Di samping itu, fasilitas laboratorium yang tersedia pada umumnya berupa miniatur simulatif inkubatif eksperimentatif sebagai sarana belajar, bukan untuk memproduksi barang atau/dan jasa yang riil untuk pasar.

Pengalaman kerja sama sekali berbeda dari eksperimen dan tidak dapat digantikan oleh laboratorium. Bekerja di industri adalah cara terbaik untuk mempelajari sikap profesional, *interpersonal skills* guru. Juga berbeda dengan pembelajaran di kelas yang lebih didasarkan pemerolehan keterampilan teknis, dan kegiatan-kegiatan pengajaran formal yang membekali peserta didik dengan pengetahuan, *skills* dan konsep-konsep, dan penekanan pada keterampilan-keterampilan kognitif.

Pembelajaran di tempat kerja atau program *sandwich* atau kerjasama pendidikan atau penempatan kerja atau magang, bukan *apprenticeship*. Sementara pembelajaran di tempat kerja adalah suatu pembelajaran yang terstruktur, yaitu seseorang peserta didik diminta untuk bekerja di suatu perusahaan atau organisasi dalam suasana kerja yang sesungguhnya. Pembelajaran ditempat kerja mempunyai tujuan belajar dari kerja dengan disupervisi oleh tutor akademik dan supervisor di tempat kerja, belajar secara mandiri yang didukung oleh kontrak-kontrak pembelajaran dan petunjuk-petunjuk pembelajaran.

Sehubungan dengan itu, guru harus memahami, menginternalisasi pembelajaran yang sebenarnya pada tempat kerja. Hal tersebut dapat menajamkan dan menumbuhkan kompetensi yang sebenarnya antarkompetensi keahlian, kompetensi metode, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Oleh karena itu, seorang guru diharapkan merupakan Guru Produktif yang magang di industri minimal 2 bulan dalam 2 tahun pertama sesuai dengan kompetensi keahlian yang diampunya.

Dalam menyiapkan guru yang lebih berpengalaman dalam Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat PKLK menyiapkan target dalam penyiapan guru yang akan magang di Dunia Usaha dan Dunia Industri. Tabel 4.8 merupakan target penyiapan guru kemandirian yang akan magang di DUDI.

Tabel 4.8 Target Guru Kemandirian yang magang di DUDI
(Direktorat Pembinaan PKLK, 2016)

No	Kegiatan	2017	2018	2019
1	Guru Kemandirian yang akan magang di DUDI	966 guru	966 guru	645 guru
2	Guru Kemandirian yang mendapat pengakuan	966 guru	966 guru	645 guru

(d) Penyiapan Program *Talent Scouting* untuk Calon Kepala Sekolah Kejuruan

Kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah harus memiliki kualitas kinerja yang andal dan memiliki keunggulan. Untuk menjangkau calon kepala sekolah yang berkualitas, PPPG lingkup kejuruan (sekarang PPPPTK lingkup kejuruan) pada anggaran 1994/1995 telah melaksanakan program penyiapan Kepala SMK melalui program *Talent Scouting*. Program *Talent Scouting* merupakan seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk melakukan penelusuran bakat/seleksi calon kepala SMK yang diselenggarakan melalui tahapan sebagai berikut.

- Seleksi tahap satu (seleksi administratif) yang dilakukan sepenuhnya oleh pihak wilayah, dalam hal ini LP2KS, di propinsi terkait;
- Seleksi tahap dua (seleksi kemampuan calon), yang dilaksanakan di wilayah oleh TIM *Talent Scouting* (TS) tingkat Pusat (unsur Ditjen GTK, LP2KS dan PPPPTK Lingkup Kejuruan) bersama-sama dengan tim seleksi wilayah melalui kegiatan wawancara dan evaluasi proposal yang bersangkutan; dan
- Seleksi tahap tiga (tahap akhir), yang dilaksanakan melalui Pelatihan Calon Kepala SMK di 6 (enam) PPPPTK Lingkup Kejuruan selama 3 (tiga) bulan.

Tujuan *talent scouting* untuk calon kepala sekolah kejuruan adalah: (1) memahami dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan nasional dalam bidang pendidikan vokasi; (2) memahami dan mengembangkan organisasi SMK; 3) mengimplementasikan kepemimpinan yang efektif (*effective leadership*) di sekolah masing-masing; dan (4) mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di sekolah masing-masing.

Materi program *talentscouting* untuk calon kepala sekolah kejuruan antara lain: (1) kebijakan pendidikan menengah kejuruan; (2) pengembangan *entrepreneurial* pada tamatan SMK; (3) pengorganisasian SMK; (4) kepemimpinan yang efektif di sekolah; (5) perancangan program pemberdayaan SMK; dan (5) pemberdayaan sumber daya sekolah untuk *Generality Unit* (GU).

(e) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Kejuruan

Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien.

Kepala sekolah selaku supervisor pendidikan memiliki fungsi mengarahkan, membimbing, dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru yang ditunjang oleh pegawai di sekolah. Kepala sekolah hendaknya melakukan observasi yang terus-menerus tentang kondisi-kondisi dan sikap-sikap di kelas, di ruangan guru, di ruang tata usaha, dan pada pertemuan-pertemuan staf pengajar. Tujuan hal tersebut adalah untuk memberikan bantuan pemecahan atas kesulitan-kesulitan yang dialami guru dan pegawai serta melakukan perbaikan-perbaikan baik langsung maupun tidak langsung mengenai kekurangan-kekurangannya, sehingga secara bertahap kualitas dan produktivitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan staf kepala sekolah, guru di kelas, kinerja wali kelas, dan pegawai tata usaha akan menjadi semakin baik secara berkelanjutan.

Dengan kemampuan profesional manajemen pendidikan, kepala sekolah diharapkan dapat menyusun program sekolah yang efektif, menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan membangun unjuk kerja personel sekolah serta dapat membimbing guru melaksanakan proses pembelajaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dinyatakan bahwa seorang kepala sekolah harus memiliki kompetensi supervisi berupa (1) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, (2) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, dan (3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

(f) Pengembangan Kompetensi Pengawas SMK

Pasal 55, ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa pengawasan satuan pendidikan memiliki peran dan tugas untuk pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan kesinambungan. Lebih lanjut, pada Pasal 57 ditegaskan bahwa tugas supervisi meliputi supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan pendidikan disekolah.

Tugas pokok pengawas adalah (1) melaksanakan pengawasan akademik, yaitu membina guru agar dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran/ bimbingan dan hasil belajar peserta didik, dan (2) melaksanakan pengawasan manajerial, yaitu membina kepala sekolah dan seluruh staf sekolah agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang dibinanya.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah berisi standar kualifikasi dan kompetensi pengawas sekolah. Standar kualifikasi menjelaskan persyaratan akademik dan nonakademik untuk diangkat menjadi pengawas sekolah. Standar kompetensi memuat seperangkat kemampuan yang harus dimiliki dan dikuasai pengawas sekolah untuk dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Ada enam dimensi kompetensi yang harus dikuasai pengawas sekolah yakni (a) kompetensi kepribadian, (b) kompetensi supervisi manajerial,

(c) kompetensi supervisi akademik, (d) kompetensi evaluasi pendidikan, (e) kompetensi penelitian dan pengembangan, dan (f) kompetensi sosial. Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan perlu memprogramkan agar pengawas sekolah tampil menjadi motivator disekolah. Selain itu, perlu pula memprogramkan peningkatan atau pelatihan pengawas sekolah agar akhirnya pengawas sekolah bekerja dengan efektif dan efisien.

(g) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi pendidikan pada satuan pendidikan.

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; (2) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan (3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Karena pentingnya tenaga kependidikan, perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan kompetensi sehingga yang bersangkutan secara optimal dapat mendukung proses pembelajaran.

Pemenuhan guru produktif SMK dilakukan melalui kegiatan (1) penataan/pemerataan guru yang ada melalui alih tugas dan programkeahlian ganda, (2) pengangkatan guru baru, serta (3) guru *outsourcing*. Pengangkatan guru baru dan *outsourcing* dilakukan apabila tidak ada kondisi kelebihan guru di satuan pendidikan yang dapat dialih tugaskan atau diikutkan program keahlian ganda.

(a) Alih Tugas

Alih tugas atau mutasi adalah pemindahan guru dari satuan pendidikan yang satu ke satuan pendidikan lainnya dengan tetap mengampu matapelajaran yang sama. Alih tugas/mutasi dapat dilakukan antar satuan

pendidikan sejenis, antar jenis pendidikan, antar jenjang pendidikan, antar Kabupaten/Kota maupun antar Provinsi.

Alih tugas/mutasi guru antar satuan pendidikan sejenis adalah pemindahan guru dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, misalkan dari SMA ke SMA, SMK ke SMK. Alih tugas/mutasi guru antar jenis pendidikan merupakan pemindahan guru dari satuan pendidikan SMA ke SMK atau sebaliknya. Alih tugas/mutasi antar jenjang pendidikan misalkan dari SMA ke SMP, dari SMK ke SMP. Alih tugas/mutasi antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dilakukan apabila sekolah tempat guru dipindahkan berada di Kabupaten/Kota atau Provinsi lain.

Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan menetapkan kriteria guru yang dipindah/alih tugaskan. Dalam menentukan kriteria tersebut, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memprioritaskan/mempertimbangkan hal-hal berikut.

- Kesesuaian mata pelajaran yang diampu dengan latar belakang pendidikan dan/atau sertifikat pendidik;
- Pemenuhan beban minimal tatap muka;
- Pemerataan mutu pendidikan;
- akses/keterjangkauan (jarak, moda transportasi, waktu tempuh, dan biaya);
- kondisi sosial yang kondusif; dan
- hal-hal lain sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pemerintah Provinsi/Daerah yang tidak menetapkan kriteria guru yang dipindah dapat mempertimbangkan hal-hal berikut.

- Mempunyai sertifikat pendidik, tapi belum dapat memenuhi beban tatap muka minimal 24 jam per minggu;
- Atas permintaan sendiri;
- Memenuhi aspek pemerataan mutu pendidikan;
- Memiliki aksesibilitas tinggi ke satuan pendidikan baru;
- Dibutuhkan oleh satuan pendidikan di Kabupaten/Kota lain;
- Dapat diterima di satminkal yang baru;
- Tidak sedang mengemban tugas tambahan.

Jenis guru SMK berdasarkan Kurikulum 2006 yang tidak dibutuhkan dalam Kurikulum 2013 dan dapat dialih tugaskan hanya guru SMK, yaitu guru IPA dan IPS sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Alih Tugas Jenis Guru SMK Kurikulum 2006
(Direktorat Guru Pendidikan Menengah, 2016)

No	Jenis Guru pada Kurikulum 2006	Konversi pada Guru Kurikulum 2013	Konsekuensi
1	IPA	Mutasi ke SMP	Diklat IPA SMP
2	IPS	Mutasi ke SMP	Diklat IPS SMP

(b) Program Keahlian Ganda

Program keahlian Ganda adalah pemindahan fungsi guru dari jenis guru tertentu ke jenis guru lainnya, misalnya dari guru matematika menjadi guru biologi, guru bahasa Indonesia menjadi guru bahasa Inggris. Guru dapat dialih fungsikan pada satuan pendidikan jika jumlah guru berlebih dan tidak mungkin dialihtugaskan. Program keahlian ganda dapat dilakukan pada guru, baik yang sudah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum. Program keahlian ganda pada guru dapat dilakukan pada satu satuan pendidikan, atau diikuti dengan alih tugas/mutasi antarsatuan pendidikan, antarjenjang pendidikan, antarjenis pendidikan, antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, dan alih fungsi ke/dari jabatan struktural. Sebagai konsekuensi program keahlian ganda, guru harus mengikuti:

- Sertifikasi sesuai dengan keahlian/mata pelajaran barunya;
- Pelatihan peningkatan kompetensi untuk keahlian/mata pelajaran barunya; atau
- Kualifikasi akademik sesuai mata pelajaran baru yang diampu;

Jenis guru menurut Kurikulum 2006 yang tidak diperlukan lagi dalam Kurikulum 2013 harus dibekali keahlian lain atau dikonversikan atau diberi kewenangan untuk mengampu mata pelajaran lain yang ada dalam Kurikulum 2013. Jenis guru menurut Kurikulum 2006 yang belum berkualifikasi S-1/D-IV harus menempuh pendidikan untuk mendapat kualifikasi S-1/D-IV, sedangkan yang belum bersertifikat harus mengikuti sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Alih fungsi/konversi guru tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan Tabel 4.11.

Tabel 4.10 Program Keahlian Ganda Jenis Guru SMK Kurikulum 2006 ke Guru Kurikulum 2013
(Direktorat Guru Pendidikan Menengah, 2016)

No	Jenis Guru pada Kurikulum 2006	Kualifikasi/ Sertifikat	Keahlian Ganda Guru pada Kurikulum 2013	Konsekuensi
1	IPA	S-1 bukan IPA	Penambahan Fungsi menjadi Guru Produktif sesuai kualifikasi akademiknya	Mengikuti sertifikasi sesuai kualifikasi akademiknya
2	IPS	S-1 bukan IPS	Penambahan Fungsi menjadi Guru Mapel lain sesuai kualifikasi akademiknya	Mengikuti sertifikasi sesuai kualifikasi akademiknya
3	KKPI	S-1/D-IV bukan TIK/Informatika	Penambahan Fungsi menjadi Guru Mapel lain sesuai kualifikasi akademiknya	Mengikuti sertifikasi sesuai kualifikasi akademiknya
		S-1/D-IV TIK/ Informatika bersertifikat KKPI	Penambahan Fungsi menjadi Guru Paket Keahlian dalam Program TIK	Sertifikasi ke 2
			Mengacu pada Permendikbud No 68 tahun 2014, Berperan sebagai guru pembimbing peserta didik, guru dan administrasi SMK	
4	Kewirausahaan	Bersertifikat Kewirausahaan	Mengampu mapel Prakarya & Kewirausahaan	Diklat Prakarya & Kewirausahaan Sertifikasi Prakarya & Kewirausahaan
			Mengampu mapel sesuai kualifikasi akademiknya	Sertifikasi kedua sesuai kualifikasi akademiknya
			Penambahan Fungsi menjadi Guru Mapel lain	Mengikuti Program S1/ DIV Prodi Lain Sertifikasi mata pelajaran yang baru
5	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	S-1/D-IV dan bersertifikat	Teknik Jaringan Tenaga Listrik	Diklat Penyegaran Paket Keahlian yang baru
			Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik	Diklat Penyegaran Paket Keahlian yang baru
6	Teknik Instrumentasi Gelas	S-1/D-IV dan bersertifikat	Konversi ke Paket Keahlian Teknik Instrumentasi Logam	Diklat Penyegaran Instrumentasi Logam
7	Teknik dan Manajemen Transportasi	S-1/D-IV dan bersertifikat	Konversi ke Teknik Pelayanan Produksi	Diklat Penyegaran Teknik Pelayanan Produksi
			Konversi ke Teknik Pergudangan	Diklat Penyegaran Teknik Pergudangan
8	Garmen	S-1/D-IV dan bersertifikat	Penambahan Fungsi Guru Tata Busana	Surat Keterangan Konversi Sertifikat Diklat Penyegara Tata Busana

No	Jenis Guru pada Kurikulum 2006	Kualifikasi/Sertifikat	Keahlian Ganda Guru pada Kurikulum 2013	Konsekuensi
			Konversi ke Paket Keahlian pada Program Keahlian Tekstil sesuai kualifikasi akademik yang dimiliki	Surat Keterangan Konversi Sertifikat Diklat Penyegaran Paket Keahlian pada Program Keahlian Tekstil
9	Teknik Elektronika Industri	S-1/D-IV dan bersertifikat	Konversi ke Paket Keahlian Teknik Elektronika Industri	Surat Keterangan Konversi Sertifikat Diklat Penyegaran Teknik Elektronika Industri
			Konversi ke Paket Keahlian Teknik Elektronika Komunikasi	Surat Keterangan Konversi Sertifikat Diklat Penyegaran Teknik Elektronika Komunikasi
10	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio	S-1/D-IV dan bersertifikat	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisian	Diklat Penyegaran Teknik Radio dan Pertelevisian

Tabel 4.11 Konversi Jenis Guru SMK Spektrum 2013 ke Guru Spektrum 2016
(Direktorat Guru Pendidikan Menengah, 2016)

No	Paket Keahlian pada Spektrum SMK 2013	Konversi pada Kompetensi Keahlian Spektrum SMK 2016	Kode Sertif	
1	Teknik Konstruksi Baja	Pilihan:	Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	
2	Teknik Konstruksi Kayu		Konstruksi Jalan, Irigasi dan Jembatan	
3	Teknik Konstruksi Batu dan Beton		Bisnis Konstruksi dan Properti	
4	Teknik Gambar Bangunan		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	
5	Teknik Plambing dan Sanitasi	Menjadi:	Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	
6	Teknik Furnitur	Menjadi:	Desain Interior dan Teknik Furnitur	
7	Kontrol Proses	Menjadi:	Instrumentasi dan Otomatisasi Proses	
8	Teknik Konstruksi Kapal Kayu	Menjadi:	Konstruksi Kapal Kayu dan Fiberglass	
9	Teknik Konstruksi Kapal Fiberglass			
10	Teknik Elektronika Komunikasi	Menjadi:	Teknik Elektronika Industri	534
11	Teknik Energi Hidro	Menjadi:	Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin	679
12	Teknik Energi Surya dan Angin			680
13	Teknik Suitsing	Menjadi:	Teknik Transmisi Telekomunikasi	599

No	Paket Keahlian pada Spektrum SMK 2013	Konversi pada Kompetensi Keahlian Spektrum SMK 2016	Kode Sertif
14	Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio dan Pertelevisionan	Pilihan: Produksi dan Siaran Program Radio	682
		Produksi dan Siaran Program Televisi	
		Produksi Film dan Program Televisi	
15	Teknik Tanah dan Air	Pilihan: Alat Mesin Pertanian	612
		Otomatisasi Pertanian	
16	Budidaya Krustacea	Menjadi: Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut	
17	Budidaya Kekerangan		
18	Pemasaran	Pilihan: Akuntansi dan Keuangan Lembaga	540
		Perbankan dan Keuangan Mikro	543
		Perbankan Syariah	697
19	Jasa Boga	Menjadi: Tata Boga	
20	Patiseri		
21	Tata Kecantikan Rambut	Menjadi: Tata Kecantikan Kulit dan Rambut	
22	Tata Kecantikan Kulit		

Guru yang berminat untuk mengonversi kompetensi keahlian agar mendaftar kepada program alih fungsi yang dilaksanakan. Setelah mendaftar, guru akan mengikuti pelatihan *in-on-in* agar menguasai kompetensi keahlian yang akan diajarkan.

Pada proses *on* pertama, guru tetap mengajar adaptif di sekolah asal. Namun, guru harus belajar mandiri terbimbing pada kompetensi keahlian produktif bersama Instruktur nasional atau pembimbing yang ditunjuk. Waktu belajar menghabiskan 300 jam pelajaran dan menyelesaikan 3 modul. Tempat pembelajaran akan didesain berada di sekolah yang sudah terstandarisasi mengadakan kegiatan tersebut.

Pada proses *in* pertama, guru akan mengikuti pelatihan secara fokus dan intensif secara teori dan praktik. Guru mengikuti pelatihan dengan metode refleksi pembelajaran mandiri terbimbing dengan menyelesaikan 400 jam pelajaran dalam 4 modul. Materi belajar yang diberikan merupakan materi profesional, pedagogik, *entrepreneurship* dan juga praktik di DUDI.

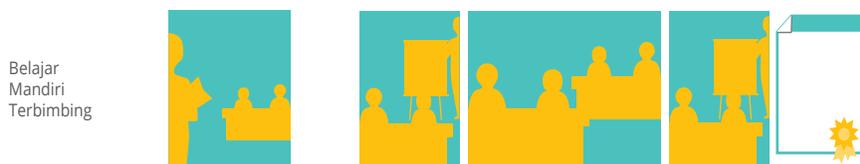
Pada proses *on* kedua, guru akan mempraktikkan pengajaran hasil materi di *in* pertama pada sekolah yang dituju. Walau mengajar, guru tetap belajar

mandiri terbimbing dengan waktu belajar sebanyak 200 jam pelajaran dan menyelesaikan 2 modul guru.

Pada proses *in* kedua, guru melaksanakan pelatihan penajaman materi produktif dan refleksi pembelajaran mandiri terbimbing dengan menyelesaikan 1 modul pembelajaran sebanyak 100 jam pelajaran. Tempat pembelajaran bisa di PPPPTK, SMK Rujukan, LPMP, Badan dan Diklat. Selain itu guru juga melaksanakan praktik di DUDI.

Setelah selesai, guru akan melakukan sertifikasi guru melalui pola PLPG (teori dan praktik pembelajaran selama 9 hari). Tempat di perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru yang ditetapkan oleh Menteri dan memiliki prodi yang sejenis. Kompetensi yang disertifikasi adalah kompetensi profesional, pedagogis, kepribadian dan sosial. Instruktur yang ditetapkan adalah dosen yang telah ditetapkan Kemenristek Dikti dan memiliki nomor register instruktur. Guru juga akan mengikuti uji kinerja dan mengikuti UKG. Gambar 4.4 menjelaskan desain alih fungsi guru.

Tahun	2016	2017											
Bulan	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Kegiatan	ON-1					IN-1		ON-2			IN-2		Sertifikasi Guru
	Mengajar Mapel Awal					Pelatihan		Magang Mapel Produktif			Pelatihan		
	Belajar Mandiri 3 Modul					Penguatan Materi Produktif (3-4 Modul)		Praktek Pembelajaran di Kelas dan Bengkel, Belajar Mandiri 2 Modul			Penajaman Materi Produktif		PLPG
Minimum JP per Minggu	15 s.d. 25 JP					50 JP		15 s.d. 25 JP			50 JP		
Durasi	12 s.d. 20 minggu					8 minggu		10 s.d. 12 minggu			4 minggu		10 hari
Total JP	300					400		200			200		90



Gambar 4.4 Desain Alih Fungsi Guru melalui Program Sertifikasi (Direktorat Guru Pendidikan Menengah, 2016)

a. Pengangkatan Guru PNS Baru

Pemerintah provinsi dapat melakukan pengangkatan guru produktif PNS baru dengan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Guru produktif PNS baru yang dapat diangkat sesuai dengan jenis guru menurut Kurikulum 2013.

b. Guru *Outsourcing*

(1) Tenaga Profesional Dunia Usaha dan Industri

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9 menyatakan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat dalam hal ini dunia usaha dan industri bertanggungjawab pula dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk penyediaan guru SMK (ikut sebagai guru *outsourcing*). Penyediaan guru melalui *outsourcing* bagi SMK dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga profesional dari dunia usaha dan industri (DUDI) sebagai guru produktif atau guru keterampilan SMK. Tenaga profesional *outsourcing* tersebut antara lain teknisi industri, seniman/empu tari, seniman musik, perajin seni, ahli boga/*chef*, akuntan dan berbagai profesi lain yang relevan. Kehadiran para tenaga profesional tersebut dalam proses pembelajaran di SMK tentunya hanya berkaitan dengan pengajaran keterampilan dan penilaian/pengukuran hasil kerja sesuai dengan kriteria yang diterapkan di dunia usaha dan industri. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan tenaga profesional DUDI antara lain sebagai berikut.

- Peserta didik maupun guru secara tidak langsung akan mengetahui dan belajar proses produksi yang diterapkan di DUDI, proses yang mengacu pada asas efektif dan efisien;
- Guru dan pihak sekolah dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang diterapkan di DUDI;
- Terjadi *link and match* antara sekolah dan industri/DUDI;
- Industri/DUDI mendapat gambaran potensi/kemampuan calon lulusan SMK yang akan bekerja di industri;
- Penggunaan tenaga *outsourcing* profesional dari DUDI sebagai guru SMK sebaiknya dilakukan dalam rangka kerjasama antara sekolah dan industri/institusi pasangannya.

(2) Mahasiswa peserta didik Calon Guru

Mahasiswa peserta didik calon guru dari perguruan tinggi atau LPTK mempunyai kewajiban untuk praktik di sekolah dalam kurun waktu tertentu. Perguruan tinggi biasanya melakukan kerjasama dengan SMA dan SMK untuk penempatan mahasiswa peserta didiknya. Bagi mahasiswa peserta didik yang telah selesai melakukan praktik mengajar, apabila diminta untuk menjadi guru di SMA/SMK akan memberi manfaat sebagai berikut.

Bagi Sekolah

- Kekurangan/kebutuhan guru terpenuhi;
- Kekurangan guru di SMA/SMK tidak harus dipenuhi dengan guru tetap;
- Pihak sekolah lebih mengetahui peta kemampuan LPTK.

Bagi Mahasiswa peserta didik Bersangkutan

- Menambah jam terbang atau pengalaman mengajar;
- Lebih memahami peserta didik;
- Lebih memahami kehidupan lingkungan sekolah;
- Secara makro lebih memahami dunia pendidikan;
- Mendapat penghasilan tambahan.

Bagi LPTK/Politeknik Bersangkutan

- Mengetahui kebutuhan jumlah guru di sekolah
- Mengetahui lebih jelas kompetensi guru
- Sekolah secara lidak langsung menjadi laboratorium LPTK;
- LPTK/Politeknik dapat mengetahui/mengikuti dinamika pembelajaran di sekolah;
- LPTK/Politeknik dapat mengetahui perubahan/perkembangan teknologi yang terjadi di SMK.
- Pemenuhan guru produktif SMK dengan memanfaatkan mahasiswa peserta didik LPTK sebaiknya dikuatkan dengan MOU atau perjanjian kerja antara sekolah dan LPTK bersangkutan.

4.8 Akreditasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi

Akreditasi pengakuan publik atau pengakuan eksternal kepada instansi dengan standar tertentu semata-mata untuk memberi jaminan kepada masyarakat bahwa lembaga pendidikan tersebut layak dan menjadi acuan utama untuk terjadinya proses belajar. Oleh karena itu, *output*-nya pun dijamin dan bisa digunakan oleh masyarakat pengguna lulusan, dalam hal ini dunia kerja.

Masih banyak program kejuruan di SMK dan lembaga pendidikan kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi. Hal ini menumbuhkan keraguan bagi kualitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan tersebut. Hal ini juga berakibat pada keraguan akan kualitas lulusan yang berasal dari lembaga tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, satuan pendidikan vokasi harus menjalani proses akreditasi. Oleh karena itu, akreditasi kelembagaan menjadi salah satu strategi dalam revitalisasi pendidikan vokasi. Sebagai contoh, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menargetkan akan menyiapkan 2.500 lembaga kursus dan pelatihan terakreditasi tiap tahunnya sampai 2019.

Kelembagaan juga sangat krusial untuk ditata agar konsep pendidikan vokasi bisa tepat sasaran dan berhasil. Salah satu yang membuat kacaunya pengelolaan pendidikan vokasi Indonesia adalah karena tatanan kelembagaan yang tambal sulam dan tidak adanya kesepakatan antar lembaga terkait demi mencapai tujuan akhir.

Dalam pengelolaan pendidikan vokasi, paling tidak ada beberapa pihak yang mutlak harus berkolaborasi dan memiliki komitmen penuh untuk terlibat. Mereka adalah Kementerian dan Dinas Pendidikan, Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja, asosiasi-asosiasi profesi, perusahaan swasta dan instansi pemerintah (sebagai pengguna *output*) serta lembaga pendidikan vokasi (formal dan nonformal). Akan lebih bagus lagi bila lembaga terkait seperti Bappenas dan Bappeda, Kementerian dan Dinas Perindustrian, serta Gubernur/Bupati/Walikota bisa ikut dimasukkan dan memiliki keterlibatan aktif karena berhubungan dengan pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Tatanan kelembagaan dalam menjalankan skema nasional pendidikan vokasi ini harus diberi payung hukum yang sangat kuat karena melibatkan banyak pihak. Tanpa adanya payung hukum setingkat UU, sangat sulit bagi lembaga pendidikan vokasi untuk dapat memajukan dirinya dan berkontribusi bagi ekonomi bangsa.

Hal-hal yang mutlak harus diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Vokasi adalah menyangkut peran, hak, dan tanggung jawab setiap pihak, kemudian proses perencanaan, penyelenggaraan, hingga evaluasi dan akreditasi. Harus juga diatur yang jelas mengenai kewajiban pihak-pihak terkait untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran berbasis dunia kerja, penyaluran kegiatan praktik dan lulusan, dan lain-lain. Tidak lupa harus diatur juga mengenai penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) jika ada pihak yang sangat besar

kontribusinya ataupun melanggar aturan. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki kewajiban ikut menerima dan melatih peserta didik vokasi, jika tidak maka ada sanksinya.

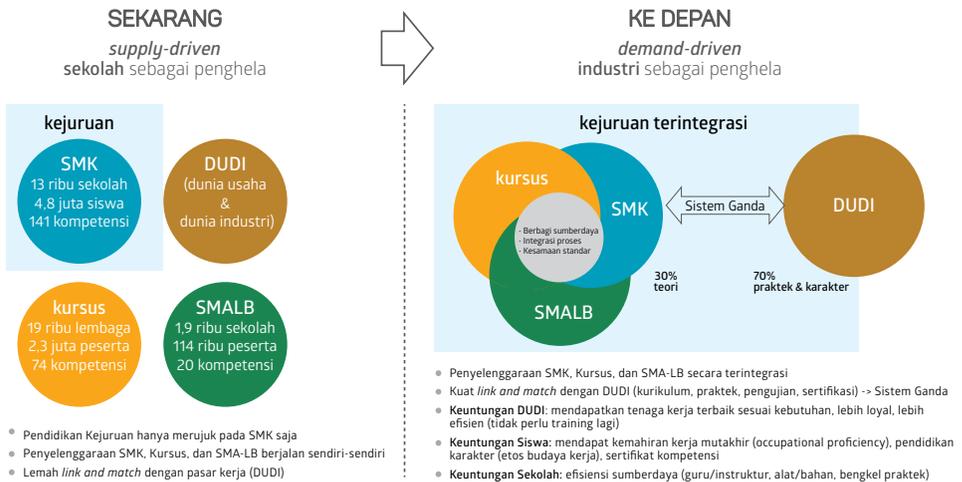
Sistem pendidikan vokasi pada era globalisasi semacam ini harus fleksibel. Kekakuan pada struktur dan sistem kerja hanya akan membuat pendidikan vokasi tidak berkembang dan gagal mengemban misi memajukan perekonomian bangsa. Pendekatan yang bisa dilakukan adalah dengan mengatur agar ada lembaga formal dan nonformal dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Lembaga nonformal akan memiliki banyak keleluasaan dalam bergerak dan mengantisipasi kebutuhan pasar. Pendidikan nonformal juga akan lebih fleksibel dalam mengatur lembaganya karena struktur yang lebih luwes dan birokrasi yang tidak begitu kaku.

Pada lembaga pendidikan formal, peran akan lebih diarahkan pada penyelenggaraan jurusan-jurusan yang masuk dalam kategori “utama” atau yang memiliki paling banyak permintaan dari pasar kerja. Lembaga penyelenggara nonformal bisa melaksanakan kegiatan pada jurusan-jurusan yang “cabang” atau yang terus berubah spesifikasi dan kualifikasinya, termasuk ke jurusan yang bersifat sesuai “permintaan pasar” tertentu. Hal ini sulit dilakukan oleh lembaga formal. Jadi, ada pembagian peran sehingga bisa menguntungkan bagi semua pihak.

Dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi, terdapat tiga jenis satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terlibat, yaitu SMK, LKP, dan SMALB. Ketiga jenis satuan pendidikan ini mempunyai proses penyelenggaraan pendidikan yang berbeda. SMK dan SMALB berada di pendidikan formal, sedangkan LKP berada di pendidikan nonformal. Ketiga pendidikan ini berdiri secara sendiri-sendiri dalam menjalankan proses pendidikan.

Selain itu, proses pendidikan vokasi sekarang masih belum terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Penyusunan kurikulum belum optimal melibatkan partisipasi DUDI sehingga proses pembangunan kompetensi tidak sesuai dengan keinginan DUDI. Selain itu, tidak adanya standarisasi dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dalam pelaksanaan magang bersama DUDI membuat keselarasan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan DUDI menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dalam revitalisasi pendidikan vokasi ini, integrasi dan sinkronisasi antara lembaga pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi menjadi penting. Selain itu, proses

penyelenggaraan pendidikan juga harus *link and match* dengan kebutuhan DUDI agar bisa dicetak lulusan yang siap untuk bekerja. Rencana integrasi pendidikan vokasi ditunjukkan dalam Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Rencana Integrasi lembaga pendidikan vokasi di Kemendikbud

Proses integrasi ini dimulai dari integrasi ketiga lembaga pendidikan yang menyelenggarakan vokasi. SMK, SMALB, Kursus dan Pelatihan bisa berintegrasi dalam tiga hal, yaitu berbagi sumber daya, integrasi proses, dan kesamaan proses. *Berbagi sumber daya (resource sharing)* yang dimaksud adalah ketiga lembaga pendidikan ini bisa menggunakan *resource sharing* yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan.

Seperti yang diketahui, pembangunan *teaching factory* atau laboratorium kejuruan memerlukan biaya yang sangat banyak sehingga pembangunan sarana tersebut untuk setiap SMK dan lembaga kursus dan pelatihan pasti membutuhkan anggaran dari APBN dan APBD yang tidak sedikit serta waktu yang cukup banyak. Untuk mengatasi masalah ini, lembaga pendidikan SMK bisa membagi penggunaan *teaching factory* yang ada di sekolah untuk bisa dipakai oleh lembaga kursus pelatihan dan SMALB. Pembagian sarana ini bisa dengan pembagian waktu penggunaan sehingga peserta didik SMK bisa menggunakan laboratorium dan *teaching factory*.

Pembagian lain yang bisa dilakukan adalah guru dan tenaga pendidik. Seperti yang diketahui, terdapat kekurangan Guru Produktif pada lembaga pendidikan vokasi. Karena guru harus memenuhi jam mengajar selama 24 jam seminggu, guru-guru ini bisa diberdayakan untuk mengajar di SMK, SMALB, lembaga kursus dan pelatihan yang mempunyai program kejuruan yang sama.

Selain berbagi sumber daya, integrasi proses juga bisa dilakukan pada ketiga lembaga ini. Sebagai contoh, jika di SMK diadakan magang sebagai tempat peserta didik untuk mempraktikkan keahlian yang dipelajari, ada baiknya proses magang ini juga diadakan oleh program kejuruan di SMALB, Lembaga Kursus dan Pelatihan yang relevan. Dalam magang ini, peserta didik bisa mengalami langsung pengalaman yang bersinggungan dengan Dunia Kerja dan Dunia Industri. Magang ini juga bisa membentuk kepribadian dan karakter peserta didik untuk siap masuk dunia kerja.

Yang terakhir, integrasi yang bisa dilakukan adalah kesamaan standar. Dalam penilaian dan saat sertifikasi profesi, harus ada standar penilaian yang sama dalam program kejuruan yang sama, dan hal ini harus diterapkan ketiga lembaga pendidikan tersebut sehingga lulusan dari ketiga lembaga ini bisa diakui secara setara. Standar yang sama juga harus diterapkan dalam proses belajar-mengajar untuk menghasilkan kualitas peserta didik yang terjamin mutunya.

Proses integrasi ketiga jenis pendidikan ini akan mulai dilakukan di 2017. Tahapan pertama adalah berbagi sumber daya seperti tempat praktik dan guru. Tempat praktik yang ada di salah satu lembaga pendidikan hendaknya juga bisa dipakai oleh peserta didik dari lembaga lain. Pembagian sumber daya juga bisa berupa guru yang telah dilatih atau berasal dari DUDI.

Secara bertahap, integrasi akan merambah ke tata kelola yaitu kesamaan standar dan proses dalam pelaksanaan pendidikan vokasi. Misal dalam sertifikasi di bidang kompetensi yang sama, peserta didik dari lembaga pendidikan yang berbeda bisa mengalami proses ujian yang telah terstandarisasi sehingga hasil sertifikasinya bisa diakui. Diharapkan di 2019, integrasi pendidikan vokasi ini bisa dilakukan sampai pada tingkat kecamatan (lihat rencana integrasi pendidikan vokasi pada Gambar 4.7).

4.9 Regulasi

Pelaksanaan pendidikan vokasi melalui jalur pendidikan formal di SMK dan Pendidikan Diploma dan melalui jalur Pendidikan Nonformal harus memiliki legalitas dan regulasi yang kuat. Untuk itu, perlu ada pemihakan terhadap penguatan program pendidikan vokasi melalui peninjauan dan perbaikan pada sejumlah regulasi atau peraturan dan perundang-undangan terkait dengan program pendidikan vokasi pada kursus dan pelatihan.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki konsekuensi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Untuk itu, perlu segera disusun regulasi terkait dengan pengelolaan pendidikan vokasi pada jalur pendidikan formal maupun pada jalur pendidikan nonformal dengan membentuk payung hukum untuk membentuk unit/satuan kerja yang melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan program pendidikan vokasi dan DUDI.

Revitalisasi pendidikan vokasi semakin kuat untuk dilakukan setelah ditandatanganinya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016. Inpres tersebut mengatur tentang revitalisasi pendidikan menengah dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia membuat dan berimplikasi pada berbagai lembaga yang diperintahkan dalam inpres tersebut. Dalam inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja, 1 Kepala Lembaga Pemberintah Non-Kementerian dan 34 Gubernur untuk menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan fungsi dalam merevitalisasi pendidikan vokasi. Ke-12 Menteri yang ditugaskan oleh Presiden adalah adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri dalam Negeri Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan. Selain itu juga Presiden secara spesifik menugaskan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam tabel berikut terdapat detil tugas yang dibebankan kepada masing-masing pihak yang disebutkan dalam Inpres.

Tabel 4.12 Tugas Kementerian/Lembaga/Gubernur dalam Inpres 9/2016

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	Kementerian Perindustrian
Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini paling singkat 6 (enam) bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada Presiden	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat peta jalan pengembangan SMK • Menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match) • Meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK • Meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha/ Industri • Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan • Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK 	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan; dan • Mengembangkan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (<i>job title</i>), dan lokasi industri khususnya yang terkait dengan lulusan SMK; • Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan Praktek Kerja (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; • Mendorong industri untuk memberikan dukungan dalam pengembangan <i>teaching factory</i> dan infrastruktur; dan • Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
Kementerian Ketenagakerjaan	Kementerian Perhubungan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Badan Usaha Milik Negara
<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun proyeksi kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK yang meliputi tingkat kompetensi, jenis, jumlah, lokasi dan waktu • Memberikan kemudahan bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja di Balai Latihan Kerja (BLK); • Melakukan Revitalisasi BLK yang meliputi infrastruktur, 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang perhubungan; • Meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan perhubungan; • Memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk melakukan PKL dan magang, termasuk berbagi sumber daya 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang kelautan dan perikanan; • Meningkatkan bimbingan bagi SMK yang kejuruannya terkait dengan kelautan dan perikanan; • Memberikan kemudahan akses bagi siswa, pendidik, dan tenaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyerap lulusan SMK sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan SMK; • Mendorong BUMN untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan • Mendorong BUMN untuk memberikan dukungan dalam

<p>sarana prasarana, program pelatihan, dan sertifikasi; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 	<p>(resources sharing); dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 	<p>kependidikan untuk melakukan PKL dan magang; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 	<p>pengembangan teaching factory dan infrastruktur</p>
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kementerian Kesehatan	Kementerian Keuangan	Kementerian Dalam Negeri ⁵
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK yang terkait dengan bidang energy dan sumber daya mineral; Menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (<i>job title</i>), dan lokasi industri energy yang terkait dengan lulusan SMK; Mendorong industri energy untuk memberikan akses yan lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; dan Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun proyeksi pengembangan, jenis, kompetensi (<i>job title</i>), dan lokasi fasilitas kesehatan yang terkait dengan lulusan SMK; Mendorong rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya untuk memberikan akses yang lebih luas bagi siswa SMK untuk melakukan PKL dan magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; Memberikan kesempatan yang luas kepada lulusan SMK bidang kesehatan untuk bekerja sebagai asisten tenaga kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya; dan Mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan keuangan <i>teaching factory</i> di SMK yang efektif, efisien, dan akuntabel; dan Melakukan deregulasi peraturan yang menghambat pengembangan SMK 	<p>Berkoordinasi dengan Gubernur dalam rangka revitalisasi SMK di tingkat provinsi</p>

5 Kementerian dalam Negeri tidak tercantum dalam Inpres namun fungsi koordinasi dengan Pemerintah Daerah berada dalam wewenang Kementerian dalam Negeri

Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Gubernur
<ul style="list-style-type: none"> · Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK · Mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik dan tenaga pendidik SMK; dan · Mempercepat Pemberian lisensi bagi SMK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama 	<ul style="list-style-type: none"> · Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai dengan potensi wilayahnya masing-masing; · Menyediakan pendidik, tenaga kependidikan sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas; · Melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK; dan · Mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing

Selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, fungsi pendidikan vokasi masih tersebar di berbagai kementerian. Persebaran fungsi pendidikan vokasi di berbagai kementerian ini bisa membuat perbedaan kualitas dalam pembelajaran pada pendidikan vokasi. Padahal, dalam penyelenggaraan pendidikan, Kemendikbud telah menetapkan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang harus diimplementasikan. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang standardisasi dalam sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi.

Penyusunan regulasi yang bersifat teknis melalui peraturan menteri terkait perlu untuk pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dalam pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan program pendidikan vokasi. Penetapan kompetensi dan sertifikasi nasional dilakukan oleh menteri atau pejabat lain yang mendapatkan mandat dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pula penetapan kompetensi tersebut mengacu pada KKNI. Sayangnya, belum ada harmonisasi sertifikasi profesi dan kompetensi untuk lembaga pendidikan vokasi, yaitu SMK dan lembaga kursus. Menurut UU Sisdiknas Pasal 21 ayat (3), gelar profesi hanya ditujukan untuk pendidikan tinggi. Namun, Pasal 61 menyatakan bahwa "Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu". Sinkronisasi peraturan sertifikasi di SMK, SMALB, dan LKP menjadi hal yang sangat diperlukan.

Dalam penguatan dan pengarusutamaan pendidikan vokasi pada kursus dan pelatihan, perlu dibuat sistem dan mekanisme kegiatan magang yang efektif dan efisien. Regulasi ini akan menguatkan sistem dan mekanisme yang

tepat pada hubungan lembaga pendidikan dalam mengelola pembelajaran dengan praktik nyata di dunia usaha dan dunia Industri.

Di negara-negara maju, peran Industri ditunjukkan secara nyata berupa kerjasama program, dukungan finansial untuk penelitian, dan beapeserta didik. Bahkan, di beberapa negara peran industri ini sudah menjadi kewajiban karena telah ada undang-undang yang mengaturnya. Paling tidak, dunia usaha dan industri yang telah secara nyata membangun kerjasama dengan sekolah diberi insentif dengan memberikan keringanan pajak. Misalnya, perusahaan yang menyelenggarakan magang bagi peserta didik SMK diberi insentif berupa pembebasan PPh (pajak penghasilan) badan serta pembebasan pajak pembelian alat dan barang kebutuhan pelatihan (*training*) magang peserta didik SMK.

4.10 Quick Wins 2016

Quick Wins adalah langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai untuk mengawali pelaksanaan suatu program. *Quick Wins* dipilih dari satu atau kombinasi beberapa area perubahan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, khususnya pada program peningkatan kualitas pendidikan.

Sustainable Development Goals 2030 menyatakan bahwa “By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship...” (pada 2030 terjadi peningkatan pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan termasuk keterampilan vokasi dan teknis untuk bekerja dan berwirausaha...). Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan beberapa *quick wins* yang sudah dicapai di 2016, yaitu:

- Penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia;
- Pengembangan 150 SMK bidang Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif;
- Tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jerman:
 - pengiriman 45 orang guru SMK untuk *training* ke Jerman;
 - mendatangkan 10 orang *Senior Expert* Jerman ke SMK;
 - kerjasama Kemendikbud dengan BiBB (*German Federal Institute for Vocational Education and Training*);

- kerjasama dengan Kadin Trier Germany : *Pilot Project Dual System* di 6 SMK di Jateng dan Jatim.
- Proyek perintis (*pilot project*) pendidikan vokasi terintegrasi (SMK – Kursus – SMA-LB - industri) di Batam, Solo, Malang.

Penyusunan Inpres sendiri telah dimulai dari 2015. Dengan koordinasi tingkat kementerian dan lembaga, pada akhirnya Inpres Nomor 9 Tahun 2016 ini telah ditandatangani oleh Presiden pada bulan September 2016. Diharapkan melalui Inpres ini, terjadi koordinasi dan konsolidasi lintas kementerian untuk memastikan bahwa pengelolaan SMK telah sesuai dengan tujuan besar pembangunan manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Penyusunan Inpres tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan difokuskan kepada 6 tugas yaitu:

- membuat Peta Pengembangan SMK;
- menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*);
- meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan;
- meningkatkan kerjasama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan dunia usaha/industri;
- meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan
- membentuk kelompok kerja pengembangan SMK.

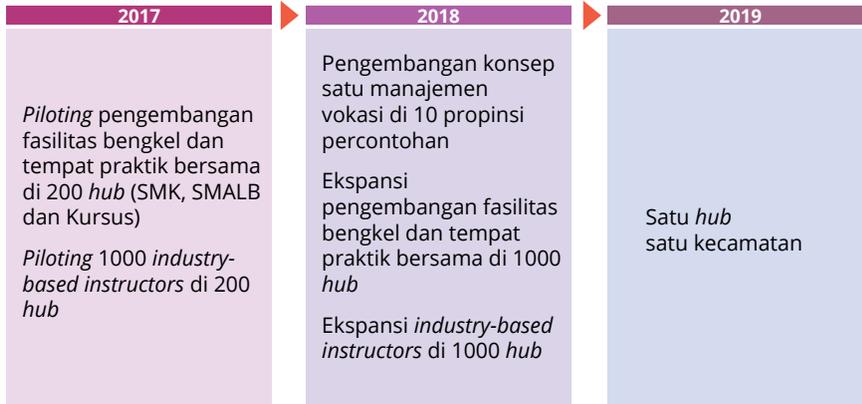
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dan juga pencapaian *Quick Wins* 2016, beberapa pencapaian program yang sudah dilakukan diantaranya sebagai berikut.

- Penetapan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan dan *review* struktur kurikulum berdasarkan SKKNI.
- Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dengan mengirimkan 45 guru produktif SMK ke Jerman dalam bidang kejuruan Batu dan Beton, Otomasi Industri dan Permesinan dalam rangka penguatan pembelajaran kejuruan.
- Pengembangan 150 SMK bidang Kemaritiman, Pariwisata, Pertanian, dan Industri Kreatif sudah dilakukan.

Gambar 4.6 Tahapan Revitalisasi Pendidikan Vokasi pada SMK, SMALB, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan

	2017	2018	2019
SMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah untuk 4.722.132 Siswa SMK 2. Penataan Ulang Paket keahlian SMK menjadi 141 Paket Keahlian 3. Pendirian 157 USB SMK dan penyediaan 2.196 Ruang Kelas Baru pada wilayah pengembangan kemaritiman, pertanian, pariwisata dan teknologi manufaktur 4. Pelibatan 35.000 industri dalam dual system SMK 5. Pangkatan 5.140 Guru Kejuruan Baru; 6. Pelatihan dan Magang Industri bagi 60.000 Guru Produktif; 7. Pengakuan bagi 70.000 Instruktur Industri; dan LPMP; 8. Peningkatan Kejuruan bagi 1.800 Widyaaiswara di P4TK 9. Pelatihan Kejuruan 660 Calon kepeks SMK 10. Pelatihan Kejuruan untuk 700 Pengawas. 11. Pelatihan 3.000 Teknisi Labor SMK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah untuk 5.106.953 Siswa SMK 2. Penambahan Paket keahlian SMK baru menjadi 15 Paket Keahlian 3. Pendirian 235 USB SMK dan penyediaan 3.292 Ruang Kelas Baru pada wilayah pengembangan kemaritiman, pertanian, pariwisata dan teknologi manufaktur 4. Pelibatan 100.000 industri dalam dual system SMK 5. Pangkatan 7.700 Guru Kejuruan Baru; 6. Pelatihan dan Magang Industri bagi 20.000 Guru Produktif; 7. Pengakuan bagi 20.000 Instruktur Industri; dan LPMP; 8. Peningkatan Kejuruan bagi 900 Widyaaiswara di P4TK 9. Pelatihan Kejuruan 225 Calon kepeks SMK 10. Pelatihan Kejuruan untuk 350 Pengawas. 11. Pelatihan 2.000 Teknisi Labor SMK 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah untuk 5.209.146 Siswa SMK 2. Penambahan Paket keahlian SMK baru menjadi 15 Paket Keahlian 3. Pendirian 62 USB SMK dan penyediaan 874 Ruang Kelas Baru pada wilayah pengembangan kemaritiman, pertanian, pariwisata dan teknologi manufaktur 4. Pelibatan 10.000 industri dalam dual system SMK 5. Pangkatan 2017 Guru Kejuruan Baru; 6. Pelatihan dan Magang Industri bagi 30.000 Guru Produktif; 7. Pengakuan bagi 20.000 Instruktur Industri; dan LPMP; 8. Peningkatan Kejuruan bagi 900 Widyaaiswara di P4TK 9. Pelatihan Kejuruan 660 Calon kepeks SMK 10. Pelatihan Kejuruan untuk 350 Pengawas. 11. Pelatihan 750 Teknisi Labor SMK
SMA LB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Ulang Kurikulum kemandirian SMALB menjadi 20 Paket Kemandirian 2. Rerui 4 Naskah Pedoman Implementasi Program Kemandirian 3. Pelibatan 170 DU/DI 4. Pemenuhan 566 Guru SMALB; 5. Pelatihan dan Magang Industri bagi 550 Guru Kemandirian; 6. Pengakuan bagi 550 Guru Kemandirian; 7. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah untuk 12.382 Siswa SMALB 8. Penyediaan Ruang Praktik Siswa, 790 ruang 9. Penyediaan Peralatan Praktik Siswa, 1.580 paket 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan 340 DU/DI 2. Pemenuhan 500 Guru SMALB; 3. Pelatihan dan Magang Industri bagi 466 Guru Kemandirian; 4. Pengakuan bagi 466 Guru Kemandirian; 5. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah untuk 13.664 Siswa SMALB 6. Penyediaan Ruang Praktik Siswa, 1.580 ruang 7. Penyediaan Peralatan Praktik siswa, 1.580 paket 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelibatan 340 DU/DI 2. Pemenuhan 400 Guru SMALB; 3. Pelatihan dan Magang Industri bagi 450 Guru Kemandirian; 4. Pengakuan bagi 450 Guru Kemandirian; 5. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah untuk 15.028 Siswa SMALB 6. Penyediaan Ruang Praktik Siswa, 1.580 ruang 7. Penyediaan Peralatan Praktik siswa, 790 paket 8. Penyediaan 7 orang kepala sekolah.
KURSUS DAN PELATIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80000 angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan bersertifikat 50000 angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan wirausaha 10000 peserta didik kursus mengikuti magang di DUDI 30 standar program khusus dan pelatihan 300 lembaga kursus dan pelatihan memperoleh bantuan sarana pembelajaran 400 tempat uji kompetensi memperoleh bantuan sarana ujian 25000 peserta didik bersertifikat kompetensi 2500 lembaga terakreditasi 1000 instruktur bersertifikat kompetensi 600 penguji bersertifikat kompetensi 5000 lembaga yang terdaftar dalam Dapodik 100 lembaga yang terintegrasi dengan SMK dan SMALB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80000 angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan bersertifikat 50000 angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan wirausaha 10000 peserta didik kursus mengikuti magang di DUDI 30 standar program khusus dan pelatihan 350 lembaga kursus dan pelatihan memperoleh bantuan sarana pembelajaran 500 tempat uji kompetensi memperoleh bantuan sarana ujian 25000 peserta didik bersertifikat kompetensi 2500 lembaga terakreditasi 1200 instruktur bersertifikat kompetensi 700 penguji bersertifikat kompetensi 6500 lembaga yang terdaftar dalam Dapodik 200 lembaga yang terintegrasi dengan SMK dan SMALB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 80000 angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja dan bersertifikat 50000 angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan wirausaha 10000 peserta didik kursus mengikuti magang di DUDI 30 standar program khusus dan pelatihan 350 lembaga kursus dan pelatihan memperoleh bantuan sarana pembelajaran 600 tempat uji kompetensi memperoleh bantuan sarana ujian 25000 peserta didik bersertifikat kompetensi 2500 lembaga terakreditasi 1200 instruktur bersertifikat kompetensi 700 penguji bersertifikat kompetensi 7500 lembaga yang terdaftar dalam Dapodik 200 lembaga yang terintegrasi dengan SMK dan SMALB

Gambar 4.7. Rencana Integrasi Pendidikan Vokasi





REFERENSI

- ADB. 2014. *Sustainable Vocational Training Toward Industrial Upgrading and Economic Transformation: A knowledge Sharing Experience*
- ADB and Towers Watson Study. 2013. *Issues paper for Seminar on 'Jobs and Skills in the Twenty-First Century'*.
- Clement, Ute. 2014. *Improving the Image of Technical and Vocational Education and Training*, GIZ.
- Coordinating Ministry for Economic Affairs Republic of Indonesia. 2011. *Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011 – 2025*
- Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan. 2002. *Sejarah Pendidikan Teknik dan Kejuruan di Indonesia: Membangun Manusia Produktif*. Jakarta.
- GIZ . 2015. *Guidelines Designing TVET Measures*. Germany.
- ILO. 2014. *ASEAN Community 2015: Managing Intengarion for Better Jobs and Shared Poverty*. Bangkok.
- IMD World Competitive Center. 2015. *IMD World Talent Report*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. 2015. *Rencana Strategis Direktorat Pembinaan SMK 2015 – 2019*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Rencana Induk Wajib Belajar 12 Tahun*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Direktorat Pembinaan SMK. 2015. *Selayang Pandang Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Grand Design Pendidikan Vokasi*. Jakarta.
- Kidwell, Frances L. And Thomas West. 2012. *Lessons from Germany and the Future of Vocational Education*.
- McKinsey Global Institute (September 2012). *The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential*

- Ministry of Education and Culture of The Republic of Indonesia. 1997. *Skills Toward 2020 For Global Era. Taskforce Report on The Development of Vocational Education and Training in Indonesia*. Jakarta.
- Ministry of Education and Culture. 2013. *Overview of the Education Sector in Indonesia. Achievements and Challenges*. Jakarta.
- OECD. 2011. *OECD Reviews of Vocational Education and Training: Learning for Jobs. Pointers for Policy Development*.
- Samsudi. 2005. "Pengembangan Model Sinkronisasi Kurikulum Program Produktif SMK Bidang Rekayasa". Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Dikti-DP3M
- Satuan Tugas Perumus Kebijakan Pengembangan Pendidikan Vokasi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. "Laporan Interim: Keterampilan Menjelang 2020". Jakarta.
- SEAMEO VOCHTECH. 2014. *Integration of Transferable Skills in TVET Curriculum, Teaching-Learning and Assessment. Final Report*.
- SED TVET-GIZ. 2012. *Kajian Kemitraan Dunia Usaha-Dunia Industri (DU/DI) dan Sekolah Menengah Kejuruan: Peluang dan Tantangan*.
- Skjaerlund, Gorm, Theo van der Loop (February 2015). "Supply of Non-formal Training in Indonesia". TNP2K Working Paper 23.
- Suliswanto, Harry; Thomas Russell. 2012. *Study Report. Lesson Learned on Public - Private Alliances in the Vocational Education System of Indonesia*.
- Suto, Irenka. 2013. *21st Century Skills: Ancient, Ubiquitous, Enigmatic?. A Cambridge Assessment Publication*.
- Suwarna, Achmad. 1996. "Skills Toward 2020, A Plan to Improve and Coordinate Skills Training in Indonesia", Paper prepared for UESCO/ UNEVOC Regional Conference Royal Melbourne Institute of Technology Melbourne Australia 11-14 November 1996.
- The Economist Intelligence Unit Limited. 2015. "Driving the skills agenda: Preparing students for the future". An Economist Intelligence Unit Report, sponsored by Google.
- World Bank. 2011. *Revitalizing Public Training Centers in Indonesia: Challenges and the Way Forward*
- Billet, Stephen. 2011. *Vocational Education: Purposes, Traditions and Prospects*

Reference:

- *) World Bank Group, Global Economic Prospect, 2016
**) World Bank Group, World Development Indicators, 2016
***) World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2015-2016